

**DETERMINAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH:
UKURAN DAERAH, OPINI AUDIT, TEMUAN AUDIT DAN TINDAK
LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN**

(Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2016-2017)

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



Oleh:

RISKA AMALIA SARI

NIM. 17.52.21.104

**PROGAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
2021**

DETERMINAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH:
UKURAN DAERAH, OPINI AUDIT, TEMUAN AUDIT DAN TINDAK
LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN

(Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2016-2017)

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Dalam Bidang Ilmu Akuntansi Syariah

Oleh:

RISKA AMALIA SARI
NIM. 17.52.21.104

Surakarta, 18 Maret 2021

Disetujui dan disahkan oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi:



Ade Setiawan, M.Ak
NIP. 19800712 201403 1 003

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : RISKA AMALIA SARI
NIM : 17.52.21.104
PRODI : AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul “DETERMINAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH: UKURAN DAERAH, OPINI AUDIT, TEMUAN AUDIT DAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2016-2017)”

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 18 Maret 2021



Riska Amalia Sari

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : RISKAMALIA SARI
NIM : 17.52.21.104
PRODI : AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul “DETERMINAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH: UKURAN DAERAH, OPINI AUDIT, TEMUAN AUDIT DAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2016-2017)”

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya benar-benar telah melakukan penelitian dan pengambilan data dari <http://otda.kemendagri.go.id> dan www.bpk.go.id . Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi saya menggunakan data yang tidak sesuai dengan data yang sebenarnya, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 18 Maret 2021



Riska Amalia Sari

Ade Setiawan, S.Pd., M.Ak.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Riska Amalia Sari

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Riska Amalia Sari NIM: 17.52.21.104 yang berjudul:

**DETERMINAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH:
UKURAN DAERAH, OPINI AUDIT, TEMUAN AUDIT DAN TINDAK
LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN**

(Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2016-2017)

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.Akun) dalam bidang ilmu Akuntansi Syariah.
Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 18 Maret 2021
Dosen Pembimbing Skripsi



Ade Setiawan, M.Ak.
NIP. 19800712 201403 1 003

PENGESAHAN

**DETERMINAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
DAERAH: UKURAN DAERAH, OPINI AUDIT, TEMUAN AUDIT DAN
TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN**

(Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2016-2017)

Oleh:

RISKA AMALIA SARI
NIM. 17.52.21.104

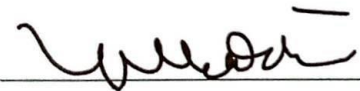
Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah
Pada hari Selasa tanggal 06 April 2021/ 23 Syakban 1442 H dan dinyatakan
telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Dewan Penguji:

Penguji I (Merangkap Ketua Sidang)
Dita Andraeny, S.E., M.Si.
NIP. 19880628 201403 2 005



Penguji II
Arif Nugroho, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19920516 201903 1 009




Penguji III
Ronnawan Juniatmoko, S.Pd., M.Si.
NIP. 1990607 201903 1 011



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Surakarta



Dr. M. Rahmawan Arifin, M.Si. 
NIP. 19720304 200112 1 004

MOTTO



“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan (QS. AL-Insyirah: 5)”

“Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. (QS. Al-Mujadillah : 11)”

“Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. (HR. Muslim, No. 2699)”

“Barangsiapa yang ingin sukses di dunia maka hendaklah dengan ilmu, barangsiapa yang ingin sukses di akhirat maka hendaklah dengan ilmu, dan barangsiapa yang ingin sukses pada keduanya (dunia dan akhirat) maka hendaklah dengan ilmu (pula) -Imam Syafi’i”



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil 'aalamiin

Kalimat syukur yang tiada henti kuucapkan atas curahan rahmat dan nikmat yang dilimpahkan Allah menandai selesainya penulisan karya ilmiah skripsi ini.

Dengan segenap hati dan doa

Karya sederhana ini ku persembahkan kepada:

Orang tua tercinta Bapak Yatikno dan Ibu Sri Mulyani.

Adikku Nur Isma Agustin yang selalu memberikan dukungan dan semangat.

Sahabatku Lutfi, Sindi, Silvia, Nandita, Ambar, Hikmah, Sholikhah, Herlinda, Arum dan Ratna yang tiada henti-hentinya memberikan perhatian dan semangat.

Teman-teman Akuntansi Syariah A & C angkatan 2017 serta teman-teman semuanya yang telah mendoakan dan mendukung dengan sepenuh hati.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan curahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga dapat terselesaikan skripsi yang berjudul “Determinan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah: Ukuran Daerah, Opini Audit, Temuan Audit Dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2016-2017)”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Mudofir, S.Ag., M.Pd., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
2. Dr. Mohamad Rahmawan Arifin, SE., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ade Setiawan, S.Pd., M.Ak., selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan segala perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta yang telah memberikan segenap bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
5. Orang tua tercinta, Bapak Yatikno dan Ibu Sri Mulyani terimakasih atas segenap doa, kasih sayang dan pengorbanan yang luar biasa.
6. Adiku tersayang Nur Isma Agustin yang selalu mendukung dan menyayangiku.
7. Sahabat-sahabatku Lutfi, Sindi, Silvia, Nandita, Ambar, Hikmah, Sholikah, Herlinda, Arum dan Ratna yang tiada henti memberikan doa dan semangat.
8. Keluarga Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Syariah (HMJ AKS), Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM), Kelompok Studi Akuntansi Syariah (KSAS) telah memberikan ilmu yang tidak saya dapatkan di perkuliahan.
9. Teman-teman angkatan Progam Studi Akuntansi Syariah tahun 2017 yang telah memberikan semangat luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta.

Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 18 Maret 2021

Penulis

ABSTRACT

This study aims to obtain empirical evidence about the effect of size, audit opinion, audit findings and follow-up of audit recommendation to the local government performance in Indonesia.

The data used in this study are secondary data using data obtained from Scores on the evaluation of local government performance (EKPPD) and examination result report (LHP). Population of this research is all the district/city in Indonesia during 2016-2017. According to purposive sampling method, it is obtained 415 districts and cities in Indonesia as samples of this research. Data analysis technique used in this research is panel data regression test with Eviews 10.

The results of the analysis indicate that size and audit opinion have significant positive effect on the performance of local government. Audit findings and follow-up of audit recommendation have no significant effect to the performance of local government.

Keyword: *local government performance, size, audit opinion, audit findings, follow-up of audit recommendation.*

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh ukuran daerah, opini audit, temuan audit dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap kinerja pemerintah daerah di Indonesia.

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Populasi pada penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2016-2017. Sampel penelitian diambil menggunakan metode purposive sampling, dengan sampel 415 kabupaten/kota di Indonesia. Metode analisis data penelitian menggunakan regresi data panel dengan Eviews 10.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran daerah dan opini audit berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Temuan audit dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Kata kunci: kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, ukuran daerah, opini audit, temuan audit, tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN PENELITIAN	iv
HALAMAN NOTA DINAS	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
<i>ABSTRACT</i>	xi
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	11

1.3.	Batasan Masalah.....	12
1.4.	Rumusan Masalah	12
1.5.	Tujuan Penelitian	13
1.6.	Manfaat Penelitian	13
1.7.	Jadwal Penelitian.....	14
1.8.	Sistematika Penulisan Skripsi	14
BAB II LANDASAN TEORI		16
2.1.	Kajian Teori.....	16
2.1.1.	Teori <i>Stewardship</i>	16
2.1.2.	Otonomi Daerah	18
2.1.3.	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).....	19
2.1.4.	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) ...	20
2.1.5.	Ukuran Daerah.....	22
2.1.6.	Opini Audit	23
2.1.7.	Temuan Audit	25
2.1.8.	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	26
2.2.	Hasil Penelitian yang Relevan.....	27
2.3.	Kerangka Berfikir.....	34
2.4.	Hipotesis	35

2.4.1.	Pengaruh Ukuran Daerah terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	35
2.4.2.	Pengaruh Opini Audit terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	36
2.4.3.	Pengaruh Temuan Audit terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	37
2.4.4.	Pengaruh Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	39
BAB III METODE PENELITIAN.....		40
3.1.	Waktu dan Wilayah Penelitian.....	40
3.2.	Jenis Penelitian.....	40
3.3.	Populasi, Sampel, Teknik Pengambilan Sampel.....	40
3.3.1.	Populasi.....	40
3.3.2.	Sampel.....	41
3.3.3.	Teknik Pengambilan Sampel.....	41
3.4.	Data dan Sumber Data.....	49
3.5.	Teknik Pengumpulan Data.....	49
3.6.	Variabel Penelitian.....	50
3.6.1.	Variabel Terikat (Variabel Dependen).....	50
3.6.2.	Variabel Bebas (Variabel Independen).....	50

3.7.	Definisi Operasional Variabel	50
3.8.	Teknik Analisis Data	52
3.8.1.	Estimasi Model Regresi Data Panel	53
3.8.2.	Pemilihan Model Regresi Data Panel	54
3.8.3.	Analisis Statistik Deskriptif	56
3.8.4.	Uji Asumsi Klasik.....	57
3.8.5.	Analisis Regresi Data Panel.....	59
3.8.6.	Uji Ketepatan Model.....	60
3.8.7.	Uji Hipotesis (uji t)	61
BAB IV PEMBAHASAN.....		63
4.1.	Gambaran Umum Objek Penelitian	63
4.2.	Pengujian dan Hasil Analisis Data	64
4.2.1.	Analisis Statistik Deskriptif	64
4.2.1.	Estimasi Model Regresi Data Panel	67
4.2.2.	Pemilihan Model Regresi Data Panel.....	69
4.2.3.	Uji Asumsi Klasik.....	71
4.2.4.	Analisis Regresi Data Panel.....	75
4.2.5.	Uji Ketepatan Model.....	78
4.2.6.	Uji Hipotesis	80
4.3.	Pembahasan Hasil Penelitian.....	82

4.3.1.	Pengaruh Ukuran Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	82
4.3.2.	Pengaruh Opini Audit Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	83
4.3.3.	Pengaruh Temuan Audit Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	84
4.3.4.	Pengaruh Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	86
BAB V PENUTUP.....		88
5.1.	Kesimpulan.....	88
5.2.	Keterbatasan Penelitian.....	89
5.3.	Saran.....	89
Daftar Pustaka.....		91
Lampiran.....		95

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Kriteria Penetapan Status Pemerintah Daerah	4
Tabel 1. 2 <i>Research Gap</i> Pengaruh Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen	8
Tabel 2. 1 Kriteria Penetapan Status Pemerintah Daerah	22
Tabel 2. 2 Hasil Penelitian Terdahulu	27
Tabel 3. 1 Proses Seleksi Sampel Penelitian.....	42
Tabel 3. 2 Hasil Seleksi Sampel Penelitian.....	43
Tabel 3. 3 Definisi Operasional Variabel.....	51
Tabel 3. 4 Tabel Keputusan <i>Durbin-Watson</i>	58
Tabel 4. 1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	65
Tabel 4. 2 Hasil Regresi Data Panel <i>Common Effect Model</i>	67
Tabel 4. 3 Hasil Regresi Data Panel <i>Fixed Effect Model</i>	68
Tabel 4. 4 Hasil Regresi Data Panel <i>Random Effect Model</i>	69
Tabel 4. 5 Hasil Uji <i>Chow</i>	70
Tabel 4. 6 Hasil Uji <i>Hausman</i>	71
Tabel 4. 7 Hasil Uji Normalitas	72
Tabel 4. 8 Hasil Uji Autokorelasi	73
Tabel 4. 9 Hasil Uji Heteroskedastisitas	74
Tabel 4. 10 Hasil Uji Multikolonieritas	75
Tabel 4. 11 Hasil Uji <i>Fixed Effect Model</i>	75
Tabel 4. 12 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	78

Tabel 4. 13 Hasil Uji F ANOVA	79
Tabel 4. 14 Hasil Uji Hipotesis (Uji t)	80
Tabel 4. 15 Ringkasan Hasil Penelitian	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Ringkasan Skor EKPPD Kabupaten dan Kota di Indonesia Tahun 2016-2017.....	5
Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir.....	35

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Jadwal Penelitian	96
Lampiran 2 Surat Ijin Penelitian	97
Lampiran 3 Sampel Penelitian	98
Lampiran 4 Tabulasi Data Sebelum Outlier	104
Lampiran 5 Tabulasi Data Setelah Outlier	122
Lampiran 6 Hasil Analisis Statistik Deskriptif	138
Lampiran 7 Hasil Estimasi Model Regresi Data Panel	138
Lampiran 8 Pemilihan Estimasi Model Regresi Data Panel	140
Lampiran 9 Hasil Uji Asumsi Klasik	141
Lampiran 10 Hasil Uji Regresi Data Panel	142
Lampiran 11 Hasil Pengujian Hipotesis	143
Lampiran 12 Hasil Cek Plagiarisme	145
Lampiran 13 Daftar Riwayat Hidup	146

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan amanah UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa terdapat delegasi kewenangan dari pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah, kecuali kewenangan politik luar negeri, yustisi, pertahanan dan keamanan, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Tujuan utama otonomi daerah adalah untuk mengembangkan pelayanan pemerintah yang lebih baik serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah dalam rangka pencapaian kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat (Kiswanto dan Fatmawati, 2019).

Kebijakan otonomi daerah sebagai alat pemerintah daerah untuk mengembangkan dan mengoptimalkan potensi pemerintah daerah. Hal ini tentu menjadi peluang besar bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerjanya. Otonomi daerah diharapkan dapat menjadikan pemerintah daerah lebih mandiri serta tidak bergantung pada sumber dana bantuan pemerintah pusat baik dalam pembiayaan untuk kebutuhan rumah tangga maupun pembangunan daerah (Rusmin, Astami dan Scully, 2014).

UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 69 Ayat 1 mewajibkan tiap kepala daerah untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada pemerintah pusat. Menindaklanjuti undang-undang tersebut dikeluarkalah PP No 13 tahun 2019 Pasal 1 Ayat 1 yang menyatakan bahwa Laporan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (LPPD) adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Menurut PP No 13 Tahun 2019 Pasal 4 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menyatakan ruang lingkup Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) terdiri atas capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan capaian kinerja pelaksana tugas pembantuan. Lebih lanjut berdasarkan PP No 13 Tahun 2019 pasal 11 dijelaskan mekanisme penyampaian LPPD provinsi yaitu gubernur menyampaikan LPPD provinsi kepada presiden melalui menteri. Sedangkan, mekanisme penyampaian LPPD kabupaten/kota disampaikan oleh bupati/walikota kepada Menteri melalui gubernur. Hasil evaluasi LPPD dapat memberikan manfaat kepada pemerintah pusat untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota yang lebih baik (Sudarsana dan Rahardjo, 2013).

LPPD dijadikan sebagai alat pertanggungjawaban yakni berupa sumber informasi utama yang digunakan untuk melakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) serta dijadikan dasar bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengendalian diperlukan dari pemerintah pusat agar kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah berjalan baik dengan menilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (Kiswanto dan Fatmawati, 2019).

Evaluasi adalah proses pengumpulan dan analisis data dengan sistematis atas penyelenggaraan pemerintahan daerah menggunakan sistem pengukuran kinerja. Sistem pengukuran kinerja berguna untuk mengukur, menilai, dan membandingkan secara sistematis serta berkesinambungan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penilaian kinerja dibutuhkan untuk menunjukkan tingkat prestasi pelayanan terhadap masyarakat. Indikator yang digunakan terukur dan jelas serta metode pengukuran yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan penilaian terhadap laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah (Ulum, 2012).

Menurut PP No 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa EKPPD adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah dan kelengkapan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan pada daerah yang baru dibentuk. Tujuan utama dilaksanakannya evaluasi adalah untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai upaya untuk meningkatkan pencapaian tujuan atas penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip *good goverment* (Andani, Sarwani dan Respati, 2019).

Permendagri No. 73 Tahun 2009 Pasal 2 menyatakan EKPPD dilaksanakan berdasarkan asas spesifik, obyektif, berkesinambungan, terukur, dapat diperbandingkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Lebih lanjut berdasarkan Permendagri No. 73 Tahun 2009 Pasal 17 menyatakan penilaian atas EKPPD menggunakan LPPD sebagai sumber utama untuk memperoleh informasi

capaian kinerja pada aspek tataran pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) menggunakan metode penilaian total indeks komposit kinerja pemerintah daerah. Komposit atas total indeks kinerja pemerintah daerah berasal dari penjumlahan hasil penilaian dari indikator indeks capaian kinerja dan indeks kesesuaian materi.

Berdasarkan Permendagri Nomor 73 tahun 2009 Pasal 29 menyatakan laporan hasil pemeringkatan dan status provinsi dan kabupaten/kota disusun secara nasional. Hasil EKPPD disampaikan setiap tahun anggaran digunakan pemerintah sebagai dasar untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan otonomi atau pembentukan, penghapusan/penggabungan daerah otonom. Berikut skor dan status indeks EKPPD pemerintah daerah dilakukan dengan membuat *range* yang terdiri dari 4 kategori prestasi yaitu:

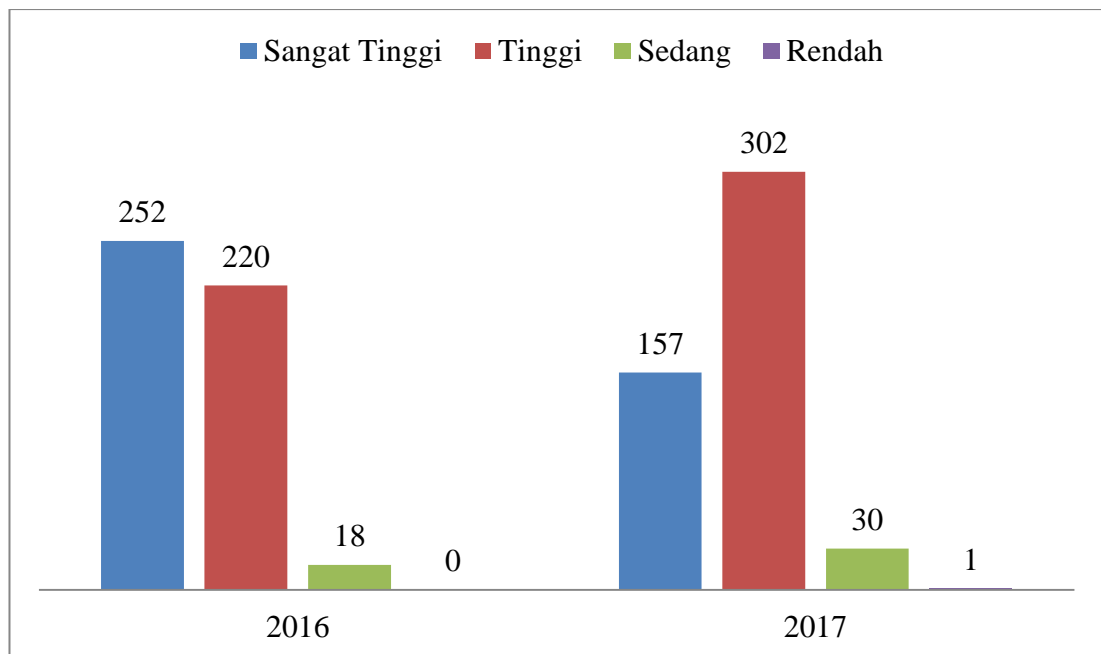
Tabel 1. 1 Kriteria Penetapan Status Pemerintah Daerah

Indeks EKPPD	Status
4,00-3,00	Sangat Tinggi
2,99-2,00	Tinggi
1,99-1,00	Sedang
0,99-0,00	Rendah

Sumber: Permendagri No 73 Tahun 2009

Berikut adalah ringkasan skor dan status pemeringkatan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2016-2017:

Gambar 1. 1 Ringkasan Skor EKPPD Kabupaten dan Kota di Indonesia Tahun 2016-2017.



Sumber: Data diolah, 2021.

Hasil penetapan EKPPD tahun 2017 skor kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia mengalami penurunan. Berdasarkan EKPPD tahun 2016 kabupaten yang memperoleh status sedang sebanyak 18 kabupaten (4,5%). Sedangkan, EKPPD tahun 2017 kabupaten yang memperoleh status sedang sebanyak 35 (7,5%) dan 1 kota dengan status sedang. Skor kinerja pemerintah daerah kabupaten dan kota tahun 2016 dengan status sangat tinggi terdapat 252 kabupaten dan kota. Hal ini mengalami penurunan pada tahun 2017 dengan perolehan status sangat tinggi 157 kabupaten dan kota. Sehingga dapat dikatakan

kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia tahun 2017 mengalami penurunan.

Kinerja pemerintah digambarkan dengan tingkat pencapaian tujuan instansi pemerintah yakni tercapainya visi, misi dan strategi pemerintah daerah sebagai indikator tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Kinerja pemerintah daerah dapat dikategorikan baik jika dalam melaksanakan program dan kebijakan pemerintah dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya secara keseluruhan (Puspitasari dan Setyanta, 2020). Terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang akan diteliti pada penelitian ini yaitu ukuran daerah, opini audit, temuan audit dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.

Tujuan utama dari program kerja pemerintah daerah adalah memberikan fasilitas yang terbaik untuk masyarakat. Agar dapat memberikan pelayanan yang baik, maka harus didukung oleh pengelolaan aset yang baik pula. Oleh karena itu diperlukan adanya sumber daya dan fasilitas yang memadai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah yang memiliki ukuran besar akan dituntut untuk memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan pemerintah daerah yang kecil ukurannya (Harumiati dan Payamta, 2014).

Menurut Kiswanto dan Fatmawati (2019) berdasarkan teori *stewardship* menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang bertugas mengelola aset dengan baik dapat meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah karena

mampu memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Semakin besar sumberdaya ekonomi yang dimiliki pemerintah maka kontribusi terhadap kegiatan operasional pemerintahan daerah semakin besar sehingga dapat meningkatkan *performance* keuangan pemerintah daerah (Andani, Sarwani dan Respati, 2019).

Aspek pengelolaan keuangan menjadi ranah pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pengelolaan keuangan daerah termasuk unsur dalam LPPD suatu pemda yang tidak dapat dipisahkan sehingga diperlukan pengendalian serta pengawasan yang baik agar tidak terjadi kecurangan (Sudarsana dan Rahardjo, 2013). Di Indonesia, pemeriksaan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini berkaitan dengan salah satu hasil pemeriksaan BPK yakni pemeriksaan kinerja yang didalamnya mengungkapkan opini audit, temuan audit dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.

Menurut Pasal 1 Ayat 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini adalah pernyataan profesional hasil kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Semakin WTP suatu opini pemerintah daerah menunjukkan pengelolaan keuangan yang baik (Kusuma dan Kurniasih, 2011). Hal ini selaras dengan teori *stewardship* yang menunjukkan pemerintah sebagai *steward* telah akuntabel dalam mengelola keuangan dengan perolehan opini WTP.

Temuan audit didefinisikan sebagai kasus-kasus pelanggaran atas laporan keuangan pemerintah daerah terhadap ketentuan perundang-undangan yang

ditemukan oleh BPK. Teori *stewardship* menyatakan bahwa temuan yang banyak mengindikasikan pelanggaran yang dapat merugikan salah satu pihak yaitu rakyat sebagai *principal* (Ara, Herwanti dan Pituringsih, 2016). Semakin banyak temuan audit, semakin menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dari pemerintah daerah kurang baik. Sehingga pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kinerja dari pemerintah daerah tersebut..

Hasil pemeriksaan lainnya adalah rekomendasi atas adanya kesalahan dalam penyajian laporan keuangan, hal ini dimaksudkan untuk memperbaiki informasi keuangan yang disajikan. Menurut Kiswanto dan Fatmawati (2019) teori *stewardship* menyatakan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan yang dilaksanakan pemerintah daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah berusaha melaksanakan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahannya. Sehingga pada akhirnya akan membuat rakyat sejahtera.

Berikut adalah hasil perbedaan penelitian-penelitian terdahulu:

Tabel 1. 2 *Research Gap* Pengaruh Variabel Independen Terhadap Variabel
Dependen

No	Variabel	Hubungan	Jurnal
1	Ukuran Daerah	Positif	(Siddi, 2016); (Artha, Basuki dan MT, 2016); (Kiswanto dan Fatmawati, 2019); (Pauli, 2015); (Andani, Sarwani dan Respati, 2019);
		Negatif	
		Tidak Berpengaruh	(Sedyaningsih, 2012); (Sudarsana dan Rahardjo, 2013); (Harumiati dan Payamta, 2014); (Anggraini, Rahayu dan Junaidi, 2019)

Tabel berlanjut...

Lanjutan tabel 1.2

2	Opini Audit	Positif	(Siddi, 2016; Ahyaruddin dan Amrillah, 2018; Andani, Sarwani dan Respati, 2019)
		Negatif	
		Tidak Berpengaruh	(Wijaya, Rante dan Ramandey, 2000; Kusuma dan Kurniasih, 2011; Mardianis, afrizal, 2017)
3	Temuan Audit	Positif	
		Negatif	(Sedyaningsih, 2012; Sudarsana dan Rahardjo, 2013; Harumiati dan Payamta, 2014; Ara, Herwanti dan Pituringsih, 2016; Kiswanto dan Fatmawati, 2019; Furqan dkk, 2020)
		Tidak Berpengaruh	(Artha, Basuki dan MT, 2016); (Suheri, Cahyono dan Yunia, 2018)
4	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	Positif	(Kiswanto dan Fatmawati, 2019; Furqan dkk, 2020)
		Negatif	
		Tidak Berpengaruh	(Harumiati dan Payamta, 2014)

Sumber: Data diolah, 2021.

Penulis beranggapan bahwa penelitian tentang kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia masih menjadi obyek penelitian yang penting dan menarik. Hal ini karena Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) dijadikan sebagai dasar dalam melakukan pengawasan, pembinaan dan kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, EKPPD juga dapat dijadikan pertimbangan pada LPPD tahun selanjutnya.

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Kiswanto dan Fatmawati (2019) yang menguji pengaruh ukuran pemerintah daerah, *leverage*,

temuan audit dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota di Pulau Jawa tahun 2014. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat pengaruh positif ukuran daerah dan tindak lanjut rekomendasi terhadap kinerja pemerintah daerah. Temuan audit berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah, sedangkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti memperluas sampel penelitian oleh Kiswanto dan Fatmawati (2019) dengan sampel penelitian kabupaten/kota di Pulau Jawa menjadi seluruh kabupaten/kota di Indonesia, hal ini dimaksudkan agar lebih representatif atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Selain itu, penelitian ini menggunakan tambahan variabel independen yaitu variabel opini audit. Variabel opini audit sebagai hasil salah satu pemeriksaan oleh BPK yang menunjukkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah (Pauli, 2015). Perolehan opini audit dari BPK RI berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mengisyaratkan kinerja pemerintah daerah yang baik.

Penelitian ini menggunakan periode tahun 2016-2017 untuk melihat pengaruh ukuran daerah, opini audit, temuan audit dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Sesuai dengan penelitian dari Siddi (2016) penggunaan dua tahun periode pada penelitian ini bertujuan bahwa laporan keuangan dapat bermanfaat untuk mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini karena laporan keuangan audit setiap periode kemudian diterbitkan pada tahun berikutnya.

Penggunaan periode penelitian dari tahun 2016-2017 disebabkan karena adanya keterbatasan perolehan data untuk menguji variabel kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri sebagai otoritas yang merilis skor dan status Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) melalui website resminya (<http://otda.kemendagri.go.id/>) merilis data EKPPD terbaru sampai tahun 2017.

Berdasarkan perbedaan hasil penelitian dan latar belakang penelitian maka peneliti mengangkat penelitian yang berjudul **“Determinan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah: Ukuran Daerah, Opini Audit, Temuan Audit Dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2016-2017)”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas dapat diidentifikasi masalah-masalah yang dijadikan dasar penelitian sebagai berikut:

1. Adanya penurunan skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota pada tahun 2017.
2. Adanya ketidak-konsistenan dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya mengenai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang dipaparkan pada tulisan sebelumnya, maka penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

1. Variabel yang diduga berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah pada penelitian ini antara lain ukuran daerah, opini audit, temuan audit dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.
2. Periode penelitian yang digunakan yaitu tahun 2016-2017 sesuai ketersediaan data kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dari website resmi Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (<http://otda.kemendagri.go.id/>).

1.4. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah ukuran daerah berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah?
2. Apakah opini audit berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah?
3. Apakah temuan audit berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah?
4. Apakah tindak lanjut hasil pemeriksaan berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang, batasan masalah dan rumusan masalah sehingga penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menguji pengaruh ukuran daerah terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah
2. Menguji pengaruh opini audit terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah
3. Menguji pengaruh temuan audit terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah
4. Menguji pengaruh tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1.1. Bagi Akademisi

Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk penelitian-penelitian selanjutnya. sehingga penelitian ini dapat menambah referensi dan pengembangan penelitian tentang kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.1. Bagi Pemerintah Daerah

Bagi pemerintah daerah, diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan sehingga bisa dijadikan sebagai pertimbangan dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

1.7. Jadwal Penelitian

Terlampir.

1.8. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini terbagi atas lima bagian dengan sistematika antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jadwal penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi menjelaskan landasan teori dan hasil penelitian-penelitian sebelumnya serta hipotesis yang dirumuskan. Pada bab ini juga menggambarkan kerangka berfikir penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, dan juga metode analisis penelitian.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai analisis dari hasil penelitian yang telah melalui pengujian menggunakan metode penelitian yang telah ditetapkan peneliti. Lebih lanjut bab ini menjelaskan secara detail analisis hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil dan analisis dari penelitian yang dilakukan. Selain itu, bab ini juga terdapat saran kepada berbagai pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Kajian Teori

2.1.1. Teori *Stewardship*

Teori *Stewardship* berdasarkan atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia. Manusia diasumsikan pada dasarnya dapat dipercaya, segala tindakan dapat dipertanggungjawabkan, mempunyai integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Hal ini biasa disebut hubungan fidusia (hubungan berdasarkan kepercayaan) sesuai kehendak para *stakeholder* (Ara, Herwanti dan Pituringsih, 2016). Teori *Stewardship* memandang manajer sebagai seseorang yang dapat dipercaya sebagai wakil dari para *stakeholder* untuk melakukan tindakan yang sebaik-baiknya bagi kepentingan publik.

Menurut Kiswanto dan Fatmawati (2019) teori *Stewardship* adalah teori yang menggambarkan bahwa manajer dalam melakukan tindakan termotivasi untuk kepentingan perusahaan bukan atas dasar tujuan individu. Dalam teori *stewardship* rakyat berperan sebagai “*principal*” sedangkan pemerintah berperan sebagai “*steward*”. Ketika terjadi perbedaan kepentingan antara pemilik dan *steward*, maka *steward* akan mengedepankan usaha kerja sama. Menurut teori *stewardship* pemerintah bertindak sebagai *steward* dianggap memiliki motivasi bekerja untuk kesejahteraan dan kedaulatan rakyat.

Menurut Ara, Herwanti dan Pituringsih (2016) teori *Stewardship* mempunyai pandangan bahwa pemerintah daerah sebagai suatu lembaga negara

yang dapat dipercaya dan bertanggungjawab sesuai dengan kepentingan rakyat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan tepat, mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan, sehingga diharapkan meningkatkan tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat (Ara, Herwanti dan Pituringsih, 2016).

Kepercayaan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengelola potensi daerah disebut dengan otonomi daerah. Sejalan dengan penjelasan tersebut, Undang-undang No.23 tahun 2014 selain memberikan kewenangan otonomi kepada pemerintah daerah, juga mewajibkan tiap kepala daerah untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada pemerintah pusat. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat (Ara, Herwanti dan Pituringsih, 2016).

Penyusunan LPPD dimaksudkan sebagai upaya *monitoring* atas kinerja pemerintah daerah, kemudian akan dilakukan penilaian oleh pemerintah pusat berupa Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Dearah. EKPPD adalah evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/ kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (Andani, Sarwani dan Respati, 2019).

2.1.2. Otonomi Daerah

Menurut Undang-undang No 23 tahun 2014 otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. Pembagian daerah otonom dibagi atas wilayah provinsi, kabupaten/kota. Sesuai dengan pasal 57 UU No 23 tahun 2014 menyatakan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah.

Peran pemerintah pusat atas otonomi daerah yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah. Pemerintah daerah diberikan urusan untuk mengurus daerahnya sendiri, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama menjadi tugas pemerintah pusat. Demi terwujudnya tujuan dari otonomi daerah serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah daerah mencakup keuangan maupun tata kelolanya (Kiswanto dan Fatmawati, 2019).

Setiap kepala daerah wajib menyampaikan laporan kinerja pemda dalam bentuk laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat setiap tahunnya (Sedyaningsih, 2012). Sejalan dengan itu menurut Pasal 69 UU

No 23 tahun 2014 kepala daerah wajib menyampaikan beberapa laporan antara lain:

1. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan yang disampaikan kepada pemerintah pusat.
2. Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang disampaikan kepada DPRD.
3. Ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.1.3. Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD)

Menindaklanjuti UU No 23 tahun 2014 menyatakan bahwa setiap pemerintah daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), maka diatur lebih lanjut pada PP No 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Menurut PP No 13 tahun 2019 Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD) adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. Indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah antara lain:

1. Capaian kinerja makro;
2. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; dan
3. Capaian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Sedangkan indikator pelaksana tugas pembantuan antara lain:

1. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah provinsi dari pemerintah pusat; dan
2. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah kabupaten/kota dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah provinsi.

LPPD disampaikan kepada pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri. LPPD dijadikan dasar dalam penilain Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) dan bertujuan penilaian, perumusan kebijakan, dan pembinaan pemerintah daerah yang dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.

2.1.4. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)

Kinerja merupakan bentuk keberhasilan kerja yang diukur menggunakan kriteria yang telah ditetapkan bersama (Suheri, Cahyono dan Yunia, 2018). Kinerja juga diartikan sebagai suatu kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan hasil pekerjaan. Kinerja pemerintah dapat digambarkan dari tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai pewujudan dari visi, misi dan strategi pemerintah daerah yang menjadi tolak ukur tingkat keberhasilan dan

kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai program dan kebijakan yang telah ditetapkan (Puspitasari dan Setyanta, 2020).

Menurut PP No 73 tahun 2009 EKPPD adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah dan kelengkapan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan pada daerah yang baru dibentuk dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja. Indikator kinerja atau disebut Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan.

Menurut pasal 17 Permendagri No 73 tahun 2009 metode EKPPD menggunakan penilaian total indeks komposit kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas penjumlahan indikator indeks capaian kinerja (95%) dan indeks capaian materi (5%). Indeks capaian kinerja diukur dengan menilai IKK pada aspek tataran pengambil kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Dalam melaksanakan EKPPD terdapat tim nasional dan tim daerah. Hasil EKPPD tahunan dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan otonomi atau pembentukan, penghapusan/penggabungan daerah otonom. Ranking kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota disusun secara nasional berdasarkan peringkat, skors dan status.

Tabel 2. 1 Kriteria Penetapan Status Pemerintah Daerah

Indeks EKPPD	Status
4,00-3,00	Sangat Tinggi
2,99-2,00	Tinggi
1,99-1,00	Sedang
0,99-0,00	Rendah

Sumber: Kemendagri No 73 Tahun 2009

2.1.5. Ukuran Daerah

Ukuran pemerintah daerah adalah kapasitas daerah dengan melihat total sumber daya ekonomi yang dimiliki daerah atau total asetnya (Sedyaningsih, 2012). Ukuran pemerintah daerah ditandai dengan total aset yang dimiliki setiap pemerintah daerah. Pemerintah daerah bertindak sebagai *agent* mempunyai tujuan utama dalam melaksanakan program dan kebijakan berupa peningkatan pelayanan bagi masyarakat sebagai pemberi amanah (*principal*) (Harumiati dan Payamta, 2014). Sehingga untuk menunjang tujuan pemerintah diperlukan sumber daya serta fasilitas yang memadai agar pelayanan kepada masyarakat dapat maksimal. Aset daerah yang dimiliki pemerintah daerah penting sebagai penopang utama pendapatan asli daerah (Sedyaningsih, 2012).

Pemerintah daerah yang mempunyai sumberdaya yang relatif besar akan mempunyai tekanan yang besar juga dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya (Pauli, 2015). Pemerintah daerah dalam melakukan pengungkapan atas laporan kinerjanya akan termotivasi untuk mengungkapkan aspek-aspek yang bersifat berita baik. Pengungkapan berita baik akan meningkatkan kinerja pemda.

Sehingga penting bagi pemerintah daerah dalam mengelola aset yang dimiliki sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat.

2.1.6. Opini Audit

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mengenai Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Opini adalah pernyataan profesional dari pemeriksa sebagai kesimpulan atas tingkat kewajaran informasi yang disajikan pada laporan keuangan. Kriteria kewajaran informasi keuangan pada laporan keuangan terdiri atas: (i) sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) pengungkapan yang cukup, (iii) patuh terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Opini audit adalah pernyataan profesional dari BPK RI selaku badan audit independen yang bertugas mengawasi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Jenis-jenis opini oleh BPK RI antara lain:

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Opini WTP adalah opini laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar serta material sehingga informasi keuangan dapat digunakan oleh para *Stakeholder* untuk mengambil keputusan.

2. Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-WDP)

Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP DPP) termasuk ke dalam opini WTP dengan paragraf penjelas atas penyajian laporan keuangan.

3. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

Opini WDP merupakan opini laporan keuangan yang tersaji dan diungkapkan secara wajar pada semua aspek material, kecuali untuk hal-hal yang berhubungan dengan pengecualian sehingga menimbulkan suatu dampak.

4. Opini Tidak Wajar (TW)

Opini tidak wajar memuat bahwa laporan keuangan tidak tersaji dan diungkapkan secara wajar pada semua aspek material, sehingga informasi keuangan tidak dapat digunakan untuk pengambilan keputusan bagi para pengguna.

5. Pernyataan Menolak Memberikan Opini (TMP)

Opini yang menyatakan bahwa laporan keuangan tidak bisa diperiksa menurut standar audit. Sehingga seorang auditor tidak dapat memeriksa laporan keuangan yang bebas dari salah saji material.

Laporan keuangan pemerintah daerah harus disusun sesuai keadaan yang sebenarnya dan mematuhi standar prinsip akuntansi yang berlaku umum agar informasi laporan keuangan wajar. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemeriksaan atas laporan keuangan yang dimaksudkan untuk menilai kewajaran laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Opini audit BPK merupakan wujud akuntabilitas pemerintah daerah yang dapat dinilai oleh publik yaitu semakin baik opini audit maka dapat menunjukkan semakin membaiknya kinerja suatu pemerintah daerah (Kusuma dan Kurniasih, 2011).

2.1.7. Temuan Audit

BPK dalam melakukan pemeriksaan menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan pemda. Salah satu Laporan Hasil Pemeriksaan yaitu LHP atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berisi temuan atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sehingga menimbulkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (BPK, 2013).

Temuan audit atas pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan ini mencerminkan banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pemda sehingga mengakibatkan kerugian material. Temuan audit atas pelanggaran peraturan perundang-undangan disebabkan pemerintah daerah kurang memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku pada setiap kebijakan yang dilakukan.

Temuan audit harus diperiksa karena menyebabkan kerugian negara dan daerah. Tindakan seperti ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun disebabkan karena *human error* terhadap unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang dapat berupa ketidakefisien dana hingga korupsi (Sedyaningsih, 2012).

Temuan audit merupakan kasus-kasus yang ditemukan dalam pemeriksaan BPK, dalam hal ini pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak temuan yang dilakukan oleh

Pemerintah daerah menggambarkan semakin buruknya kinerja Pemerintah daerah tersebut (Sedyaningsih, 2012).

2.1.8. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Menurut Pasal 1 ayat 12 UU No 15 tahun 2004 mengenai Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mendefinisikan rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. Rekomendasi diberikan oleh BPK sebagai tindakan lebih lanjut dari temuan audit yang berguna sebagai saran perbaikan laporan keuangan.

Rekomendasi yang dikeluarkan oleh BPK berhubungan dengan temuan yang diperoleh. Jika BPK menemukan terjadinya kelemahan SPI, BPK akan memberikan rekomendasi berupa masukan untuk perbaikan efektivitas SPI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2017).

Menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib melakukan tindak lanjut rekomendasi. Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2010 pasal 3 menyatakan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima dengan berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima dengan dilampiri dokumen bukti pendukung. Jika Pejabat tidak menindaklanjuti rekomendasi tanpa adanya alasan yang sah, BPK dapat

melaporkan kepada instansi yang berwenang. Opini audit yang akan diterima oleh pemerintah daerah dipengaruhi oleh jumlah tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas temuan yang diperoleh.

Tindak lanjut yang dilaksanakan dengan baik akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sehingga dapat mencerminkan pengelolaan pmda yang baik (*good governance*). Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan yang dilaksanakan pemerintah daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah berusaha melaksanakan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahannya. Upaya pemerintah tersebut tentunya akan berdampak pada pelayanan kepada masyarakat sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat. Sehingga semakin banyak rekomendasi yang ditindaklanjuti menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah tersebut semakin meningkat (Kiswanto dan Fatmawati, 2019).

2.2. Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian ini didukung dengan penelitian-penelitian sebelumnya guna memperkuat hasil penelitian, berikut ringkasan hasil-hasil penelitian terdahulu:

Tabel 2. 2 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Variabel	Peneliti, Metode Penelitian dan Sampel	Hasil Penelitian	Saran Penelitian
1.	<u>Variabel independen:</u> Ukuran daerah,	(Kiswanto and Fatmawati, 2019)	Ukuran pemerintah daerah dan	Untuk penelitian kedepannya dapat menambahkan

Tabel berlanjut...

Lanjutan tabel 2.2

	leverage, temuan audit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan <u>Variabel dependen:</u> kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.	Metode analisis regresi linier berganda Sampel penelitian 109 kabupaten/kota di pulau jawa tahun 2014.	tindak lanjut rekomendasi berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Temuan audit berpengaruh negatif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Leverage tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.	variabel independen dan mengkombinasikan komponen penilaian skor kinerja seperti kinerja bidang urusan wajib yang menjadi tanggung jawab pemda.
2.	<u>Variabel independen:</u> Pendapatan asli daerah, belanja operasional, utang, ukuran pemerintah daerah, opini audit <u>Variabel</u>	(Siddi, 2016) Metode analisis regresi linier berganda Sampel Penelitian 795 kabupaten/kota tahun 2010-2012 untuk kinerja	Pendapatan asli daerah, belanja operasional, utang, ukuran pemerintah daerah dan opini audit berpengaruh positif terhadap kinerja	Penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian secara khusus dengan menggunakan data ekstrim (<i>outliers</i>).

Tabel berlanjut...

Lanjutan tabel 2.2

	<u>dependen:</u> Kinerja pemda	pemerintah daerah dan tahun 2008-2010 untuk data laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia.	penyelenggaraan pemerintah daerah.	
3.	<u>Variabel independen:</u> <i>The effect of audit findings and Audit recommendation follow-up</i> <u>Variabel mediasi:</u> <i>the financial report</i> <u>variabel dependen:</u> <i>public service quality</i>	(Furqan <i>et al.</i> , 2020) Metode analisis regresi Sampel penelitian 1437 kabupaten/kota di Indonesia tahun 2014-2016	Temuan audit berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah melalui kualitas laporan keuangan. Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah melalui kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan	Penelitian selanjutnya diharapkan menambah periode tahun penelitian, untuk melihat kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dapat menguji pengaruh atas variabel sistem informasi akuntansi.

Tabel berlanjut...

Lanjutan tabel 2.2

			berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.	
4.	<p><u>Variabel independen:</u> Ukuran daerah, kemakmuran daerah, belanja modal dan opini audit</p> <p><u>Variabel dependen:</u> kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.</p>	<p>(Andani, Sarwani and Respati, 2019) Metode analisis regresi linier berganda. Sampel Penelitian 210 provinsi di Indonesia tahun 2010-2016.</p>	<p>Ukuran pemerintah daerah dan opini audit berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Kemakmuran pemerintah daerah dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.</p>	<p>Saran penelitian yang akan datang adalah menambahkan variabel lain seperti E-Government, belanja daerah, jumlah fasilitas umum, atau menambah variabel dari indikator kunci (IKK) yakni untuk urusan wajib dalam menilai kinerja pemerintah provinsi.</p>
5.	<p><u>Variabel independen:</u> Ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat</p>	<p>(Pauli, 2015) Metode analisis menggunakan regresi linier berganda. Sampel</p>	<p>Ukuran daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja</p>	<p>Bagi penelitian yang akan datang diharapkan dapat meneliti menggunakan data tahun yang lebih</p>

Tabel berlanjut...

Lanjutan tabel 2.2

	<p>ketergantungan kepada pemerintah pusat, belanja modal dan tingkat ketidakpaatuhan SPI</p> <p><u>Variabel dependen:</u> terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.</p>	<p>penelitian menggunakan 140 kabupaten/kota di Indonesia tahun 2015.</p>	<p>modal dan tingkat ketidakpatuhan SPI berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.</p> <p>Tingkat kekayaan pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.</p>	<p>baru dan menggunakan variabel independen lain dalam mengukur kinerja pemerintah daerah.</p>
6.	<p><u>Variabel independen:</u> Temuan audit, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja modal, leverage, ukuran pemerintah daerah</p>	<p>(Artha, Basuki dan MT, 2016) Metode menggunakan regresi data panel Sampel kabupaten/kota di Provinsi NTB tahun 2011-2013.</p>	<p>Tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, leverage dan temuan audit tidak berpengaruh terhadap kinerja pemda.</p> <p>Ukuran daerah berpengaruh</p>	<p>di masa yang akan datang dengan menambahkan proksi lain dari karakteristik pemda seperti rasio efektivitas, efisiensi, likuiditas, dan solvabilitas. Disamping itu, penelitian selanjutnya juga dapat</p>

Tabel berlanjut...

Lanjutan tabel 2.2

	<u>Variabel dependen:</u> Kinerja pemda		terhadap kinerja pemda.	menggunakan variabel/faktor lain yang bersifat non keuangan seperti jumlah penduduk, jumlah pegawai dan jumlah anggota DPRD sehingga hasil penelitian lebih representatif.
7.	<u>variabel independen</u> tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat, belanja modal, temuan audit <u>variabel dependen</u> kinerja pemda	(Ara, Herwanti dan Pituringsih, 2016) Metode menggunakan regresi linier berganda. Sampel kabupatendi Sumba tahu 2009-2014	Adanya pengaruh antara tingkat kekayaan pemerintah daerah terhadap kinerja pemerintah. Tingkat ketergantungan dengan pemerintah pusat berpengaruh terhadap kinerja pemerintah. Belanja modal berpengaruh terhadap kinerja pemerintah. Temuan audit berpengaruh terhadap kinerja pemerintah.	Memperluas sampel penelitian, memperbarui data yang digunakan pada penelitian, menggunakan variabel lain karakteristik pemerintah daerah sebagai variabel independen.
8.	<u>variabel independen</u> ukuran daerah, tingkat	(Sedyaningsih, 2012) Metode yang digunakan	Tingkat ketergantungan pada Pemerintah Pusat dan temuan audit	Saran penelitian menggunakan data terbaru, menggunakan

Tabel berlanjut...

Lanjutan tabel 2.2

	kekayaan daerah, tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat, belanja modal dan temuan audit	regresi linier berganda Sampel kabupaten di Sulawesi Selatan tahun 2009-2012.	BPK berpengaruh negatif terhadap kinerja penyelenggaraan Pemerintah. Ukuran daerah, tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan Tingkat kekayaan daerah tidak pengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Realisasi belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan Pemerintah	variabel independen dari non keuangan, menggunakan proksi pengukuaran lain untuk variabel ukuran daerah.
	<u>variabel dependen</u> kinerja pemda			
9.	<u>Variabel independen</u> Pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja daerah dan opini audit	(Mardianis, afrizal, 2017) Metode yang digunakan regresi data panel Sampel kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2009-2013	Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemda. Dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja pemda. Belanja daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemda. Opini audit tidak berpengaruh terhadap kinerja pemda.	Saran penelitian selanjutnya untuk menggunakan data terbaru dan menggunakan variabel independen yang lain untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
10.	<u>Variabel</u>	(Sudarsana dan	Ukuran daerah,	Saran penelitian

Tabel berlanjut...

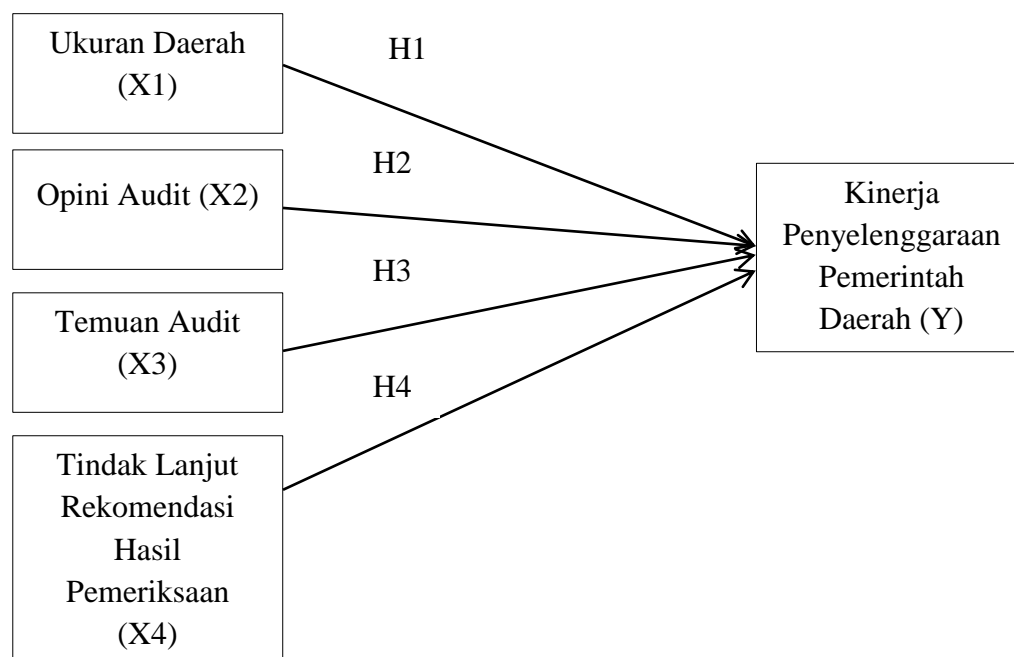
Lanjutan tabel 2.2

	<u>independen</u> Ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat, belanja modal dan temuan audit. <u>Variabel dependen</u> Kinerja pemda	Rahardjo, 2013) Metode yang digunakan regresi logistik ordinal Sampel kabupaten/kota di Indonesia tahun 2010.	tingkat ketergantungan daera kepada pemerintah pusat, belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Temuan audit berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.	selanjutnya untuk menambah tahun penelitian dan menambah variabel yang mengandung IKK untuk penelitian.
--	---	---	--	---

2.3. Kerangka Berfikir

Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan mengenai pengaruh ukuran daerah, opini audit, temuan audit dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir



2.4. Hipotesis

2.4.1. Pengaruh Ukuran Daerah terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Ukuran daerah digambarkan dengan dengan melihat total sumber daya ekonomi yang dimiliki daerah tersebut atau total asetnya (Sedyaningsih, 2012). Tujuan utama pemerintah daerah antara lain pemberian penunjang fasilitas yang terbaik bagi masyarakat. Hal ini tentu harus didukung oleh pengelolaan aset yang baik pula. Oleh karena itu diperlukan sumber daya dan fasilitas yang memadai untuk memberikan pelayanan yang baaik terhadap masyarakat.

Sesuai dengan *stewardship theory* bahwa manajer termotivasi dari kepentingan publik bukan berdasarkan kepentingan pribadi. Hal jelas menggambarkan bahwa pemerintah termotivasi berkeja atas dasar pengabdian dan pelayanan terhadap rakyat. Ukuran daerah yang berbentuk total aset

mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintah. Hal ini karena pemerintah daerah sebagai *steward* mampu mengelola aset yang dimilikinya sehingga mampu memberikan pelayanan yang baik untuk mensejahterakan rakyat sehingga mampu meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pelayanan akan lebih maksimal jika didukung oleh aset yang dimiliki. Sehingga, sangat diperlukan sumber daya serta fasilitas yang baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Kiswanto dan Fatmawati, 2019). Hal ini dipertegas dengan penelitian yang menyatakan terdapat pengaruh positif antara ukuran daerah dan kinerja pemerintah daerah (Siddi, 2016); (Artha, Basuki dan MT, 2016); (Kiswanto dan Fatmawati, 2019); (Pauli, 2015); (Andani, Sarwani dan Respati, 2019).

H1 : Ukuran daerah berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.4.2. Pengaruh Opini Audit terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Opini audit bagi *stakeholders* dapat menambah ataupun menurunkan *level of confidence*, dari *reporting* yang telah disajikan oleh pihak yang diaudit, dalam hal ini entitas *government*. Semakin opini audit yang diperoleh WTP, maka semakin baik kinerja pemerintah. Opini audit mencerminkan akuntabilitas atas pengelolaan laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam hal ini lembaga yang berwenang memberikan penilaian atas laporan keuangan pemerintah daerah adalah BPK RI. Berdasarkan *stewardship theory* perolehan opini audit WTP oleh

pemerintah daerah mencerminkan pemerintah bertindak tanggung jawab atas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang berkepentingan terhadap rakyat sebagai *principal*.

Semakin akuntabel laporan keuangan pemerintah daerah maka kinerja pemerintah daerah akan meningkat. Penelitian sebelumnya disebutkan bahwa terdapat hubungan positif antara opini audit dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (Siddi, 2016; Ahyaruddin dan Amrillah, 2018; Andani, Sarwani dan Respati, 2019).

H2 : Opini audit berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.4.3. Pengaruh Temuan Audit terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Temuan audit didefinisikan kasus-kasus pelanggaran penyajian laporan keuangan yang diperoleh BPK dalam melakukan pemeriksaan (Sedyaningsih, 2012). Temuan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah dapat berupa pelanggaran atas ketentuan pengendalian intern maupun ketentuan perundang-undangan lainnya. Temuan audit merupakan salah satu hasil pemeriksaan oleh BPK. Hasil pemeriksaan adalah hasil proses penilaian secara profesional sesuai standar yang disepakati terhadap verifikasi sebuah data atau informasi mengenai pengelolaan keuangan negara yang dituangkan pada laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK.

Stewardship theory memandang pemerintah sebagai *steward* juga harus melaksanakan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi yaitu terciptanya kesejahteraan *principal*. Diperolehnya temuan dapat menghambat tujuan organisasi sehingga dapat menyebabkan kerugian. Ketidapatuhan terhadap hukum menyebabkan kerugian negara atau daerah, potensi kerugian negara atau daerah, kekurangan pendapatan, kelemahan administrasi, kurangnya berhemat, inefisiensi, dan ketidakefektifan. Temuan mengakibatkan penurunan kinerja pemerintah daerah karena salah satu pihak akan merasa dirugikan. Semakin banyak pelanggaran oleh pemda maka semakin buruk kinerja pemda.

Kinerja pemerintah daerah dikatakan buruk dapat tercermin dari banyaknya pelanggaran yang dilakukan pemerintah daerah tersebut (Kiswanto dan Fatmawati, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya sebuah pengawasan, karena pengawasan digunakan untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan tugas pemerintah sehingga tujuan pemerintah mensejahterakan rakyat dapat tercapai. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa temuan audit berpengaruh negatif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (Sedyaningsih, 2012; Sudarsana dan Rahardjo, 2013; Harumiati dan Payamta, 2014; Ara, Herwanti dan Pituringsih, 2016; Kiswanto dan Fatmawati, 2019; Furqan dkk, 2020).

H3 : Temuan audit berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.4.4. Pengaruh Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Pasal 1 ayat 12 UU No. 15 Tahun 2004 menyatakan bahwa rekomendasi didefinisikan sebagai saran atas pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa sebagai dasar perbaikan bagi pengambil keputusan entitas tertentu. Tindak lanjut yang dilaksanakan dengan maksimal akan berdampak pada kualitas laporan keuangan sehingga pemerintah daerah dapat dikatakan melakukan pengelolaan yang baik.

Stewardship theory menyatakan bahwa pemerintah sebagai *steward* akan mempunyai motivasi bertindak atas dasar kepentingan rakyat sebagai *principal*, tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan yang dilaksanakan pemerintah daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah berusaha melaksanakan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahannya. Upaya pemerintah tersebut tentunya akan berdampak pada pelayanan kepada masyarakat sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahannya. Upaya pemerintah tersebut tentunya akan berdampak pada pelayanan kepada masyarakat sehingga tercapainya kedaulatan rakyat. Sehingga semakin banyak rekomendasi yang ditindaklanjuti menandakan bahwa kinerja pemerintah daerah tersebut semakin meningkat. Hal ini dipertegas terdapat penelitian yang menghasilkan tindak lanjut rekomendasi berpengaruh positif terhadap kinerja pemda (Kiswanto dan Fatmawati, 2019; Furqan dkk, 2020).

H4 : Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Wilayah Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penyusunan penelitian yaitu dilakukan mulai dari bulan Oktober tahun 2020 sampai penelitian ini selesai. Wilayah penelitian yang dijadikan objek penelitian yaitu pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia melalui situs resmi dari Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, <http://otda.kemendagri.go.id> dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melalui situs resminya www.bpk.go.id dengan periode pengamatan tahun 2016-2017.

3.2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif dikatakan sebagai metode penelitian yang menggunakan data yakni angka dan analisis menggunakan statistik. Metode penelitian kuantitatif dilakukan dengan tahapan penelitian pada populasi atau sampel, pengumpulan data, menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2017:46).

3.3. Populasi, Sampel, Teknik Pengambilan Sampel

3.3.1. Populasi

Populasi yaitu penarikan kesimpulan dari wilayah generalisasi termasuk objek ataupun subjek yang mempunyai kualitas serta katakteristik yang telah ditetapkan oleh peneliti (Sugiyono, 2017:136). Populasi dari penelitian ini yaitu

pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia periode 2016-2017 sebanyak 514 terdiri dari 416 kabupaten dan 98 kota, sehingga banyaknya populasi observasi penelitian sebanyak 1.028 (<http://otda.kemendagri.go.id/>).

3.3.2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki karakteristik tertentu yang sudah ditetapkan oleh peneliti. Kriteria sampel yang mewakili populasi dapat dilihat pada dua aspek yakni akurasi sampel dan ketelitian (presisi) sampel. Sampel yang akurasi adalah sejauh mana statistik sampel dapat mengestimasi parameter populasi secara tepat. Sampel yang presisi merupakan sejauh mana hasil penelitian berdasarkan sampel dapat merefleksikan realitas populasinya secara teliti (Sugiyono, 2017:137).

3.3.3. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah sampel yang mempunyai karakteristik kelengkapan data. Metode yang digunakan pada penelitian ini berupa metode *Purposive Sampling* yang merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan kriteria tertentu (Sugiyono, 2017:219). Kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel yaitu:

1. Kabupaten/Kota di Indonesia yang mendapat skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) berturut-turut dari Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri tahun 2016-2017.

2. Kabupaten/kota di Indonesia yang mempunyai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tahun 2016-2017 secara berturut-turut.

Berdasarkan kriteria yang ditentukan di atas ada sebanyak 415 pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia yang menjadi sampel dengan dua tahun pengamatan. Sehingga total sampel observasi penelitian ini berjumlah 830.

Tabel 3. 1 Proses Seleksi Sampel Penelitian

No	Kriteria	Jumlah Pemerintah Daerah
1	Pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia	514
2	Kabupaten/kota di Indonesia yang tidak mendapat skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dari Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri tahun 2016-2017 secara berturut-turut.	(48)
3	Kabupaten/kota di Indonesia yang tidak terdapat pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh BPK RI tahun 2016-2017 secara berturut-turut.	(51)
Jumlah sampel berdasarkan kriteria		415
Tahun pengamatan		2
Jumlah Pengamatan		830

Sumber: Data diolah, 2021.

Setelah dilakukan seleksi dengan teknik *purposive sampling* yang sudah ditetapkan pada penelitian ini, kabupaten/kota yang lolos seleksi sampel sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Hasil Seleksi Sampel Penelitian

No	Kabupaten/Kota	No	Kabupaten/Kota
1	Kab. Aceh Barat Daya	28	Kab. Langkat
2	Kab. Aceh Besar	29	Kab. Mandailing Natal
3	Kab. Aceh Jaya	30	Kab. Nias
4	Kab. Aceh Singkil	31	Kab. Nias Barat
5	Kab. Aceh Tamiang	32	Kab. Nias Selatan
6	Kab. Aceh Tengah	33	Kab. Nias Utara
7	Kab. Aceh Tenggara	34	Kab. Padang Lawas
8	Kab. Aceh Timur	35	Kab. Padang Lawas Utara
9	Kab. Aceh Utara	36	Kab. Pakpak Bharat
10	Kab. Bireuen	37	Kab. Samosir
11	Kab. Gayo Lues	38	Kab. Serdang Bedagai
12	Kab. Nagan Raya	39	Kab. Simalungun
13	Kab. Pidie	40	Kab. Tapanuli Selatan
14	Kota Banda Aceh	41	Kab. Tapanuli Tengah
15	Kota Langsa	42	Kab. Tapanuli Utara
16	Kota Lhokseumawe	43	Kab. Toba Samosir
17	Kota Sabang	44	Kota Binjai
18	Kota Subulussalam	45	Kota Gunungsitoli
19	Kab. Asahan	46	Kota Medan
20	Kab. Batu Bara	47	Kota Padangsidimpuan
21	Kab. Dairi	48	Kota pematangsiantar
22	Kab. Deli Serdang	49	Kota Sibolga
23	Kab. Humbang Hasundutan	50	Kota Tanjungbalai
24	Kab. Karo	51	Kota Tebing Tinggi
25	Kab. Labuhanbatu	52	Kab. Agam
26	Kab. Labuhanbatu Selatan	53	Kab. Dharmasraya
27	Kab. Labuhanbatu Utara	54	Kab. Kep Mentawai
55	Kab. Lima Puluh Kota	91	Kab. Musi Banyuasin
56	Kab. Padang Pariaman	92	Kab. Musi Rawas
57	Kab. Pasaman Barat	93	Kab. Ogan Ilir
58	Kab. Pesisir Selatan	94	Kab. Ogan Komering Ilir
59	Kab. Solok	95	Kab. Ogan Komering Ulu
60	Kab. Solok Selatan	96	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan
61	Kota Bukittinggi	97	Kab. Ogan Komering Ulu Timur

62	Kota Padang	98	Kota Lubuklinggau
63	Kota Padang Panjang	99	Kota Pagar Alam
64	Kota Pariaman	100	Kota Palembang
65	Kab. Bengkulu	101	Kota Prabumulih
66	Kab. Indragiri Hilir	102	Kab. Bengkulu Selatan
67	Kab. Indragiri Hulu	103	Kab. Bengkulu Utara
68	Kab. Kampar	104	Kab. Kaur
69	Kab. Kepulauan Meranti	105	Kab. Kepahiang
70	Kab. Kuantan Singingi	106	Kab. Lebong
71	Kab. Rokan Hilir	107	Kab. Mukomuko
72	Kab. Rokan Hulu	108	Kab. Rajang Lebong
73	Kab. Siak	109	Kab. Seluma
74	Kota Dumai	110	Kota Bengkulu
75	Kota Pekanbaru	111	Kab. Lampung Barat
76	Kab. Batang Hari	112	Kab. Lampung Tengah
77	Kab. Bungo	113	Kab. Lampung Timur
78	Kab. Kerinci	114	Kab. Lampung Utara
79	Kab. Merangin	115	Kab. Mesuji
80	Kab. Muaro Jambi	116	Kab. Pesawaran
81	Kab. Sarolangun	117	Kab. Pringsewu
82	Kab. Tanjung Jabung Barat	118	Kab. Tanggamus
83	Kab. Tanjung Jabung Timur	119	Kab. Tulang Bawang
84	Kab. Tebo	120	Kab. Tulang Bawang Barat
85	Kota Jambi	121	Kab. Way Kanan
86	Kota Sungai Penuh	122	Kota Bandar Lampung
87	Kab. Banyuasin	123	Kab. Bangka
88	Kab. Empat Lawang	124	Kab. Bangka Selatan
89	Kab. Lahat	125	Kab. Bangka Tengah
90	Kab. Muara Enim	126	Kab. Belitung
127	Kab. Belitung Timur	163	Kab. Demak
128	Kota Pangkalpinang	164	Kab. Grobogan
129	Kab. Bintan	165	Kab. Jepara
130	Kab. Karimun	166	Kab. Karanganyar
131	Kab. Kepulauan Anambas	167	Kab. Kebumen
132	Kab. Lingga	168	Kab. Kendal
133	Kab. Natuna	169	Kab. Klaten

134	Kota Batam	170	Kab. Kudus
135	Kab. Bandung	171	Kab. Magelang
136	Kab. Bandung Barat	172	Kab. Pati
137	Kab. Bogor	173	Kab. Pemalang
138	Kab. Cianjur	174	Kab. Purbalingga
139	Kab. Cirebon	175	Kab. Purworejo
140	Kab. Garut	176	Kab. Rembang
141	Kab. Indramayu	177	Kab. Semarang
142	Kab. Karawang	178	Kab. Sragen
143	Kab. Kuningan	179	Kab. Sukoharjo
144	Kab. Majalengka	180	Kab. Tegal
145	Kab. Purwakarta	181	Kab. Temanggung
146	Kab. Subang	182	Kab. Wonogiri
147	Kab. Sukabumi	183	Kab. Wonosobo
148	Kab. Sumedang	184	Kota Magelang
149	Kab. Tasikmalaya	185	Kota Pekalongan
150	Kota Bandung	186	Kota Salatiga
151	Kota Banjar	187	Kota Semarang
152	Kota Bekasi	188	Kota Surakarta
153	Kota Cirebon	189	Kota Tegal
154	Kota Depok	190	Kota Yogyakarta
155	Kota Sukabumi	191	Kab. Bangkalan
156	Kab. Banjarnegara	192	Kab. Banyuwangi
157	Kab. Banyumas	193	Kab. Blitar
158	Kab. Batang	194	Kab. Bojonegoro
159	Kab. Blora	195	Kab. Bondowoso
160	Kab. Boyolali	196	Kab. Gresik
161	Kab. Brebes	197	Kab. Jember
162	Kab. Cilacap	198	Kab. Jombang
199	Kab. Kediri	235	Kab. Gianyar
200	Kab. Lamongan	236	Kab. Bima
201	Kab. Lumajang	237	Kab. Dompu
202	Kab. Madiun	238	Kab. Lombok Barat
203	Kab. Magetan	239	Kab. Lombok Tengah
204	Kab. Malang	240	Kab. Lombok Timur
205	Kab. Mojokerto	241	Kab. Lombok Utara

206	Kab. Nganjuk	242	Kab. Sumbawa
207	Kab. Ngawi	243	Kab. Sumbawa Barat
208	Kab. Pacitan	244	Kab. Alor
209	Kab. Pamekasan	245	Kab. Belu
210	Kab. Pasuruan	246	Kab. Ende
211	Kab. Ponorogo	247	Kab. Flores Timur
212	Kab. Probolinggo	248	Kab. Kupang
213	Kab. Sampang	249	Kab. Lembata
214	Kab. Sidoarjo	250	Kab. Manggarai
215	Kab. Situbondo	251	Kab. Manggarai Barat
216	Kab. Sumenep	252	Kab. Manggarai Timur
217	Kab. Trenggalek	253	Kab. Nagekeo
218	Kab. Tuban	254	Kab. Ngada
219	Kota Batu	255	Kab. Rote Ndao
220	Kota Blitar	256	Kab. Sabu Raijua
221	Kota Kediri	257	Kab. Sikka
222	Kota Madiun	258	Kab. Sumba Barat
223	Kota Malang	259	Kab. Sumba Barat Daya
224	Kota Mojokerto	260	Kab. Sumba Tengah
225	Kota Pasuruan	261	Kab. Sumba Timur
226	Kota Probolinggo	262	Kab. Timor Tengah Selatan
227	Kota Surabaya	263	Kab. Timor Tengah Utara
228	Kab. Lebak	264	Kota Kupang
229	Kab. Pandeglang	265	Kab. Bengkayang
230	Kab. Serang	266	Kab. Ketapang
231	Kab. Tangerang	267	Kab. Melawi
232	Kota Cilegon	268	Kab. Mempawah
233	Kota Serang	269	Kab. Sanggau
234	Kota Tangerang Selatan	270	Kab. Sintang
271	Kab. Barito Selatan	306	Kab. Minahasa Tenggara
272	Kab. Barito Timur	307	Kab. Minahasa Utara
273	Kab. Gunung Mas	308	Kota Bitung
274	Kab. Kapuas	309	Kota Manado
275	Kab. Kotawaringin Barat	310	Kota Tomohon
276	Kab. Kotawaringin Timur	311	Kab. Banggai
277	Kab. Seruyan	312	Kab. Banggai Kepulauan

278	Kota Palangka Raya	313	Kab. Buol
279	Kab. Hulu Sungai Tengah	314	Kab. Donggala
280	Kab. Hulu Sungai Utara	315	Kab. Morowali
281	Kab. Kotabaru	316	Kab. Parigi Moutong
282	Kab. Tabalong	317	Kab. Poso
283	Kab. Tanah Bumbu	318	Kab. Sigi
284	Kab. Berau	319	Kab. Tolitoli
285	Kab. Kutai Barat	320	Kota Palu
286	Kab. Kutai Kertanegara	321	Kab. Bantaeng
287	Kab. Kutai Timur	322	Kab. Barru
288	Kab. Paser	323	Kab. Bulukumba
289	Kab. Panajam Paser Utara	324	Kab. Enrekang
290	Kota Balikpapan	325	Kab. Gowa
291	Kota Bontang	326	Kab. Jeneponto
292	Kota Samarinda	327	Kab. Kep. Selayar
293	Kab. Bulungan	328	Kab. Luwu
294	Kab. Malinau	329	Kab. Luwu Timur
295	Kab. Nunukan	330	Kab. Luwu Utara
296	Kab. Tana Tidung	331	Kab. Maros
297	Kab. Bolaang Mongondow	332	Kab. Pangkajene dan Kepulauan
298	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	333	Kab. Pinrang
299	Kab. Bolaang Mongondow Timur	334	Kab. Sidenreng Rappang
300	Kab. Bolaang Mongondow Utara	335	Kab. Takalar
301	Kab. Kepulauan Sangihe	336	Kab. Tana Toraja
302	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	337	Kab. Toraja Utara
303	Kab. Kepulauan Talaud	338	Kab. Wajo
304	Kab. Minahasa	339	Kota Makassar
305	Kab. Minahasa Selatan	340	Kota Palopo
341	Kota Parepare	377	Kota Ternate
342	Kab. Bombana	378	Kab. Asmat
343	Kab. Buton	379	Kab. Biak Numfor
344	Kab. Kolaka	380	Kab. Boven Digoel
345	Kab. Kolaka Utara	381	Kab. Deiyai
346	Kab. Konawe Selatan	382	Kab. Dogiyai
347	Kab. Konawe Utara	383	Kab. Intan Jaya

348	Kab. Muna	384	Kab. Jayapura
349	Kab. Wakatobi	385	Kab. Jayawijaya
350	Kota Baubau	386	Kab. Keerom
351	Kab. Boalemo	387	Kab. Kepulauan Yapen
352	Kab. Bone Bolango	388	Kab. Lanny Jaya
353	Kab. Gorontalo	389	Kab. Mamberamo Raya
354	Kab. Gorontalo Utara	390	Kab. Mamberamo Tengah
355	Kab. Pohuwato	391	Kab. Mappi
356	Kota Gorontalo	392	Kab. Merauke
357	Kab. Majene	393	Kab. Mimika
358	Kab. Mamasa	394	Kab. Nabire
359	Kab. Pasangkayu (Mamuju Utara)	395	Kab. Nduga
360	Kab. Buru	396	Kab. Paniai
361	Kab. Buru Selatan	397	Kab. Pegunungan Bintang
362	Kab. Kepulauan Aru	398	Kab. Puncak Jaya
363	Kab. Kepulauan Tanimbar (Maluku Tenggara Barat)	399	Kab. Sarmi
364	Kab. Maluku Barat Daya	400	Kab. Supiori
365	Kab. Maluku Tengah	401	Kab. Tolikara
366	Kab. Maluku Tenggara	402	Kab. Waropen
367	Kab. Seram Bagian Barat	403	Kab. Yahukimo
368	Kab. Seram Bagian Timur	404	Kab. Yalimo
369	Kota Ambon	405	Kota Jayapura
370	Kota Tual	406	Kab. Fakfak
371	Kab. Halmahera Selatan	407	Kab. Manokwari
372	Kab. Halmahera Tengah	408	Kab. Maybrat
373	Kab. Halmahera Timur	409	Kab. Raja Ampat
374	Kab. Halmahera Utara	410	Kab. Sorong
375	Kab. Kepulauan Sula	411	Kab. Sorong Selatan
376	Kab. Pulau Morotai	412	Kab. Tambrau
413	Kab. Teluk Bintuni	415	Kota Sorong
414	Kab. Teluk Wondama		

Sumber: Data diolah, 2021.

3.4. Data dan Sumber Data

Jenis sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang sudah dikumpulkan oleh lembaga resmi untuk dipublikasikan sehingga dapat digunakan pengguna data (Kuncoro, 2013). Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kabupaten/kota di Indonesia tahun 2016-2017 yang diperoleh dari website resmi Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, <http://otda.kemendagri.go.id>.

Data sekunder lain yang digunakan pada penelitian ini adalah data Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2016-2017 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 (IHPS 1) tahun 2016-2017 kabupaten/kota di Indonesia serta data Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) tahun 2016-2017 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melalui website resminya www.bpk.go.id.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi digunakan peneliti untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber resmi (Sugiyono, 2017:229). Data yang dikumpulkan oleh peneliti adalah skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) oleh Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, <http://otda.kemendagri.go.id> serta data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah (LKPD), Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 (IHPS) dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) yang disusun Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melalui situs resminya www.bpk.go.id dengan periode pengamatan tahun 2016-2017.

3.6. Variabel Penelitian

3.6.1. Variabel Terikat (Variabel Dependen)

Variabel dependen (terikat) didefinisikan sebagai variabel yang menjadi pokok pembahasan penelitian. Variabel ini juga diartikan sebagai variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2017:66). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (Y).

3.6.2. Variabel Bebas (Variabel Independen)

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat, baik secara positif atau negatif (Sugiyono, 2017:66). Variabel independen pada penelitian ini adalah ukuran daerah (X1), opini audit (X2), temuan audit (X3), dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (X4).

3.7. Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh ukuran daerah, opini audit, temuan audit dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia tahun 2016-2017. Operasional variabel dalam penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian terdahulu dengan definisi dari masing-masing variabel yaitu:

Tabel 3. 3 Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator
1.	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Y)	Kinerja Penyelenggaraan pemda adalah tingkat pencapaian penyelenggaraan pemerintah daerah diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak. (PP RI No.6 tahun 2008). Skor kinerja pemda merupakan hasil penilaian dari Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Kabupaten/Kota (Kiswanto dan Fatmawati, 2019)
2.	Ukuran Daerah (X1)	Ukuran daerah ditandai dengan besar kecilnya aset yang dimiliki pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat (Anggraini, Rahayu dan Junaidi, 2019)	<i>Ukuran Daerah</i> $= Ln (Total Aset)$ (Anggraini, Rahayu dan Junaidi, 2019)
3.	Opini Audit (X2)	Menurut Pasal 1 Ayat 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan pada laporan keuangan oleh pemeriksa. Data opini audit yang digunakan	Diukur dengan: a. WTP = 5 b. WTP-DPP = 4 c. WDP = 3 d. TW = 2 e. TMP = 1 (Andani, Sarwani dan Respati, 2019)

Tabel berlanjut....

Lanjutan tabel 3.3

		adalah opini audit atas LKPD tahun sebelumnya, hal ini karena laporan keuangan audit setiap periode kemudian diterbitkan pada tahun berikutnya (Siddi, 2016).	
4.	Temuan Audit (X3)	Temuan audit merupakan kasus-kasus yang ditemukan terhadap laporan keuangan pemda atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan pengendalian intern maupun terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (Harumiati dan Payamta, 2014)	$= \frac{\text{temuan audit}}{\text{Total belanja anggaran}}$ (Harumiati dan Payamta, 2014)
5.	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (X4)	Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditunjukkan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan (Kiswanto dan Fatmawati, 2019)	$= \frac{\text{tindak lanjut sesuai rekomendasi}}{\text{Total rekomendasi}}$ (Kiswanto dan Fatmawati, 2019)

Sumber: Data diolah, 2021.

3.8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan regresi data panel. Penelitian ini dilakukan dengan metode statistik dengan alat analisis program

Eviews 10. Data yang telah diperoleh, selanjutnya dianalisis berdasarkan prosedur analisis yang telah ditetapkan peneliti. beberapa tahapan dalam melakukan analisis terdiri sebagai berikut :

3.8.1. Estimasi Model Regresi Data Panel

Menurut Ghozali, Imam dan Ratmono, (2017:214) untuk mengestimasi model regresi data panel terdapat beberapa pendekatan antara lain:

1. *Common Effect Model*

Common Effect merupakan pendekatan paling sederhana yang sering disebut sebagai estimasi CEM atau *pooled least square*. Model ini tidak memperhatikan dimensi individu ataupun waktu sehingga diasumsikan bahwa perilaku antar individu sama dalam berbagai kurun waktu. Model ini hanya mengkombinasikan data *time series* dan *cross section* dalam bentuk *pool* (kelompok).

2. *Fixed Effect Model* atau *Least Square Dummy Variabel (LSDV) Regression Model*

Model *Fixed effects* mengasumsikan bahwa terdapat efek yang berbeda antar individu. Perbedaan itu dapat diakomodasi melalui perbedaan pada intersepnya. Oleh karena itu, dalam model *fixed effects*, setiap individu merupakan parameter yang tidak diketahui dan akan diestimasi dengan menggunakan teknik variabel *dummy*. Salah satu cara memperhatikan unit *cross-section* pada model regresi panel adalah dengan mengijinkan nilai intersep

berbeda-beda untuk setiap unit cross-section tetapi masih mengasumsikan slope koefisien tetap. Terdapat 4 kemungkinan intersep yaitu

- a. Koefisien Slope Konstan tetapi Intersep Bervariasi Antarindividu,
- b. Pengaruh Waktu (*Time Effect*): Slope Konstan, Intersep Bervariasi Antarwaktu
- c. Koefisien Slope Konstan, Intersep Bervariasi Antarindividu dan Antarperiode
- d. Semua Koefisien Bervariasi untuk Setiap Individu Perusahaan

3. *Random Effect Model* (REM) atau *Error Components Model* (ECM)

Komponen *error* yang bersifat acak dan tidak berkorelasi dengan variabel penjelas yang teramati, model seperti ini dinamakan *random effects model* (REM).

3.8.2. Pemilihan Model Regresi Data Panel

Dari ketiga model yang telah diestimasi akan dipilih model mana yang paling tepat/sesuai dengan tujuan penelitian. Ada tahapan pengujian yang dilakukan antara lain: (Ghozali, Imam dan Ratmono, 2017:245)

1. Uji *Chow*

Uji *Chow* bertujuan untuk memilih model yang terbaik antara model *Common Effect* atau *Fixed Effect* yang akan digunakan untuk melakukan regresi data panel. Langkah-langkah yang dilakukan dalam Uji *Chow* adalah sebagai dengan hipotesis sebagai berikut:

H0: *Common Effect* (CEM)

H1: *Fixed Effect Model*(FEM)

- a. Estimasi dengan *Fixed Effect*.
- b. Uji dengan menggunakan *Chow-test*.
- c. Melihat nilai *probability F* dan *Chi-square* dengan asumsi :
 - 1) Bila nilai *probability F* dan *Chi-square* $> \alpha = 5\%$, maka H0 diterima artinya uji regresi data panel menggunakan model *Common Effect*.
 - 2) Bila nilai *probability F* dan *Chi-square* $< \alpha = 5\%$, maka H1 diterima artinya uji regresi data panel menggunakan model *Fixed Effect*.

Berdasarkan Uji *Chow* model yang terpilih adalah *Common Effect*, maka langsung dilakukan uji regresi data panel. Tetapi bila yang terpilih adalah model *Fixed Effect*, maka dilakukan Uji *Hausman* untuk menentukan antara model *Fixed Effect* atau *Random Effect* yang akan dilakukan untuk melakukan uji regresi data panel.

2. Uji *Hausman*

Uji *Hausman* dilakukan untuk memilih model yang terbaik antara *Fixed Effect* dan *Random Effect* yang akan digunakan untuk melakukan regresi data panel. Langkah-langkah yang dilakukan dalam uji *Hausman* adalah dengan hipotesis sebagai berikut :

H0: *Random Effect Model*

H1: *Fixed Effect Model*

- a. Estimasi dengan *Random Effect*.
- b. Uji dengan menggunakan *Hausman-test*.
- c. Melihat nilai *probability F* dan *Chi-square* dengan asumsi :
 - 1) Bila nilai *probability F* dan *Chi-square* $> \alpha = 5\%$, maka H0 diterima artinya uji regresi data panel menggunakan model *Random Effect*.
 - 2) Bila nilai *probability F* dan *Chi-square* $< \alpha = 5\%$, maka H1 diterima artinya uji regresi data panel menggunakan model *Fixed Effect*.

Uji *Hausman* dilihat menggunakan nilai probabilitas dari *cross section random effect model*. Jika nilai probabilitas dalam uji Hausman lebih kecil dari 5% maka H0 ditolak yang berarti bahwa model yang cocok digunakan dalam persamaan analisis regresi tersebut adalah *model fixed effect*. Dan sebaliknya jika nilai probabilitas dalam uji Hausman lebih besar dari 5% maka H0 diterima.

3.8.3. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan sebuah gambaran atau deskriptif suatu data yang dapat dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), *standar deviasi*, *varian*, *maksimum*, *minimum*, *sum*, *range*, *kurtosis*, dan *skewness* (kemencengan distribusi) (Ghozali, Imam dan Ratmono, 2017:40).

3.8.4. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah di dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual terdistribusi dengan normal. Untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak. Untuk menguji normalitas suatu model, hipotesisnya sebagai berikut:

Ho: Data berdistribusi normal

Ha: Data tidak berdistribusi normal

Apabila nilai probabilitas *Jarque-Bera* < nilai signifikan (0,05) maka Ho ditolak dan Ha diterima yang artinya data tidak memiliki distribusi normal. Sedangkan, apabila nilai probabilitas *Jarque-Bera* > nilai signifikan (0,05) maka Ho diterima dan Ha ditolak yang artinya data memiliki distribusi normal (Ghozali, Imam dan Ratmono, 2017:145).

2. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Uji autokorelasi dengan hipotesis sebagai berikut:

H₀ : tidak ada autokorelasi

Ha : ada autokorelasi

Untuk mengetahui adanya korelasi atau tidak, dapat diketahui melalui uji *Durbin-Watson (DW) test*). Adapun aturan pengambilan keputusan ada atau tidaknya masalah autokorelasi (Ghozali, Imam dan Ratmono, 2017:121).

Tabel 3. 4 Tabel Keputusan *Durbin-Watson*

Tabel Keputusan	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dL$
Tidak ada autokorelasi positif	Tidak ada keputusan	$dL \leq d \leq dU$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tolak	$4-dL < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tidak ada keputusan	$4-dU \leq d \leq 4-dL$
Tidak ada autokorelasi positif, atau negatif	Tidak tolak	$dU \leq d \leq 4-dU$

Sumber: Data diolah, 2021.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Cara mendeteksi heteroskedastisitas yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan *uji gletser*. Hipotesis *uji gletser* adalah:

H_0 : tidak ada heteroskedastisitas

H_a : ada heteroskedastisitas

Apabila nilai probabilitas $>$ nilai signifikansi (0.05) maka H_0 diterima atau dapat disimpulkan tidak ada heteroskedastisitas. Sedangkan jika nilai probabilitas $<$ nilai signifikansi (0.05) maka H_0 ditolak atau dapat disimpulkan bahwa ada heteroskedastisitas dalam model (Ghozali, Imam dan Ratmono, 2017:85).

4. Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Cara yang digunakan untuk melihat ada tidaknya multikolonieritas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan matrik korelasi. Untuk menguji multikolonieritas suatu model menggunakan hipotesis berikut:

H₀ : tidak terjadi multikolonieritas

H_a : terjadi multikolonieritas

Jika nilai korelasi berada di atas 0,80 maka H₀ ditolak artinya terjadi multikolonieritas dalam model. Sedangkan jika koefisien di bawah 0,80 maka H₀ diterima artinya model tidak terjadi multikolonieritas (Ghozali, Imam dan Ratmono, 2017:71).

3.8.5. Analisis Regresi Data Panel

Penelitian ini menggunakan metode analisis data berupa analisis regresi data panel. Regresi data panel digunakan karena penelitian ini menggunakan data *time series* dan *cross section* sehingga dapat mengetahui pengaruh kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih representatif (Ghozali, Imam dan Ratmono, 2017:185). Model regresi data panel yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{Ln_TA} + \beta_2 \text{opini} + \beta_3 \text{temuan} + \beta_4 \text{TLRHP} + \epsilon$$

Keterangan:

Y = Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

α = Koefisien Konstanta

β = Koefisien Regresi Variabel Independen

Ln_TA = Ukuran daerah

Opini = Opini audit

Temuan = temuan audit

TLRHP = Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan

ϵ = error

3.8.6. Uji Ketepatan Model

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinan (R^2) digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti, kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen sangat terbatas. Pengujian uji koefisien determinasi dapat dilihat pada nilai *adjusted* R^2 yang dimaksudkan untuk menghindari bias akibat adanya penambahan jumlah variabel maupun sampel penelitian (Ghozali, Imam dan Ratmono, 2017:60).

2. Uji F

Uji F berguna untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen yang terpilih pada model penelitian dapat berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Tolak ukur uji F penelitian ini menggunakan tingkat

signifikan sebesar 5%. Jika probabilitas ($\text{sig } t > \alpha (0,05)$) maka H_0 diterima, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen, sedangkan probabilitas ($\text{sig } t < \alpha (0,05)$) maka H_0 ditolak, artinya ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, Imam dan Ratmono, 2017:60).

3.8.7. Uji Hipotesis (uji t)

Uji statistik t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, Imam dan Ratmono, 2017:67). Pada uji statistik dengan cara sebagai berikut:

1. Bila $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ atau probabilitas $<$ tingkat signifikan ($\text{sig} < 0,05$), maka H_a diterima dan H_0 ditolak, variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Bila $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ atau probabilitas $>$ tingkat signifikan ($\text{sig} > 0,05$), maka H_a ditolak dan H_0 diterima, variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Data yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri berupa Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) tahun 2016-2017 atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang digunakan untuk mengukur variabel kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Data lain yang digunakan pada penelitian ini adalah dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2016-2017 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan mengajukan permintaan informasi melalui website pusat informasi BPK RI untuk menghitung variabel ukuran daerah dan variabel temuan audit. Data Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I (IHPS I) dari BPK RI yang diperoleh dari website juga digunakan pada penelitian ini untuk mengukur variabel opini audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Serta data berupa Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) tahun 2016-2017 untuk mengukur variabel temuan audit dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.

Populasi dari penelitian ini yaitu pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia periode 2016-2017 sebanyak 514 terdiri dari 416 kabupaten dan 98 kota (<http://otda.kemendagri.go.id/>). Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel dengan

pertimbangan kriteria tertentu yang sudah ditetapkan oleh peneliti. Berdasarkan teknik pengambilan sampel yang diterapkan diperoleh sampel penelitian sebanyak 415 kabupaten/kota. Sementara 50 kabupaten/kota dikeluarkan (*outlier*) dari sampel karena data terlalu ekstrim (Ghozali, 2007:36), sehingga sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 365 kabupaten/kota tahun 2016-2017.

4.2. Pengujian dan Hasil Analisis Data

4.2.1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif berguna untuk memberikan gambaran mengenai keseluruhan data yang digunakan dalam penelitian ini. Deskripsi data ini meliputi nilai minimum, nilai maximum, *mean* dan standar deviasi. Nilai minimum menggambarkan nilai terkecil dari data sampel. Nilai maksimum menggambarkan nilai terbesar dari data sampel. *Mean* merupakan nilai rata-rata yang menggambarkan jumlah data dibandingkan dengan banyaknya data dari masing-masing variabel. Standar deviasi merupakan hasil pengukuran yang menjelaskan distribusi atau variabilitas yang terdapat pada data yang dianalisis.

Gambaran data variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai variabel dependen serta ukuran daerah, opini audit, temuan audit dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sebagai variabel independen.

Tabel 4. 1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	KINERJA	LN_TA	OPINI	TEMUAN	TLRHP
Mean	2.863426	28.50080	4.310843	0.011357	0.672406
Median	2.924350	28.40695	5.000000	0.001983	0.747800
Maximum	3.592600	31.34890	5.000000	0.889042	1.000000
Minimum	1.086400	27.23020	1.000000	2.00E-06	0.000200
Std. Dev.	0.403156	0.607116	1.123175	0.050077	0.315324
Skewness	-1.519652	1.434317	-1.388666	11.27915	-0.589003
Kurtosis	6.154574	6.411799	3.948404	163.4590	2.020858
Jarque-Bera Probability	663.6092 0.000000	687.1510 0.000000	297.8677 0.000000	908018.9 0.000000	81.14694 0.000000
Sum	2376.644	23655.67	3578.000	9.426127	558.0970
Sum Sq. Dev.	134.7411	305.5608	1045.802	2.078902	82.42674
Observations	830	830	830	830	830

Sumber: Output Eviews 10, 2021.

Berdasarkan tabel 4.1 diatas, berikut analisis hasil deskriptif dari masing-masing variabel pada penelitian ini:

1. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah memiliki rentang nilai 1,0864 hingga 3,5926. Nilai maksimum sebesar 3,5926 dimiliki oleh Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2016. Sedangkan, nilai minimum sebesar 1,0864 dimiliki oleh Kabupaten Paniai tahun 2016. Nilai *mean* (rata-rata) menunjukkan sebesar 2,864631 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,404458.

2. Ukuran Daerah

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel ukuran daerah memiliki rentang nilai 27,2302 hingga 31,3489. Nilai maksimum sebesar 31,3489 dimiliki oleh Kota Surabaya tahun 2017. Sedangkan, nilai minimum sebesar 27,2302 dimiliki oleh Kabupaten Buru tahun 2016. Nilai *mean* (rata-rata) menunjukkan sebesar 28,50080 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,607116.

3. Opini Audit

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel opini audit memiliki rentang nilai 1 hingga 5. Nilai maksimum sebesar 5. Sedangkan, nilai minimum sebesar 1. Nilai *mean* (rata-rata) menunjukkan sebesar 4,310843 hal ini berarti perolehan opini audit kabupaten/kota di Indonesia sudah baik dengan nilai standar deviasi sebesar 1,123175.

4. Temuan Audit

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel temuan audit memiliki rentang nilai 0,000002 hingga 0,889042. Nilai maksimum sebesar 0,889042 dimiliki oleh Kabupaten Tolikara tahun 2016 sedangkan, nilai minimum sebesar 0,000002 dimiliki oleh Kabupaten Bantaeng tahun 2016. Nilai *mean* (rata-rata) menunjukkan sebesar 0,011357 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,050077.

5. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel tindak lanjut rekomendasi memiliki rentang nilai 0,0002 hingga 1,000. Nilai

mean (rata-rata) menunjukkan sebesar 0,672406 hal ini berarti rata-rata jumlah tindak lanjut rekomedansi yang dilakukan Pemerintah Indonesia sebanyak 67,2%. Nilai standar deviasi sebesar 0,315324.

4.2.1. Estimasi Model Regresi Data Panel

1. *Common Effect Model*

Pengujian pertama yang dilakukan dengan menggunakan uji *common effect*, berikut hasil yang diperoleh dari *common effect*:

Tabel 4. 2 Hasil Regresi Data Panel *Common Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.495512	0.510572	-0.970504	0.3321
LN_TA	0.107222	0.018103	5.922745	0.0000
OPINI	0.075060	0.008464	8.867840	0.0000
TEMUAN	-8.435361	5.094859	-1.655661	0.0982
TLRHP	0.113301	0.027136	4.175288	0.0000
R-squared	0.227931	Mean dependent var	2.942929	
Adjusted R-squared	0.223671	S.D. dependent var	0.249515	
S.E. of regression	0.219846	Akaike info criterion	-0.184952	
Sum squared resid	35.04094	Schwarz criterion	-0.153493	
Log likelihood	72.50743	Hannan-Quinn criter.	-0.172815	
F-statistic	53.50873	Durbin-Watson stat	1.819122	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Output Eviews 10, 2021.

2. *Fixed Effect Model*

Setelah diuji menggunakan *common effect Model* maka selanjutnya diuji menggunakan *fixed effect Model*. Uji *fixed effect* menghasilkan:

Tabel 4. 3 Hasil Regresi Data Panel *Fixed Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.014653	0.692996	1.464154	0.1440
LN_TA	0.059553	0.024286	2.452149	0.0147
OPINI	0.052619	0.009855	5.339504	0.0000
TEMUAN	-5.225611	5.542517	-0.942823	0.3464
TLRHP	0.021087	0.029237	0.721260	0.4712
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.796173	Mean dependent var	2.942929	
Adjusted R-squared	0.588393	S.D. dependent var	0.249515	
S.E. of regression	0.160080	Akaike info criterion	-0.519493	
Sum squared resid	9.250855	Schwarz criterion	1.802197	
Log likelihood	558.6148	Hannan-Quinn criter.	0.376232	
F-statistic	3.831812	Durbin-Watson stat	1.989071	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Output Eviews 10, 2021.

3. *Random Effect Model*

Setelah diuji menggunakan *fixed effect model* maka selanjutnya diuji menggunakan *Random effect model*. Hasil yang diperoleh menggunakan *random effect* sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Hasil Regresi Data Panel *Random Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.165577	0.495687	-0.334035	0.7385
LN_TA	0.097702	0.017498	5.583696	0.0000
OPINI	0.067194	0.007825	8.587050	0.0000
TEMUAN	-7.974306	4.580836	-1.740797	0.0821
TLRHP	0.075888	0.024281	3.125432	0.0018
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.147528	0.4593
Idiosyncratic random			0.160080	0.5407
Weighted Statistics				
R-squared	0.182282	Mean dependent var	1.791461	
Adjusted R-squared	0.177771	S.D. dependent var	0.178744	
S.E. of regression	0.162079	Sum squared resid	19.04557	
F-statistic	40.40355	Durbin-Watson stat	1.990007	
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.223146	Mean dependent var	2.942929	
Sum squared resid	35.25809	Durbin-Watson stat	1.074954	

Sumber: Output Eviews 10, 2021.

4.2.2. Pemilihan Model Regresi Data Panel

1. Uji *Chow*

Uji *chow* dilakukan untuk melihat model manakah yang lebih tepat digunakan antara uji *common effect* dan uji *fixed effect*. Uji ini dengan cara membandingkan nilai *probability F* dengan signifikan. Apabila nilai *probability F* < 0.05 maka model FEM yang lebih baik dibandingkan dengan CEM. Sedangkan apabila nilai *probability F* > 0.05 maka model CEM yang lebih

baik dibandingkan dengan FEM (Ghozali, Imam dan Ratmono, 2017). Hasil data uji *chow* sebagai berikut:

Tabel 4. 5 Hasil Uji *Chow*

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.764882	(364,361)	0.0000
Cross-section Chi-square	972.214742	364	0.0000

Sumber: Output Eviews 10, 2021.

Nilai statistik dari probabilitas F berdasarkan hasil olah data ialah sebesar 0,0000 (kurang dari 5%), yang berarti bahwa model yang tepat digunakan adalah model *fixed effect*.

2. Uji *Hausman*

Uji *Hausman* adalah uji untuk mengetahui apakah model *random effect* atau *fixed effect* yang paling tepat digunakan. Uji ini dengan cara membandingkan nilai probability *chi-square* dengan signifikan. Apabila nilai probability *chi-square* < 0.05 maka model FEM yang lebih baik dibandingkan dengan REM. Sedangkan apabila nilai probability *chi-square* > 0.05 maka model REM yang lebih baik dibandingkan dengan FEM (Ghozali, Imam dan Ratmono, 2017). Berikut adalah hasil olah data uji *hausman* yaitu:

Tabel 4. 6 Hasil Uji *Hausman*

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	22.223345	4	0.0002

Sumber: Output Eviews 10, 2021.

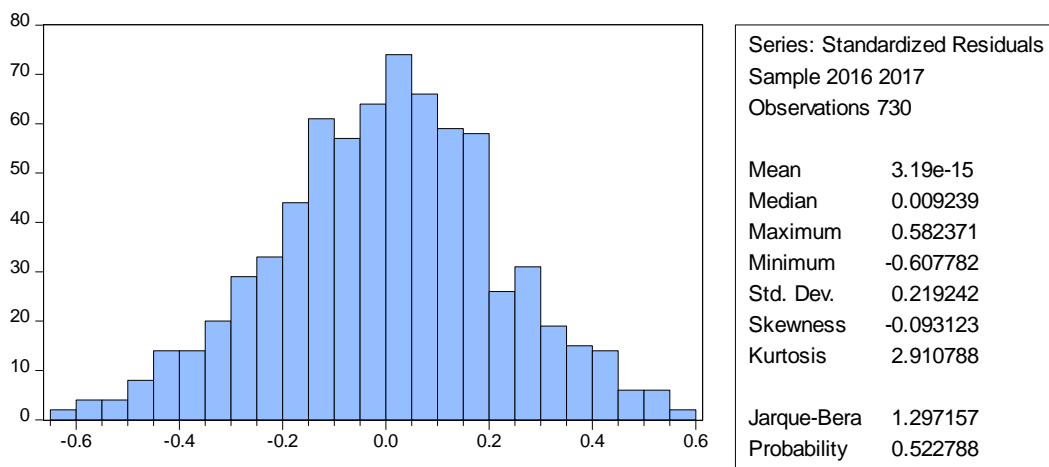
Nilai statistik dari probabilitas *chi square* berdasarkan hasil olah data ialah sebesar 0,0002 (kurang dari 5%), yang berarti bahwa model yang tepat digunakan adalah model *fixed effect*.

4.2.3. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah regresi, variabel dependen dan variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah berdistribusi data normal atau mendekati normal. Normalitas dapat dilihat dari nilai probabilitas *Jarque-Bera* (J-B). Data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila nilai probabilitas *Jarque-Bera* $> 0,05$ (Ghozali, Imam dan Ratmono, 2017:145). Berikut adalah hasil uji normalitas menggunakan Eviews 10:

Tabel 4. 7 Hasil Uji Normalitas



Sumber: Output Eviews 10, 2021.

Berdasarkan hasil uji normalitas di atas diketahui bahwa probabilitas *Jarque- Bera* 0,522788 taraf signifikansi yang telah ditetapkan ($0,522788 > 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal.

2. Uji Autokorekasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Guna menguji ada tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan Uji *Durbin Watson* (Ghozali, Imam dan Ratmono, 2017:121). Berikut hasil uji autokorelasi menggunakan olah data Eviews 10:

Tabel 4. 8 Hasil Uji Autokorelasi

R-squared	0.796173	Mean dependent var	2.942929
Adjusted R-squared	0.588393	S.D. dependent var	0.249515
S.E. of regression	0.160080	Akaike info criterion	-0.519493
Sum squared resid	9.250855	Schwarz criterion	1.802197
Log likelihood	558.6148	Hannan-Quinn criter.	0.376232
F-statistic	3.831812	Durbin-Watson stat	1.989071
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Output Eviews 10, 2021.

Berdasarkan hasil uji autokorelasi diketahui bahwa bahwa nilai *Durbin-Watson Stat* (DW) sebesar 1.989071. Diketahui $dL = 1.86722$ $dU = 1.88443$ k (variabel bebas) = 4 dengan $N = 730$, $4-dL = 2.13278$, $4-dU = 2.11557$. Maka dapat diketahui bahwa hasil yang didapatkan $1.88443 \leq 1.989071 \leq 2.11557$, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa dalam model penelitian tidak terdapat masalah autokorelasi.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Cara mendeteksi heteroskedastisitas yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan *uji gletser*. Data dikatakan bebas dari masalah heteroskedastisitas apabila probabilitas $> 0,05$ (Ghozali, Imam dan Ratmono, 2017:85). Berikut hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji *geltser* yaitu:

Tabel 4. 9 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.414257	0.309397	-1.338916	0.1810
LN_TA	0.019384	0.010970	1.766901	0.0777
OPINI	0.005835	0.005129	1.137572	0.2557
TEMUAN	-1.472678	3.087392	-0.476997	0.6335
TLRHP	0.020939	0.016444	1.273350	0.2033

Sumber: Output Eviews 10, 2021.

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dapat diketahui bahwa semua variabel ukuran daerah (LN_TA), opini audit (OPINI), temuan audit (TEMUAN) dan tindak lanjut rekomendasi (TLRHP) mempunyai nilai probabilitas LN_TA (0.0777), OPINI (0.2557), TEMUAN (0.6335), TLRHP (0.2033) > nilai signifikansi 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terjadi ada heteroskedastisitas.

4. Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Cara yang digunakan untuk melihat ada tidaknya multikolonieritas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan matrik korelasi. Data dikatakan tidak terjadi multikolonieritas jika koefisien korelasi kurang dari 0,80 (Ghozali, Imam dan Ratmono, 2017:71). Berikut hasil uji multikolonieritas dengan matriks korelasi ialah:

Tabel 4. 10 Hasil Uji Multikolonieritas

	LN_TA	OPINI	TEMUAN	TLRHP
LN_TA	1.000000	0.242403	-0.228612	0.118547
OPINI	0.242403	1.000000	-0.177096	0.215439
TEMUAN	-0.228612	-0.177096	1.000000	-0.193022
TLRHP	0.118547	0.215439	-0.193022	1.000000

Sumber: Output Eviews 10, 2021.

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa semua variabel ukuran daerah (LN_TA), opini audit (OPINI), temuan audit (TEMUAN) dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) mempunyai nilai matrik korelasi di bawah 0,80 artinya model tidak terjadi multikolonieritas.

4.2.4. Analisis Regresi Data Panel

Regresi Data panel merupakan kombinasi dari data *time series* dan *cross section*. Berdasarkan analisis regresi panel dengan eviews 10 diperoleh hasil uji model *fixed effect* sebagai berikut:

Tabel 4. 11 Hasil Uji *Fixed Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.014653	0.692996	1.464154	0.1440
LN_TA	0.059553	0.024286	2.452149	0.0147
OPINI	0.052619	0.009855	5.339504	0.0000
TEMUAN	-5.225611	5.542517	-0.942823	0.3464
TLRHP	0.021087	0.029237	0.721260	0.4712
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.796173	Mean dependent var	2.942929	
Adjusted R-squared	0.588393	S.D. dependent var	0.249515	
S.E. of regression	0.160080	Akaike info criterion	-0.519493	

Sum squared resid	9.250855	Schwarz criterion	1.802197
Log likelihood	558.6148	Hannan-Quinn criter.	0.376232
F-statistic	3.831812	Durbin-Watson stat	1.989071
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Output Eviews 10, 2021.

Berdasarkan tabel 4.11 diperoleh persamaan regresi data panel sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{Ln_TA} + \beta_2 \text{opini} + \beta_3 \text{temuan} + \beta_4 \text{TLRHP} + \epsilon$$

$$Y = 1,014653 + 0,059553 \text{ Ln_TA} + 0,052619 \text{ opini} - 5,225611 \text{ temuan} + 0,021087 \text{ TLRHP} + 0,011476$$

Berdasarkan persamaan regresi data panel diatas maka interpretasinya adalah sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 1,014653 menunjukkan bahwa jika tidak ada variabel independen yaitu ukuran daerah, opini audit, temun audit dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan maka kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah bernilai 1,014653.
2. Koefisien regresi variabel ukuran daerah sebesar 0,059553 menunjukkan bahwa jika variabel independen lain nilanya tetap dan variabel ukuran daerah mengalami kenaikan 1 satuan maka kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah akan mengalami kenaikan sebesar 0,059553. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara ukuran daerah terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga semakin tinggi ukuran daerah maka semakin baik kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

3. Koefisien regresi variabel opini audit sebesar 0,052619 menunjukkan bahwa jika variabel independen lain nilainya tetap dan variabel opini audit mengalami kenaikan 1 satuan maka kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah akan mengalami kenaikan sebesar 0,052619. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara opini audit terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga semakin tinggi opini audit yang diperoleh maka semakin baik kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
4. Koefisien regresi variabel temuan daerah sebesar -5,225611 menunjukkan bahwa jika variabel independen lain nilainya tetap dan variabel temuan audit mengalami kenaikan 1 satuan maka kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah akan mengalami penurunan sebesar 5,225611. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara temuan audit terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga semakin banyak temuan audit maka semakin buruk kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
5. Koefisien regresi variabel tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sebesar 0,021087 menunjukkan bahwa jika variabel independen lain nilainya tetap dan variabel tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan mengalami kenaikan 1 satuan maka kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah akan mengalami kenaikan sebesar 0,021087. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah,

sehingga semakin banyak tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan maka semakin baik kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

4.2.5. Uji Ketepatan Model

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi mengukur sejauh mana kemampuan model menerangkan variabel-variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara simultan. Pengujian koefisien determinasi dapat dilihat pada nilai *adjusted R square*. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai satu. Apabila nilai koefisien determinasi semakin mendekati angka satu, maka semakin baik kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Sementara jika dijumpai nilai koefisien determinasi bernilai minus (-) maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, Imam dan Ratmono, 2017:60). Berikut hasil ol data nilai koefisien determinasi ialah:

Tabel 4. 12 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R-squared	0.796173	Mean dependent var	2.942929
Adjusted R-squared	0.588393	S.D. dependent var	0.249515
S.E. of regression	0.160080	Akaike info criterion	-0.519493
Sum squared resid	9.250855	Schwarz criterion	1.802197
Log likelihood	558.6148	Hannan-Quinn criter.	0.376232
F-statistic	3.831812	Durbin-Watson stat	1.989071
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Output Eviews 10, 2021.

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi diatas menunjukkan nilai *adjusted R square* sebesar 0.588393 atau 58,8% yang berarti bahwa variabel ukuran

daerah, opini audit, temuan audit dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan berpengaruh secara simultan sebesar 58,8% terhadap variabel kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Sedangkan sebesar 41,2% dipengaruhi oleh variabel di luar model regresi data panel yang digunakan pada penelitian ini.

2. Uji F

Uji F dilakukan untuk menguji apakah model yang digunakan pada penelitian ini telah layak atau tidak. Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. 13 Hasil Uji F ANOVA

R-squared	0.796173	Mean dependent var	2.942929
Adjusted R-squared	0.588393	S.D. dependent var	0.249515
S.E. of regression	0.160080	Akaike info criterion	-0.519493
Sum squared resid	9.250855	Schwarz criterion	1.802197
Log likelihood	558.6148	Hannan-Quinn criter.	0.376232
F-statistic	3.831812	Durbin-Watson stat	1.989071
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Output Eviews 10, 2021.

Pada tabel 4.13 menunjukkan bahwa nilai F sebesar 3.831812 dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ hal ini berarti bahwa variabel-variabel independen yaitu ukuran daerah, opini audit, temuan audit dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen yaitu kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan pada penelitian ini sudah layak atau model yang fit.

4.2.6. Uji Hipotesis

Uji hipotesis (uji t) digunakan untuk mengetahui kemampuan pengaruh variabel independen (bebas) secara individual (parsial) mempengaruhi variabel dependen (terikat). Kriteria penerimaan atau penolakan uji hipotesis dapat diukur dengan nilai signifikansi. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 ($\text{sig} < 0,05$) maka hipotesis diterima yang berarti bahwa terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 ($\text{sig} > 0,05$) maka hipotesis ditolak artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, Imam dan Ratmono, 2017:67). Berikut hasil uji hipotesis:

Tabel 4. 14 Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.014653	0.692996	1.464154	0.1440
LN_TA	0.059553	0.024286	2.452149	0.0147
OPINI	0.052619	0.009855	5.339504	0.0000
TEMUAN	-5.225611	5.542517	-0.942823	0.3464
TLRHP	0.021087	0.029237	0.721260	0.4712

Sumber: Output Eviews 10, 2021.

Berdasarkan tabel 4.14 diperoleh hasil hipotesis penelitian menggunakan regresi data panel sebagai berikut:

H1 : Ukuran daerah berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

Berdasarkan tabel 4.14 menunjukkan bahwa ukuran daerah diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,059553 dengan tingkat signifikansi $0,0147 < 0,05$

maka dapat disimpulkan bahwa H1 dapat diterima sehingga ukuran daerah berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

H2 : Opini audit berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

Berdasarkan tabel 4.14 menunjukkan bahwa opini audit diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,052619 dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H2 dapat diterima sehingga opini audit berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

H3 : Temuan audit berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

Berdasarkan tabel 4.14 menunjukkan bahwa temuan audit diperoleh nilai koefisien regresi sebesar -5,225611 dengan tingkat signifikansi $0,3464 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H3 tidak dapat diterima sehingga temuan audit tidak berpengaruh negatif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

H4 : Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

Berdasarkan tabel 4.14 menunjukkan bahwa tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,021087 dengan tingkat signifikansi $0,4712 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H4 tidak dapat diterima sehingga tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tidak berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

4.3. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pengujian data dan analisis di atas, maka dapat dijelaskan hasil hipotesis penelitian sebagai berikut:

Tabel 4. 15 Ringkasan Hasil Penelitian

No	Nama Variabel	Signifikansi	Keterangan
1.	Ukuran Daerah	0,0147	H1 (Diterima)
2.	Opini Audit	0,0000	H2 (Diterima)
3.	Temuan Audit	0,3464	H3 (Ditolak)
4.	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	0,4712	H4 (Ditolak)

Sumber: Data diolah, 2021.

4.3.1. Pengaruh Ukuran Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel ukuran daerah berpengaruh positif signifikan terhadap variabel kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Dengan nilai koefisiennya sebesar 0,059553 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,0147 < 0,05$. Yang berarti H1 didukung diterima. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan kabupaten/kota di Indonesia.

Penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh (Kiswanto dan Fatmawati, 2019) yang menyatakan bahwa ukuran daerah berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Ukuran daerah yang tercermin melalui total aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Ukuran daerah sebagai bentuk sumberdaya pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini berarti bahwa jika pemerintah daerah yang memiliki

sumber daya yang relatif besar maka kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah akan meningkat dan sebaliknya.

Hal ini sejalan dengan teori *stewardship* yang menyatakan bahwa pemerintah telah bekerja keras atas dasar motivasi pengabdian dan pelayanan terhadap rakyat. Ukuran daerah yang menggambarkan total aset mampu mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang berarti bahwa pemerintah daerah sebagai *steward* mampu mengelola aset yang dimilikinya sehingga mampu memberikan pelayanan yang baik untuk mensejahterakan rakyat sehingga mampu meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari (Siddi, 2016); (Artha, Basuki dan MT, 2016); (Kiswanto dan Fatmawati, 2019); (Pauli, 2015); (Andani, Sarwani dan Respati, 2019);

4.3.2. Pengaruh Opini Audit Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel opini audit berpengaruh positif signifikan terhadap variabel kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Dengan nilai koefisiennya sebesar 0,052619 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,0000 < 0,05$. Yang berarti H2 didukung diterima. Hal ini menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan kabupaten/kota di Indonesia.

Perolehan opini audit WTP menunjukkan laporan keuangan dapat dipercaya dan menjadi bukti laporan keuangan yang dibuat dan dilaksanakan telah

sesuai *standard, adequate disclosures, obidence* terhadap peraturan undang-undang, dan efektivitas SPI. Pemerintah daerah yang memperoleh opini audit WTP berarti kinerja pemerintah daerah yang diprosikan dengan skor EKPPD menjadi semakin baik, karena pemerintah daerah telah akuntabel dalam mengelola keuangan daerah. Peroleh opini audit dijadikan indikator dalam menilai pengelolaan keuangan daerah. Semakin WTP opini audit maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

Sejalan dengan teori *stewardship* yang menyatakan bahwa opini audit diperoleh sebagai hasil pemeriksaan atas pemerintah dalam mengelola keuangan daerah. Opini audit dengan wajar tanpa pengecualian membuktikan bahwa pemerintah menjalankan peran akuntabilitas dalam mengelola keuangan daerah. Pengelolaan transparaansi dan akuntabilitas akan meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari (Siddi, 2016; Ahyaruddin dan Amrillah, 2018; Andani, Sarwani dan Respati, 2019).

4.3.3. Pengaruh Temuan Audit Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel temuan audit tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Dengan nilai koefisiennya sebesar -5,225611 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,3464 < 0,05$. Yang berarti H3 didukung tidak diterima. Hal ini menunjukkan bahwa temuan audit tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan kabupaten/kota di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa banyak sedikitnya temuan audit tidak akan berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Hasil penelitian dimana temuan audit BPK tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah karena rekomendasi atas hasil pemeriksaan tersebut cepat ditindaklanjuti oleh pemda sehingga tidak berpengaruh dalam pelaksanaan tugas atau urusan pemerintahan (Artha, Basuki dan MT, 2016). Temuan yang cepat ditindaklanjuti akan mempengaruhi kinerja laporan keuangan tahun berikutnya karena temuan yang tidak ditindaklanjuti akan menjadi temuan berulang.

Nilai temuan suatu pemerintah daerah yang kecil tidak dapat memberi kepastian bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut bernilai baik (Parwanto dan Harto, 2017). Hal ini karena pemerintah daerah melihat dari ukuran jumlah temuan audit yang mencerminkan kasus pelanggaran, tidak melihat materialitas atas temuan audit tersebut. Pemerintah daerah yang mendapatkan jumlah temuan audit yang banyak belum tentu memiliki kinerja keuangan pemerintah daerah yang buruk. Pemerintah daerah dalam menjalankan kinerja keuangannya kurang dipengaruhi oleh hasil dari temuan audit.

Hal dipertegas bahwa terdapat perbedaan antara penilaian akuntabilitas keuangan/finansial dan non-keuangan, hal ini dikarenakan akuntabilitas keuangan yang dilihat dari audit atas Laporan Keuangan tidak akan mampu mengungkap seluruh penyimpangan yang terjadi. Justifikasi yang dapat diberikan adalah temuan BPK RI merupakan temuan yang ditemukan pada saat audit LKPD, temuan ini tidak memperhatikan apakah kegiatan tersebut telah sesuai dengan

sasaran yang ingin dicapai tetapi hanya memperhatikan ketidaksesuaian kegiatan tersebut dengan peraturan perundang-undangan termasuk pengungkapan atas penyimpangan administrasi, pelanggaran atas perikatan perdata maupun penyimpangan yang mengandung unsur pidana Hasil penelitian ini sejalan dengan (Artha, Basuki dan MT, 2016); (Suheri, Cahyono dan Yunia, 2018); (Noviyanti, Nur Ade, 2016); (Nurdin, 2004)

4.3.4. Pengaruh Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel tindak lanjut rekomendasi tidak berpengaruh positif signifikan terhadap variabel kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Dengan nilai koefisiennya sebesar 0,021087 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,4712 < 0,05$. Yang berarti H4 didukung tidak diterima. Hal ini menunjukkan bahwa tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan kabupaten/kota di Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyak sedikitnya jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Klasifikasi rekomendasi menurut BPK RI terbagi menjadi 4 yaitu: tindak lanjut sesuai rekomendasi, tindak lanjut belum sesuai rekomendasi, rekomendasi belum ditindaklanjuti dan rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti. Hal ini karena tindak lanjut rekomendasi yang dilaksanakan pemda tidak material. Tindak lanjut rekomendasi atas temuan pemeriksaan masih kurang optimal. Hal ini karena pemerintah daerah hanya menindaklanjuti pada

temuan keuangan saja sehingga temuan teknis dan administrasi tidak ditindaklanjuti.

Dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 disebutkan bahwa pemerintah daerah wajib menindaklanjuti rekomendasi. Tindak lanjut atas rekomendasi BPK harus disampaikan oleh pemerintah daerah selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Jika pemerintah daerah tidak melakukan tindak lanjut atas rekomendasi BPK, maka akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terbatasnya waktu tindaklanjut rekomendasi menyebabkan tindak lanjut kurang maksimal meskipun hasil temuan sangat tinggi maka hal ini tidak akan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian dari (Harumiati dan Payamta, 2014); (Hamzah dan Mattulada, 2019).

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang pengaruh ukuran pemerintah daerah, opini audit, temuan audit dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah pada kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2016-2017. Berdasarkan analisis dan pengujian data dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa banyak sedikitnya jumlah ukuran daerah berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia tahun 2016-2017.
2. Opini audit berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa banyak sedikitnya jumlah opini audit berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia tahun 2016-2017.
3. Temuan audit tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa banyak sedikitnya jumlah temuan audit tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia tahun 2016-2017.

4. Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa banyak sedikitnya jumlah tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia tahun 2016-2017.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan pengujian dan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya penelitian ini memiliki keterbatasan pada hal-hal berikut antara lain:

1. Variabel-variabel independen yang digunakan pada penelitian ini hanya dapat menjelaskan variabel dependen yaitu kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yaitu 58,8%, maka terdapat 41,2% variabel independen yang mempengaruhi di luar model penelitian yang digunakan.
2. Tahun pengambilan sampel hanya menggunakan satu tahun yaitu tahun 2016-2017. Penulis berusaha untuk meneliti Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) untuk tahun penelitian terbaru, namun karena keterbatasan perolehan data EKPPD sehingga tidak dapat menggunakan data terbaru yang lebih representatif pada penelitian ini.

5.3. Saran

Berdasarkan hasil dan analisis yang diuraikan pada penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan, sehingga perlu diperbaiki pada penelitian selanjutnya. Berikut beberapa saran dari peneliti:

1. Bagi Pemerintah Daerah

- a. Pemerintah daerah sebaiknya mengelola aset dengan baik. Aset daerah sebagai bentuk atas ukuran daerah termasuk dalam aspek tataran pelaksana kebijakan daerah dalam rangka pengembangan pembangunan daerah. Sehingga dengan aset yang relatif besar akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah.
 - b. Pemerintah daerah sebaiknya meningkatkan perolehan opini audit. Opini audit merupakan salah satu indikator pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Sehingga semakin baik perolehan opini audit maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
- a. Menggunakan variabel independen lain mengingat masih terdapat 41,2% pengaruh variabel independen di luar model penelitian yang digunakan.
 - b. Menggunakan data Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) terbaru agar penelitian yang dihasilkan lebih representatif.

Daftar Pustaka

- Ahyaruddin, M. and Amrillah, M. F. (2018) 'Faktor Penentu Kinerja Pemerintah Daerah', *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(3). doi: 10.18202/jamal.2018.04.9028.
- Andani, M., Sarwani, S. and Respati, N. W. (2019) 'Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Opini Audit Terhadap Kinerja Pemerintah Provinsi Di Indonesia', *Jurnal Akuntansi*, 9(2), pp. 111–130. doi: 10.33369/j.akuntansi.9.2.111-130.
- Anggraini, L., Rahayu, S. and Junaidi (2019) 'Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi)', *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 4(1), pp. 45–56. doi: 10.22437/jaku.v4i1.7428.
- Ara, S. C., Herwanti, T. and Pituringsih, E. (2016) 'Pengaruh Karakteristik Pemda Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemda Kabupaten Di Pulau Sumba', *Journal of Auditing, Finance, and Forensic Accounting*, 4(1), p. 1. doi: 10.21107/jaffa.v4i1.1878.
- Artha, R. D., Basuki, P. and MT, A. M. (2016) 'Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi NTB)', *InFestasi*, 11(2), p. 214. doi: 10.21107/infestasi.v11i2.1133.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2016). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2016*. Jakarta: BPK RI.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2017*. Jakarta: BPK RI.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2016). *Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Tahun 2016*. Jakarta: BPK RI.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Tahun 2017*. Jakarta: BPK RI.
- Furqan, A. C. *et al.* (2020) 'The effect of audit findings and audit recommendation follow-up on the financial report and public service quality in Indonesia', *International Journal of Public Sector Management*,

33(5), pp. 535–559. doi: 10.1108/IJPSM-06-2019-0173.

- Ghozali, I. (2007) *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Cetakan IV. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam dan Ratmono, D. (2017) *Analisis Multivariat Dan Ekonometrika Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan Eviews 10*. Yogyakarta: Bdan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hamzah, N. and Mattulada, A. (2019) ‘Pengaruh Hasil Pengawasan Internal Dan Penyelesaian Kinerja Keuangan Skpd Di Kabupaten Tojo Una Una’, *Jurnal Katalogis*, Volume 6 N.
- Harumiati, Y. and Payamta, P. (2014) ‘Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun Anggaran 2011’, *Assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 3(2), p. 84. doi: 10.25273/jap.v3i2.1244.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-53Tahun 2018 Tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2016.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 118-8840 Tahun 2018 Tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2017.
- Kiswanto, K. and Fatmawati, D. (2019) ‘Determinan Kinerja Pemerintah Daerah : Ukuran Pemda, Leverage, Temuan Audit dan Tindak Lanjutnya’, *Jurnal Kajian Akuntansi*, 3(1), p. 44. doi: 10.33603/jka.v3i1.1689.
- Kuncoro (2013) *Metode riset untuk bisnis dan ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Kusuma dan Kurniasih (2011) ‘Pengaruh Opini Audit dan Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia’, *Equity*, 16(22), pp. 51–66.
- Mardianis, afrizal, A. (2017) ‘Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Perimbangan, Belanja Daerah Dan Opini Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi’.
- Noviyanti, Nur Ade, K. (2016) ‘Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah’, *Accounting Analysis Journal*, 5(1), pp. 1–10. doi: 10.15294/aaaj.v5i1.9759.
- Nurdin, F. (2004) ‘Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK RI Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah’, (45), p. 39.

- Parwanto, E. and Harto, P. (2017) 'Pengaruh Hasil Pemeriksaan Bpk Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah', *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(1), pp. 35–43.
- Pauli, M. O. (2015) 'Ketidakpatuhan Spi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah', pp. 1–19.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 Tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan pemerintah Daerah.
- Puspitasari, D. and Setyanta, B. (2020) 'Pengaruh tata kelola publik, pendapatan asli daerah dan total aset terhadap kinerja Pemerintah Daerah', 6(1), pp. 12–29.
- Rusmin, R., Astami, E. W. and Scully, G. (2014) 'Local government units in Indonesia: Demographic attributes and differences in financial condition', *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 8(2), pp. 88–109. doi: 10.14453/aabfj.v8i2.7.
- Sedyaningsih (2012) 'Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten di Sulawesi Selatan Tahun 2009 – 2012)', *Akuntansi Universitas Brawijaya*, 66(3), pp. 37–39.
- Siddi, P. (2016) 'Peran Karakteristik Keuangan dan Opini Audit dalam Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah', *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. doi: 10.18202/jamal.2016.12.7030.
- Sudarsana, H. S. and Rahardjo, S. N. (2013) 'Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Influence of Characteristics of Government Regional and Findings Audit of Performance Government Area)', *Diponegoro Journal Of Accounting*, 2(4), pp. 1–13. Available at: <http://ejournal-sl.undip.ac.id/index.php/accounting>.

Sugiyono (2017) *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Edited by Alfabeta. Bandung.

Suheri, S., Cahyono, Y. and Yunia, D. (2018) 'Kinerja Pemerintah Daerah Propinsi Banten: Perspektif Pendapatan Asli Daerah Dan Temuan Audit Badan Pemeriksa Keuangan Indonesia', *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 11(2). doi: 10.35448/jrat.v11i2.4265.

Ulum, A. S. (2012) 'Peran Pengukuran Kinerja Dalam Mendukung Good Governance Dalam Perspektif Agency Theory', *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 3(1), pp. 60–66. doi: 10.15294/jda.v3i1.1945.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Wijaya, A. H. C., Rante, A. and Ramandey, P. I. (2000) 'Pengaruh Opini Audit Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Realisasi Pendapatan Dan Belanja Daerah Sebagai Variabel Intervening', *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah Volume 13, Nomor 2*, 13(November), p. 3.

<http://otda.kemendagri.go.id>

www.bpk.go.id

LAMPIRAN

Lampiran 2 Surat Ijin Penelitian



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BIRO HUMAS DAN KERJA SAMA INTERNASIONAL

Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 31 Jakarta Pusat 10210 Telepon 021-25549000 Pesawat 1182 Faksimile 021-57953198

SURAT KETERANGAN

No. 4/X.2.2/SK/3/2021

Jakarta, 24 Maret 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dandy Handoza, S.T., M.T.
 Jabatan : Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga
 Biro Humas dan Kerja Sama Internasional
 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)
 NIP : 19811142007081001

menerangkan bahwa mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta atas nama Riska Amalia Sari, NIM: 17.522.1.104, telah melaksanakan penelitian pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga,


Dandy Handoza, S.T., M.T.
NIP. 19811142007081001

Lampiran 3 Sampel Penelitian

No	Kabupaten/Kota	No	Kabupaten/Kota
1	Kab. Aceh Barat Daya	33	Kab. Nias Utara
2	Kab. Aceh Besar	34	Kab. Padang Lawas
3	Kab. Aceh Jaya	35	Kab. Padang Lawas Utara
4	Kab. Aceh Singkil	36	Kab. Pakpak Bharat
5	Kab. Aceh Tamiang	37	Kab. Samosir
6	Kab. Aceh Tengah	38	Kab. Serdang Bedagai
7	Kab. Aceh Tenggara	39	Kab. Simalungun
8	Kab. Aceh Timur	40	Kab. Tapanuli Selatan
9	Kab. Aceh Utara	41	Kab. Tapanuli Tengah
10	Kab. Bireuen	42	Kab. Tapanuli Utara
11	Kab. Gayo Lues	43	Kab. Toba Samosir
12	Kab. Nagan Raya	44	Kota Binjai
13	Kab. Pidie	45	Kota Gunungsitoli
14	Kota Banda Aceh	46	Kota Medan
15	Kota Langsa	47	Kota Padangsidimpuan
16	Kota Lhokseumawe	48	Kota pematangsiantar
17	Kota Sabang	49	Kota Sibolga
18	Kota Subulussalam	50	Kota Tanjungbalai
19	Kab. Asahan	51	Kota Tebing Tinggi
20	Kab. Batu Bara	52	Kab. Agam
21	Kab. Dairi	53	Kab. Dharmasraya
22	Kab. Deli Serdang	54	Kab. Kep Mentawai
23	Kab. Humbang Hasundutan	55	Kab. Lima Puluh Kota
24	Kab. Karo	56	Kab. Padang Pariaman
25	Kab. Labuhanbatu	57	Kab. Pasaman Barat
26	Kab. Labuhanbatu Selatan	58	Kab. Pesisir Selatan
27	Kab. Labuhanbatu Utara	59	Kab. Solok
28	Kab. Langkat	60	Kab. Solok Selatan
29	Kab. Mandailing Natal	61	Kota Bukittinggi
30	Kab. Nias	62	Kota Padang
31	Kab. Nias Barat	63	Kota Padang Panjang
32	Kab. Nias Selatan	64	Kota Pariaman
65	Kab. Bengkulu	101	Kota Prabumulih
66	Kab. Indragiri Hilir	102	Kab. Bengkulu Selatan

67	Kab. Indragiri Hulu	103	Kab. Bengkulu Utara
68	Kab. Kampar	104	Kab. Kaur
69	Kab. Kepulauan Meranti	105	Kab. Kepahiang
70	Kab. Kuantan Singingi	106	Kab. Lebong
71	Kab. Rokan Hilir	107	Kab. Mukomuko
72	Kab. Rokan Hulu	108	Kab. Rajang Lebong
73	Kab. Siak	109	Kab. Seluma
74	Kota Dumai	110	Kota Bengkulu
75	Kota Pekanbaru	111	Kab. Lampung Barat
76	Kab. Batang Hari	112	Kab. Lampung Tengah
77	Kab. Bungo	113	Kab. Lampung Timur
78	Kab. Kerinci	114	Kab. Lampung Utara
79	Kab. Merangin	115	Kab. Mesuji
80	Kab. Muaro Jambi	116	Kab. Pesawaran
81	Kab. Sarolangun	117	Kab. Pringsewu
82	Kab. Tanjung Jabung Barat	118	Kab. Tanggamus
83	Kab. Tanjung Jabung Timur	119	Kab. Tulang Bawang
84	Kab. Tebo	120	Kab. Tulang Bawang Barat
85	Kota Jambi	121	Kab. Way Kanan
86	Kota Sungai Penuh	122	Kota Bandar Lampung
87	Kab. Banyuasin	123	Kab. Bangka
88	Kab. Empat Lawang	124	Kab. Bangka Selatan
89	Kab. Lahat	125	Kab. Bangka Tengah
90	Kab. Muara Enim	126	Kab. Belitung
91	Kab. Musi Banyuasin	127	Kab. Belitung Timur
92	Kab. Musi Rawas	128	Kota Pangkalpinang
93	Kab. Ogan Ilir	129	Kab. Bintan
94	Kab. Ogan Komering Ilir	130	Kab. Karimun
95	Kab. Ogan Komering Ulu	131	Kab. Kepulauan Anambas
96	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	132	Kab. Lingga
97	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	133	Kab. Natuna
98	Kota Lubuklinggau	134	Kota Batam
99	Kota Pagar Alam	135	Kab. Bandung
100	Kota Palembang	136	Kab. Bandung Barat
137	Kab. Bogor	173	Kab. Pematang
138	Kab. Cianjur	174	Kab. Purbalingga

139	Kab. Cirebon	175	Kab. Purworejo
140	Kab. Garut	176	Kab. Rembang
141	Kab. Indramayu	177	Kab. Semarang
142	Kab. Karawang	178	Kab. Sragen
143	Kab. Kuningan	179	Kab. Sukoharjo
144	Kab. Majalengka	180	Kab. Tegal
145	Kab. Purwakarta	181	Kab. Temanggung
146	Kab. Subang	182	Kab. Wonogiri
147	Kab. Sukabumi	183	Kab. Wonosobo
148	Kab. Sumedang	184	Kota Magelang
149	Kab. Tasikmalaya	185	Kota Pekalongan
150	Kota Bandung	186	Kota Salatiga
151	Kota Banjar	187	Kota Semarang
152	Kota Bekasi	188	Kota Surakarta
153	Kota Cirebon	189	Kota Tegal
154	Kota Depok	190	Kota Yogyakarta
155	Kota Sukabumi	191	Kab. Bangkalan
156	Kab. Banjarnegara	192	Kab. Banyuwangi
157	Kab. Banyumas	193	Kab. Blitar
158	Kab. Batang	194	Kab. Bojonegoro
159	Kab. Blora	195	Kab. Bondowoso
160	Kab. Boyolali	196	Kab. Gresik
161	Kab. Brebes	197	Kab. Jember
162	Kab. Cilacap	198	Kab. Jombang
163	Kab. Demak	199	Kab. Kediri
164	Kab. Grobogan	200	Kab. Lamongan
165	Kab. Jepara	201	Kab. Lumajang
166	Kab. Karanganyar	202	Kab. Madiun
167	Kab. Kebumen	203	Kab. Magetan
168	Kab. Kendal	204	Kab. Malang
169	Kab. Klaten	205	Kab. Mojokerto
170	Kab. Kudus	206	Kab. Nganjuk
171	Kab. Magelang	207	Kab. Ngawi
172	Kab. Pati	208	Kab. Pacitan
209	Kab. Pamekasan	245	Kab. Belu
210	Kab. Pasuruan	246	Kab. Ende

211	Kab. Ponorogo	247	Kab. Flores Timur
212	Kab. Probolinggo	248	Kab. Kupang
213	Kab. Sampang	249	Kab. Lembata
214	Kab. Sidoarjo	250	Kab. Manggarai
215	Kab. Situbondo	251	Kab. Manggarai Barat
216	Kab. Sumenep	252	Kab. Manggarai Timur
217	Kab. Trenggalek	253	Kab. Nagekeo
218	Kab. Tuban	254	Kab. Ngada
219	Kota Batu	255	Kab. Rote Ndao
220	Kota Blitar	256	Kab. Sabu Raijua
221	Kota Kediri	257	Kab. Sikka
222	Kota Madiun	258	Kab. Sumba Barat
223	Kota Malang	259	Kab. Sumba Barat Daya
224	Kota Mojokerto	260	Kab. Sumba Tengah
225	Kota Pasuruan	261	Kab. Sumba Timur
226	Kota Probolinggo	262	Kab. Timor Tengah Selatan
227	Kota Surabaya	263	Kab. Timor Tengah Utara
228	Kab. Lebak	264	Kota Kupang
229	Kab. Pandeglang	265	Kab. Bengkayang
230	Kab. Serang	266	Kab. Ketapang
231	Kab. Tangerang	267	Kab. Melawi
232	Kota Cilegon	268	Kab. Mempawah
233	Kota Serang	269	Kab. Sanggau
234	Kota Tangerang Selatan	270	Kab. Sintang
235	Kab. Gianyar	271	Kab. Barito Selatan
236	Kab. Bima	272	Kab. Barito Timur
237	Kab. Dompu	273	Kab. Gunung Mas
238	Kab. Lombok Barat	274	Kab. Kapuas
239	Kab. Lombok Tengah	275	Kab. Kotawaringin Barat
240	Kab. Lombok Timur	276	Kab. Kotawaringin Timur
241	Kab. Lombok Utara	277	Kab. Seruyan
242	Kab. Sumbawa	278	Kota Palangka Raya
243	Kab. Sumbawa Barat	279	Kab. Hulu Sungai Tengah
244	Kab. Alor	280	Kab. Hulu Sungai Utara
281	Kab. Kotabaru	316	Kab. Parigi Moutong
282	Kab. Tabalong	317	Kab. Poso

283	Kab. Tanah Bumbu	318	Kab. Sigi
284	Kab. Berau	319	Kab. Tolitoli
285	Kab. Kutai Barat	320	Kota Palu
286	Kab. Kutai Kertanegara	321	Kab. Bantaeng
287	Kab. Kutai Timur	322	Kab. Barru
288	Kab. Paser	323	Kab. Bulukumba
289	Kab. Panajam Paser Utara	324	Kab. Enrekang
290	Kota Balikpapan	325	Kab. Gowa
291	Kota Bontang	326	Kab. Jeneponto
292	Kota Samarinda	327	Kab. Kep. Selayar
293	Kab. Bulungan	328	Kab. Luwu
294	Kab. Malinau	329	Kab. Luwu Timur
295	Kab. Nunukan	330	Kab. Luwu Utara
296	Kab. Tana Tidung	331	Kab. Maros
297	Kab. Bolaang Mongondow	332	Kab. Pangkajene dan Kepulauan
298	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	333	Kab. Pinrang
299	Kab. Bolaang Mongondow Timur	334	Kab. Sidenreng Rappang
300	Kab. Bolaang Mongondow Utara	335	Kab. Takalar
301	Kab. Kepulauan Sangihe	336	Kab. Tana Toraja
302	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	337	Kab. Toraja Utara
303	Kab. Kepulauan Talaud	338	Kab. Wajo
304	Kab. Minahasa	339	Kota Makassar
305	Kab. Minahasa Selatan	340	Kota Palopo
306	Kab. Minahasa Tenggara	341	Kota Parepare
307	Kab. Minahasa Utara	342	Kab. Bombana
308	Kota Bitung	343	Kab. Buton
309	Kota Manado	344	Kab. Kolaka
310	Kota Tomohon	345	Kab. Kolaka Utara
311	Kab. Banggai	346	Kab. Konawe Selatan
312	Kab. Banggai Kepulauan	347	Kab. Konawe Utara
313	Kab. Buol	348	Kab. Muna
314	Kab. Donggala	349	Kab. Wakatobi
315	Kab. Morowali	350	Kota Baubau
351	Kab. Boalemo	387	Kab. Kepulauan Yapen
352	Kab. Bone Bolango	388	Kab. Lanny Jaya

353	Kab. Gorontalo	389	Kab. Mamberamo Raya
354	Kab. Gorontalo Utara	390	Kab. Mamberamo Tengah
355	Kab. Pohuwato	391	Kab. Mappi
356	Kota Gorontalo	392	Kab. Merauke
357	Kab. Majene	393	Kab. Mimika
358	Kab. Mamasa	394	Kab. Nabire
359	Kab. Pasangkayu (Mamuju Utara)	395	Kab. Nduga
360	Kab. Buru	396	Kab. Paniai
361	Kab. Buru Selatan	397	Kab. Pegunungan Bintang
362	Kab. Kepulauan Aru	398	Kab. Puncak Jaya
363	Kab. Kepulauan Tanimbar (Maluku Tenggara Barat)	399	Kab. Sarmi
364	Kab. Maluku Barat Daya	400	Kab. Supiori
365	Kab. Maluku Tengah	401	Kab. Tolikara
366	Kab. Maluku Tenggara	402	Kab. Waropen
367	Kab. Seram Bagian Barat	403	Kab. Yahukimo
368	Kab. Seram Bagian Timur	404	Kab. Yalimo
369	Kota Ambon	405	Kota Jayapura
370	Kota Tual	406	Kab. Fakfak
371	Kab. Halmahera Selatan	407	Kab. Manokwari
372	Kab. Halmahera Tengah	408	Kab. Maybrat
373	Kab. Halmahera Timur	409	Kab. Raja Ampat
374	Kab. Halmahera Utara	410	Kab. Sorong
375	Kab. Kepulauan Sula	411	Kab. Sorong Selatan
376	Kab. Pulau Morotai	412	Kab. Tambrauw
377	Kota Ternate	413	Kab. Teluk Bintuni
378	Kab. Asmat	414	Kab. Teluk Wondama
379	Kab. Biak Numfor	415	Kota Sorong
380	Kab. Boven Digoel		
381	Kab. Deiyai		
382	Kab. Dogiyai		
383	Kab. Intan Jaya		
384	Kab. Jayapura		
385	Kab. Jayawijaya		
386	Kab. Keerom		

Lampiran 4 Tabulasi Data Sebelum Outlier

No	Kabupaten/Kota	(Y) kinerja pemda		(X1) total aset		(X2) opini audit		(X3) Temuan audit		(X4) TLRHP	
		2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
1	Kab. Aceh Barat Daya	2,8947	2,6944	28,1207	28,2219	5	5	0,003856	0,001616	0,5376	0,9582
2	Kab. Aceh Besar	2,6252	2,7305	28,5619	28,6395	5	5	0,000838	0,000868	0,0584	0,2504
3	Kab. Aceh Jaya	2,8412	2,7277	28,3026	28,4106	5	5	0,001991	0,001325	0,7872	0,0225
4	Kab. Aceh Singkil	2,6082	2,7509	27,8255	27,8223	5	5	0,000981	0,000945	1,0000	0,8193
5	Kab. Aceh Tamiang	2,8677	2,7314	28,2675	28,5003	5	5	0,000474	0,000176	1,0000	0,9892
6	Kab. Aceh Tengah	2,8284	2,6750	28,4038	28,5325	5	5	0,001739	0,001686	1,0000	0,6386
7	Kab. Aceh Tenggara	2,2081	2,3559	28,5951	28,7239	3	5	0,001494	0,001516	0,8104	0,0542
8	Kab. Aceh Timur	2,6377	2,5781	28,6846	28,7728	5	5	0,002967	0,002196	0,7151	0,0486
9	Kab. Aceh Utara	2,7760	2,7448	29,0766	29,1132	5	5	0,001036	0,001132	0,5066	0,8671
10	Kab. Bireuen	2,6969	2,7340	28,5309	28,6699	5	5	0,001816	0,000498	1,0000	0,6046
11	Kab. Gayo Lues	2,8159	2,7431	28,4400	28,5164	5	5	0,000927	0,000839	0,7880	0,3784
12	Kab. Nagan Raya	2,8118	2,6520	28,1613	28,2564	5	5	0,002764	0,000529	1,0000	0,9666
13	Kab. Pidie	2,5028	2,6590	28,6104	28,7594	5	5	0,000282	0,000257	0,6207	1,0000
14	Kota Banda Aceh	2,9686	2,9673	29,0548	29,4197	5	5	0,002294	0,002713	1,0000	0,0258
15	Kota Langsa	2,8334	2,7856	27,9901	28,1487	5	5	0,002804	0,002555	0,6781	0,9719
16	Kota Lhokseumawe	2,6330	2,7246	28,0222	28,0839	3	5	0,000779	0,000776	0,0113	1,0000
17	Kota Sabang	2,6819	2,8128	27,9005	27,8016	5	5	0,002271	0,000697	1,0000	1,0000
18	Kota Subulussalam	2,5408	2,6809	27,6937	27,8278	5	5	0,003837	0,001826	0,8656	0,8067
19	Kab. Asahan	2,6857	2,9141	28,8037	28,8119	3	5	0,002851	0,001821	0,4849	0,3825
20	Kab. Batu Bara	2,8952	1,3851	28,1227	28,3008	3	3	0,007513	0,003062	0,7827	0,6137
21	Kab. Dairi	2,6715	2,7697	28,2531	28,2795	5	5	0,001158	0,003261	1,0000	0,9294

22	Kab. Deli Serdang	3,0002	3,0189	29,4479	29,5524	3	3	0,001840	0,000788	0,6500	0,9929
23	Kab. Humbang Hasundutan	2,9558	3,0064	28,1874	28,1766	5	5	0,002929	0,002553	1,0000	0,8849
24	Kab. Karo	2,6782	2,6130	28,2842	28,4565	1	3	0,001287	0,001298	0,9884	0,2848
25	Kab. Labuhanbatu	2,4022	1,5696	28,5479	28,5474	3	3	0,056668	0,038354	1,0000	0,0316
26	Kab. Labuhanbatu Selatan	2,4859	2,7074	27,7937	27,8107	5	5	0,003465	0,007076	0,8483	0,9792
27	Kab. Labuhanbatu Utara	2,4281	2,8031	28,4143	28,4955	5	5	0,001043	0,005875	0,9888	1,0000
28	Kab. Langkat	2,6630	2,7980	28,9733	28,9912	3	3	0,003025	0,003015	0,7717	0,7600
29	Kab. Mandailing Natal	2,0419	2,3537	28,3095	28,2285	3	3	0,002013	0,002638	0,5843	0,2082
30	Kab. Nias	2,4727	2,5595	28,0355	28,1020	3	3	0,005131	0,005564	0,6974	0,6791
31	Kab. Nias Barat	2,2590	2,5170	27,4007	27,5852	1	1	0,002221	0,006797	0,5938	0,2348
32	Kab. Nias Selatan	2,0131	2,3911	28,0321	28,0679	1	1	0,004499	0,013707	0,2617	0,3926
33	Kab. Nias Utara	1,9875	1,8720	27,9831	28,1313	3	3	0,008263	0,005426	0,6155	0,9982
34	Kab. Padang Lawas	2,6059	2,4580	27,8724	27,9182	3	3	0,002768	0,003212	0,6379	0,5859
35	Kab. Padang Lawas Utara	2,7148	2,7851	27,7980	27,8871	3	5	0,003617	0,004561	0,9723	0,7283
36	Kab. Pakpak Bharat	3,0887	1,9920	27,5394	27,5439	5	5	0,004678	0,004649	0,9750	1,0000
37	Kab. Samosir	2,9037	3,0033	28,0968	28,0211	3	5	0,002275	0,001997	1,0000	0,9529
38	Kab. Serdang Bedagai	3,0462	2,8402	28,1971	28,2347	3	3	0,001079	0,003685	0,4986	0,2887
39	Kab. Simalungun	2,8329	2,6704	28,7392	28,7501	3	1	0,001475	0,001217	0,9801	1,0000
40	Kab. Tapanuli Selatan	2,9468	2,8278	28,2129	28,2978	5	5	0,002012	0,000279	0,8821	0,4462
41	Kab. Tapanuli Tengah	2,8018	2,8567	27,9726	27,9725	3	3	0,003810	0,006048	0,5257	0,5926
42	Kab. Tapanuli Utara	2,7315	2,7627	28,3287	28,2665	5	5	0,001882	0,000796	0,9726	0,8937
43	Kab. Toba Samosir	2,9701	2,7618	28,1351	28,1923	5	5	0,001822	0,000721	0,6498	1,0000
44	Kota Binjai	2,8884	2,8949	27,8266	27,8367	5	5	0,000714	0,000855	0,8336	0,9659
45	Kota Gunungsitoli	2,4590	2,6833	28,0394	28,0409	3	3	0,002949	0,002967	0,9407	0,7937
46	Kota Medan	2,9825	2,7890	31,0308	31,0497	3	3	0,003526	0,010921	0,6387	0,3688

47	Kota Padangsidempuan	2,7313	2,6721	27,7679	27,8294	3	3	0,001289	0,004586	0,6308	0,3193
48	Kota pematangsiantar	2,7931	2,7802	28,7115	28,7165	5	5	0,001308	0,000753	0,2123	0,7105
49	Kota Sibolga	2,6710	2,7640	28,0130	27,9397	1	3	0,002665	0,001036	0,1444	0,7963
50	Kota Tanjungbalai	2,5570	2,8348	27,8716	28,0268	3	3	0,003973	0,003657	0,3698	0,9308
51	Kota Tebing Tinggi	3,0687	3,0020	28,0529	28,1552	5	3	0,003409	0,002626	0,7561	0,6554
52	Kab. Agam	3,1750	2,9913	28,2805	28,2704	5	5	0,000777	0,000659	1,0000	1,0000
53	Kab. Dharmasraya	3,1226	3,1856	28,3822	28,4374	5	5	0,003918	0,002193	0,0405	0,2967
54	Kab. Kep Mentawai	2,7307	2,8650	28,1430	27,9765	3	5	0,001727	0,003479	0,6422	0,8725
55	Kab. Lima Puluh Kota	3,0542	2,9384	27,9767	28,0229	5	5	0,000423	0,000403	1,0000	0,9302
56	Kab. Padang Pariaman	3,1217	2,9927	27,8925	27,8886	5	5	0,000932	0,000941	0,8470	0,8277
57	Kab. Pasaman Barat	2,9002	2,8758	28,3949	28,2596	5	5	0,001145	0,001383	0,2851	0,0597
58	Kab. Pesisir Selatan	3,0653	3,0059	28,1899	28,2000	5	5	0,000596	0,000614	0,9887	0,5144
59	Kab. Solok	3,1063	2,9953	28,0864	28,0598	3	5	0,000787	0,000773	0,9427	0,7445
60	Kab. Solok Selatan	2,5555	2,9455	28,1482	28,1714	5	5	0,000481	0,000565	1,0000	1,0000
61	Kota Bukittinggi	3,2205	3,1668	28,0312	28,0466	5	5	0,005865	0,000695	0,1272	0,7954
62	Kota Padang	3,1351	3,1723	29,5598	29,5946	5	5	0,001613	0,001315	0,8475	0,1188
63	Kota Padang Panjang	2,9103	2,9968	27,6658	27,8378	5	5	0,003116	0,001240	0,2739	0,9823
64	Kota Pariaman	3,0341	2,8900	27,5040	27,4346	5	5	0,001650	0,001364	0,8275	0,5420
65	Kab. Bengkalis	3,0093	2,9582	29,8706	29,8382	5	5	0,007558	0,000488	0,0708	0,0833
66	Kab. Indragiri Hilir	2,7722	2,9062	28,9845	28,9486	5	5	0,001873	0,005407	0,3382	0,0676
67	Kab. Indragiri Hulu	2,9958	2,8891	28,8004	28,7816	5	5	0,001436	0,001892	0,4245	0,8108
68	Kab. Kampar	2,9642	2,9564	29,1488	29,0956	5	5	0,000290	0,000240	1,0000	0,3332
69	Kab. Kepulauan Meranti	2,7631	2,6847	28,6536	28,6194	5	5	0,002987	0,001583	0,1720	0,0068
70	Kab. Kuantan Singingi	2,7084	2,8150	28,6119	28,5688	5	5	0,005217	0,001073	0,7616	0,7929
71	Kab. Rokan Hilir	2,8142	2,6121	29,4176	29,3449	3	3	0,000284	0,000199	0,1270	0,5364

72	Kab. Rokan Hulu	2,9097	2,7080	28,6619	28,6791	5	5	0,001178	0,000436	0,4974	0,7447
73	Kab. Siak	3,2401	3,1481	29,4748	29,4031	5	5	0,005500	0,000629	0,4766	0,9504
74	Kota Dumai	2,8230	2,8702	28,8073	28,5522	3	5	0,005142	0,005307	0,0002	0,7583
75	Kota Pekanbaru	3,0481	3,3489	29,3067	29,2911	5	5	0,002770	0,000137	0,3039	0,3950
76	Kab. Batang Hari	2,9002	2,5332	28,0869	28,1673	5	5	0,003627	0,216736	0,9549	0,9729
77	Kab. Bungo	3,0235	2,9345	28,0289	28,1000	3	3	0,004825	0,001994	0,1171	0,9372
78	Kab. Kerinci	3,0512	2,9308	28,0134	28,0624	5	5	0,000785	0,000484	0,8326	0,5829
79	Kab. Merangin	3,3383	2,9938	28,2610	28,3145	5	5	0,003422	0,001171	0,6827	0,4217
80	Kab. Muaro Jambi	2,5630	2,7541	28,4414	28,3266	5	5	0,001243	0,001792	1,0000	0,2037
81	Kab. Sarolangun	3,2787	3,0452	28,3540	28,4137	5	5	0,001892	0,004960	0,2883	0,9754
82	Kab. Tanjung Jabung Barat	2,6481	2,6799	28,7534	28,9256	1	3	0,001241	0,002761	0,5805	0,2521
83	Kab. Tanjung Jabung Timur	2,9232	2,7907	28,2985	28,2379	3	5	0,001187	0,002761	0,7967	0,9704
84	Kab. Tebo	3,0054	2,8783	28,4313	28,4070	5	5	0,001531	0,004676	0,4745	0,7909
85	Kota Jambi	3,0668	2,9893	28,6138	28,6575	5	5	0,004716	0,002134	0,1773	0,1014
86	Kota Sungai Penuh	2,9868	2,8413	27,8146	27,7699	5	5	0,003535	0,002038	0,6798	0,6882
87	Kab. Banyuasin	2,9786	2,8655	29,0012	28,9800	5	5	0,002250	0,002768	1,0000	0,3406
88	Kab. Empat Lawang	2,8922	2,8034	28,2013	28,2682	5	5	0,004020	0,003548	0,2784	0,2525
89	Kab. Lahat	3,0574	2,8902	28,6508	28,6681	5	5	0,001533	0,001289	0,4539	0,9615
90	Kab. Muara Enim	3,1195	2,9910	29,1606	29,2033	5	5	0,001067	0,000566	0,4991	1,0000
91	Kab. Musi Banyuasin	3,0575	2,8552	29,6545	29,6476	5	5	0,002365	0,004642	0,3703	0,3412
92	Kab. Musi Rawas	3,1996	2,9410	28,8644	28,8636	5	5	0,004285	0,004376	0,9703	0,1055
93	Kab. Ogan Ilir	3,0434	2,8794	28,4425	28,2874	5	5	0,004940	0,005403	0,3229	0,5021
94	Kab. Ogan Komering Ilir	3,1356	2,9652	28,8293	28,8758	5	5	0,002652	0,001865	0,7237	0,3104
95	Kab. Ogan Komering Ulu	2,9876	2,8911	28,5848	28,6520	5	5	0,000828	0,004561	0,0211	0,6985

96	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	2,7696	2,7084	28,4537	28,5880	5	5	0,004871	0,002374	0,1116	0,4009
97	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	2,8131	2,7045	28,3289	28,3569	5	5	0,002455	0,007056	0,1394	0,6231
98	Kota Lubuklinggau	2,9761	2,7623	28,4642	28,4778	5	5	0,002400	0,002384	0,6596	0,3364
99	Kota Pagar Alam	2,9768	2,8660	28,2533	28,3643	5	5	0,004986	0,006264	0,4591	0,8152
100	Kota Palembang	3,0768	3,0427	29,6450	30,2372	5	5	0,004766	0,000961	0,9253	0,8118
101	Kota Prabumulih	3,0161	2,9633	28,5532	28,5202	5	5	0,001554	0,000972	0,4000	0,1145
102	Kab. Bengkulu Selatan	2,9408	1,9348	27,7992	27,8136	3	3	0,011339	0,003374	0,5798	0,5465
103	Kab. Bengkulu Utara	2,8651	2,6940	27,9999	28,0780	3	5	0,003036	0,001530	0,5409	0,9287
104	Kab. Kaur	3,1128	2,9524	27,8294	27,8241	5	3	0,001187	0,000559	0,9380	0,4019
105	Kab. Kepahiang	2,8857	2,6864	27,7173	27,7749	3	3	0,001701	0,001153	1,0000	0,8408
106	Kab. Lebong	2,7536	2,8519	28,0549	28,0687	5	5	0,001140	0,004975	0,6188	1,0000
107	Kab. Mukomuko	2,9777	2,8640	28,0059	28,0652	3	5	0,003097	0,003136	0,9535	0,9561
108	Kab. Rajang Lebong	2,7285	2,8567	28,0186	28,0283	3	3	0,001283	0,002641	0,8639	0,9537
109	Kab. Seluma	2,7645	2,5627	27,9780	28,0538	3	3	0,001237	0,005010	0,4320	0,7276
110	Kota Bengkulu	2,7803	2,0480	28,2835	28,3166	3	3	0,004270	0,001445	0,6998	0,6460
111	Kab. Lampung Barat	3,3435	3,0269	28,2323	28,3081	5	5	0,000369	0,000596	1,0000	1,0000
112	Kab. Lampung Tengah	3,0755	1,8899	28,7182	28,7482	5	3	0,001605	0,001539	0,9165	0,7126
113	Kab. Lampung Timur	2,8935	2,8069	28,2572	28,5080	3	3	0,001450	0,001349	0,7416	0,2059
114	Kab. Lampung Utara	3,0930	2,8389	28,5011	28,6494	5	5	0,004400	0,000502	0,4291	0,0318
115	Kab. Mesuji	2,7967	2,8076	27,9192	28,0198	5	5	0,002990	0,002819	0,6856	0,5277
116	Kab. Pesawaran	2,9807	2,7933	28,2117	28,2960	5	5	0,001174	0,003752	0,9001	0,3406
117	Kab. Pringsewu	2,9293	2,8924	28,1792	28,3143	5	5	0,001458	0,001420	1,0000	0,8851
118	Kab. Tanggamus	2,8374	2,8416	28,3577	28,3409	3	5	0,001020	0,001997	1,0000	0,6122

119	Kab. Tulang Bawang	2,9011	2,7837	28,3381	28,3474	5	5	0,001820	0,003516	1,0000	0,8429
120	Kab. Tulang Bawang Barat	2,9726	3,0820	28,1092	28,1996	5	5	0,005659	0,004582	1,0000	0,4157
121	Kab. Way Kanan	2,9928	2,9852	28,2948	28,3861	5	5	0,002228	0,002793	0,6268	0,1371
122	Kota Bandar Lampung	2,9745	2,8870	29,0097	29,0309	5	5	0,002824	0,001659	0,9882	1,0000
123	Kab. Bangka	3,2760	3,1147	28,1222	28,2210	5	5	0,002438	0,000918	0,3239	1,0000
124	Kab. Bangka Selatan	3,0880	2,9701	27,7769	27,8201	3	3	0,001097	0,002914	0,8198	0,9837
125	Kab. Bangka Tengah	3,2846	3,0939	27,8220	27,8456	5	5	0,001266	0,002240	0,8608	1,0000
126	Kab. Belitung	3,1628	2,9745	28,1014	28,1527	3	3	0,000988	0,000799	0,5881	1,0000
127	Kab. Belitung Timur	3,1793	2,9700	28,0178	27,9529	3	3	0,001901	0,004887	0,6098	0,1828
128	Kota Pangkalpinang	2,9118	3,0546	28,4360	28,6350	3	5	0,002346	0,002855	0,1866	0,1423
129	Kab. Bintan	3,4239	3,3338	28,5004	28,4778	5	5	0,004936	0,003384	0,4102	0,7039
130	Kab. Karimun	3,2503	3,2974	28,3714	28,3728	5	5	0,003748	0,005895	0,7255	0,6604
131	Kab. Kepulauan Anambas	2,8629	1,7496	28,0433	28,0474	3	5	0,000816	0,001193	0,1515	0,5372
132	Kab. Lingga	3,0011	2,9630	28,0470	28,1237	3	5	0,003026	0,000166	0,4323	1,0000
133	Kab. Natuna	2,9411	2,9945	28,4488	28,4814	3	5	0,002782	0,001399	0,1662	0,3256
134	Kota Batam	3,1431	3,0857	28,9517	28,9844	5	5	0,005059	0,004597	0,4157	0,0904
135	Kab. Bandung	3,2708	2,9536	29,8231	29,9034	5	5	0,001600	0,000531	1,0000	0,0247
136	Kab. Bandung Barat	3,3684	2,7562	28,7643	28,8450	3	3	0,005338	0,000627	0,3600	0,4661
137	Kab. Bogor	3,3397	3,1740	30,5545	30,6849	5	5	0,000600	0,001703	0,4181	0,8981
138	Kab. Cianjur	3,2221	2,5821	29,2043	29,3267	5	5	0,000809	0,000760	0,9261	0,8032
139	Kab. Cirebon	3,2945	2,6287	28,8766	28,9559	5	5	0,001445	0,000940	0,9978	0,5094
140	Kab. Garut	3,4915	3,2750	28,9586	29,0608	5	5	0,000829	0,000923	0,9975	0,5514
141	Kab. Indramayu	3,3660	3,1636	29,0794	29,1084	5	5	0,000323	0,000300	0,6608	0,9869
142	Kab. Karawang	3,3547	3,1596	29,0811	29,1327	5	5	0,002931	0,002570	0,9365	0,6188
143	Kab. Kuningan	3,4975	3,3807	28,4082	28,4140	5	5	0,002074	0,002975	0,6671	0,6341

144	Kab. Majalengka	3,4282	3,1537	29,0677	29,1183	5	5	0,001499	0,001128	0,0018	0,6075
145	Kab. Purwakarta	3,1706	3,2097	28,4743	28,5836	5	5	0,004847	0,000593	0,9203	1,0000
146	Kab. Subang	3,4220	2,6967	29,1725	29,1264	3	3	0,001587	0,000239	0,5718	1,0000
147	Kab. Sukabumi	3,3230	3,2634	28,9587	28,9816	5	5	0,000585	0,000223	0,5927	0,7655
148	Kab. Sumedang	3,3510	3,1292	28,5432	28,7308	5	5	0,000440	0,001126	0,5184	0,7992
149	Kab. Tasikmalaya	3,4185	3,2332	29,0320	29,0051	5	5	0,001240	0,000996	1,0000	1,0000
150	Kota Bandung	3,4110	3,3019	30,8033	30,7906	3	3	0,002315	0,003720	0,8836	0,5344
151	Kota Banjar	3,2391	3,3032	28,0542	28,0826	5	5	0,000930	0,000997	1,0000	0,1164
152	Kota Bekasi	3,2154	3,2546	29,9338	30,0643	5	5	0,001135	0,000538	0,7076	0,3854
153	Kota Cirebon	3,2383	3,1177	28,7763	28,8205	5	5	0,003664	0,003660	0,2145	0,1264
154	Kota Depok	3,2670	3,2858	29,8648	29,9071	5	5	0,000565	0,000632	0,8890	0,7193
155	Kota Sukabumi	3,3879	3,2637	28,0480	28,1300	5	5	0,002528	0,000678	0,5156	0,4307
156	Kab. Banjarnegara	3,2171	2,9424	28,9568	29,0485	5	5	0,002706	0,000246	1,0000	1,0000
157	Kab. Banyumas	3,2101	3,1193	29,2658	29,3292	5	5	0,001105	0,001162	0,9664	0,5233
158	Kab. Batang	3,0471	2,9373	28,4815	28,5079	5	5	0,000205	0,000690	1,0000	0,6987
159	Kab. Blora	3,2678	3,0821	28,4743	28,5657	5	5	0,000529	0,000998	1,0000	0,9994
160	Kab. Boyolali	3,2560	3,1428	28,5910	28,5919	5	5	0,000134	0,001844	1,0000	1,0000
161	Kab. Brebes	3,1264	2,9195	28,6581	28,8751	3	3	0,000175	0,000273	0,8992	0,7380
162	Kab. Cilacap	3,1082	2,9807	29,0170	28,9778	5	5	0,000582	0,000533	1,0000	1,0000
163	Kab. Demak	3,2867	3,1989	29,2221	28,8345	5	5	0,000403	0,000259	1,0000	1,0000
164	Kab. Grobogan	3,2543	3,1075	28,5784	28,6704	5	5	0,002371	0,001222	0,9881	0,7263
165	Kab. Jepara	3,3507	3,0391	29,2767	29,4037	5	5	0,001031	0,000634	0,8154	1,0000
166	Kab. Karanganyar	3,5521	3,3886	28,6556	28,7014	5	5	0,002301	0,002282	0,9688	1,0000
167	Kab. Kebumen	3,1274	2,5236	29,0397	29,0397	3	5	0,001167	0,000320	0,9891	1,0000
168	Kab. Kendal	3,2226	3,0932	28,8085	28,7348	5	5	0,005228	0,005662	0,9006	0,2657

169	Kab. Klaten	3,2138	3,0353	28,8791	28,9466	3	3	0,001850	0,001397	1,0000	0,9518
170	Kab. Kudus	3,4969	3,1959	28,8812	29,0337	5	5	0,001233	0,000823	1,0000	1,0000
171	Kab. Magelang	3,1375	3,1128	28,6673	28,7314	5	5	0,001133	0,000344	1,0000	0,7922
172	Kab. Pati	3,4766	3,3144	29,3574	29,4239	5	5	0,001222	0,000672	1,0000	0,5494
173	Kab. Pemalang	3,0827	2,9110	28,7142	28,7970	5	5	0,000137	0,000565	0,9764	1,0000
174	Kab. Purbalingga	3,2954	2,6286	28,4497	28,5092	5	5	0,001519	0,001136	1,0000	0,7025
175	Kab. Purworejo	3,2167	3,0972	28,5130	28,5823	5	5	0,000587	0,000573	1,0000	0,7584
176	Kab. Rembang	3,1013	2,8848	28,2187	28,1615	3	3	0,002132	0,001700	0,7714	1,0000
177	Kab. Semarang	3,3740	3,2338	28,6462	28,7664	5	5	0,001214	0,000505	0,9338	0,3041
178	Kab. Sragen	3,3252	3,2967	28,6978	28,6120	5	5	0,001926	0,001086	0,8488	0,3574
179	Kab. Sukoharjo	3,3039	3,1332	29,0446	29,1358	5	5	0,000629	0,000233	0,6103	0,9579
180	Kab. Tegal	3,0771	3,0183	28,6589	28,7267	5	5	0,000265	0,000741	0,1058	0,4607
181	Kab. Temanggung	3,2828	3,0512	28,6482	28,7105	5	5	0,003034	0,000887	0,9488	1,0000
182	Kab. Wonogiri	3,1894	2,9428	28,7220	28,7852	5	5	0,001266	0,000142	0,6357	1,0000
183	Kab. Wonosobo	3,1353	3,0905	28,5079	28,6166	5	5	0,001416	0,000444	0,7103	0,6223
184	Kota Magelang	3,3080	3,2214	28,7029	28,9062	5	5	0,001954	0,001045	1,0000	1,0000
185	Kota Pekalongan	3,1587	3,0939	28,4090	28,4688	5	5	0,002101	0,000681	1,0000	1,0000
186	Kota Salatiga	3,1289	3,1231	28,3423	28,7410	5	5	0,001132	0,001377	1,0000	1,0000
187	Kota Semarang	3,4142	3,3775	31,0336	30,9912	5	5	0,000646	0,000183	1,0000	1,0000
188	Kota Surakarta	3,2770	3,0992	29,5377	29,6419	5	5	0,001220	0,000714	1,0000	0,8722
189	Kota Tegal	3,0358	2,6052	28,3623	28,4483	3	3	0,000839	0,006543	0,7002	0,8465
190	Kota Yogyakarta	3,2733	3,1773	28,7690	28,7491	5	5	0,000645	0,000270	0,3239	0,5079
191	Kab. Bangkalan	3,0858	2,9176	28,6695	28,8057	3	5	0,002894	0,004233	1,0000	1,0000
192	Kab. Banyuwangi	3,5259	3,3873	29,0054	29,0391	5	5	0,001484	0,001265	1,0000	1,0000
193	Kab. Blitar	3,2038	3,1238	28,8177	28,9639	5	5	0,001224	0,000544	0,8523	0,9299

194	Kab. Bojonegoro	3,2100	3,1241	29,0667	29,2916	5	5	0,001668	0,000084	0,8786	0,7191
195	Kab. Bondowoso	3,1746	3,0614	28,5263	28,6070	5	5	0,000636	0,000586	1,0000	1,0000
196	Kab. Gresik	3,4728	3,3121	29,2157	29,2374	5	5	0,000606	0,000840	0,9515	1,0000
197	Kab. Jember	3,0819	3,0491	28,9032	29,0462	3	5	0,000568	0,000587	1,0000	1,0000
198	Kab. Jombang	3,2952	2,5823	28,6426	28,7864	5	5	0,001429	0,000596	0,8934	0,7791
199	Kab. Kediri	3,1131	3,2027	28,9243	29,0044	5	5	0,001651	0,001427	1,0000	1,0000
200	Kab. Lamongan	3,4686	3,2631	29,0014	29,0587	5	5	0,001638	0,001630	0,8216	1,0000
201	Kab. Lumajang	3,1721	3,0749	28,4169	28,5192	5	3	0,000814	0,000892	0,8701	1,0000
202	Kab. Madiun	3,3267	3,2240	28,9103	28,9910	5	5	0,005756	0,005032	1,0000	0,9777
203	Kab. Magetan	3,2515	3,1908	28,2972	28,1949	5	5	0,001796	0,001329	1,0000	0,8275
204	Kab. Malang	3,5205	2,8128	29,3209	29,4892	5	5	0,001390	0,000827	1,0000	0,7148
205	Kab. Mojokerto	3,3092	2,6448	29,3415	29,3064	5	5	0,001358	0,000577	1,0000	0,2935
206	Kab. Nganjuk	3,2640	3,1215	28,5929	28,7523	3	5	0,001216	0,001985	1,0000	1,0000
207	Kab. Ngawi	3,2400	3,1011	28,6158	28,9188	5	5	0,000666	0,000716	1,0000	1,0000
208	Kab. Pacitan	3,3525	3,1840	28,2878	28,3392	5	5	0,001168	0,000407	1,0000	1,0000
209	Kab. Pamekasan	2,9447	2,6154	28,6775	28,7950	5	5	0,001228	0,001336	1,0000	1,0000
210	Kab. Pasuruan	3,5126	3,3978	28,8064	28,9357	5	5	0,001193	0,001782	1,0000	1,0000
211	Kab. Ponorogo	3,0301	3,1672	28,4727	28,6205	5	5	0,002349	0,002613	0,5569	0,8664
212	Kab. Probolinggo	3,2896	3,2230	28,4349	28,4482	5	5	0,001497	0,001042	1,0000	1,0000
213	Kab. Sampang	3,1572	2,9010	28,9711	28,7843	3	3	0,003150	0,003205	0,7535	1,0000
214	Kab. Sidoarjo	3,5926	3,4108	29,6364	30,3892	5	5	0,000928	0,000224	1,0000	0,9764
215	Kab. Situbondo	3,0995	2,9864	28,8276	28,8468	5	5	0,004333	0,000780	1,0000	1,0000
216	Kab. Sumenep	3,2988	3,1416	28,5865	28,7285	3	5	0,003449	0,003413	0,9000	1,0000
217	Kab. Trenggalek	3,4722	3,0997	28,3862	28,4287	5	5	0,000812	0,000868	0,8421	0,4436
218	Kab. Tuban	3,2685	3,1559	29,1259	29,4954	5	5	0,003296	0,000502	0,9893	1,0000

219	Kota Batu	3,1270	2,7325	28,1327	28,1875	5	5	0,004737	0,003273	0,1531	0,8053
220	Kota Blitar	3,4616	2,8003	28,4324	28,4477	5	5	0,001373	0,000594	1,0000	1,0000
221	Kota Kediri	3,3301	3,2769	28,7271	28,7299	5	5	0,002556	0,002385	1,0000	0,9142
222	Kota Madiun	3,2399	3,3056	28,4997	28,5058	3	5	0,004126	0,002843	0,4199	1,0000
223	Kota Malang	3,5760	2,7942	29,4076	29,4583	5	5	0,000627	0,000412	1,0000	0,4541
224	Kota Mojokerto	3,1683	2,6615	28,2456	28,2060	5	5	0,001839	0,001571	1,0000	0,8005
225	Kota Pasuruan	3,1032	2,6260	28,5915	28,6534	5	5	0,002378	0,002798	0,3301	0,9320
226	Kota Probolinggo	3,2442	3,2015	28,0338	28,0963	3	5	0,001137	0,001839	1,0000	1,0000
227	Kota Surabaya	3,5115	3,3029	31,2721	31,3489	5	5	0,000271	0,000218	1,0000	1,0000
228	Kab. Lebak	3,0533	3,0541	29,1580	29,1071	5	5	0,003477	0,000871	0,8317	0,9347
229	Kab. Pandeglang	3,0853	2,9202	28,5495	28,6703	5	5	0,002776	0,002734	0,6968	0,7268
230	Kab. Serang	3,0672	3,0948	28,9441	28,9782	5	5	0,001304	0,001608	0,9885	0,8515
231	Kab. Tangerang	3,1191	2,8858	29,9516	30,1127	5	5	0,001308	0,002193	0,9628	0,2421
232	Kota Cilegon	3,2237	2,6284	28,7715	28,8688	5	5	0,003510	0,000590	0,5872	0,6619
233	Kota Serang	2,9606	3,0233	28,5786	28,4235	3	5	0,001190	0,003720	0,9606	1,0000
234	Kota Tangerang Selatan	3,0701	3,1352	30,5364	30,5827	5	5	0,002012	0,000908	0,9960	0,8181
235	Kab. Gianyar	3,3251	3,3212	28,2035	28,4248	5	5	0,000892	0,000433	0,8107	0,1593
236	Kab. Bima	3,0872	2,8718	28,3911	28,4617	5	5	0,001436	0,000493	0,4938	0,8593
237	Kab. Dompu	2,9808	2,8470	27,9773	28,0455	5	5	0,002905	0,002228	0,6925	0,7509
238	Kab. Lombok Barat	3,3983	3,1345	28,2763	28,3924	5	5	0,003056	0,002223	1,0000	0,8263
239	Kab. Lombok Tengah	3,1254	2,9647	28,5225	28,6169	5	5	0,000831	0,000807	0,3219	0,5732
240	Kab. Lombok Timur	3,1056	3,0517	28,5847	28,7197	5	5	0,005027	0,005609	0,4530	0,1924
241	Kab. Lombok Utara	3,0583	2,8970	27,8798	27,9615	5	5	0,005590	0,005134	1,0000	0,9931
242	Kab. Sumbawa	3,3188	3,1974	28,7131	28,6874	5	5	0,001745	0,001657	1,0000	0,5474
243	Kab. Sumbawa Barat	3,0580	2,9944	28,3911	28,4615	5	5	0,000529	0,000156	1,0000	1,0000

244	Kab. Alor	2,8900	2,6910	28,2560	28,0136	3	3	0,002674	0,002229	0,8640	0,5183
245	Kab. Belu	2,6561	2,6658	27,8645	28,0230	3	3	0,003513	0,003510	0,9332	0,8509
246	Kab. Ende	2,5350	2,7234	27,9822	27,9923	3	3	0,001844	0,003274	0,1007	0,6872
247	Kab. Flores Timur	2,7901	2,6869	27,6967	27,8065	3	3	0,000697	0,000617	0,6809	0,5726
248	Kab. Kupang	2,7496	2,7135	28,2827	28,3164	3	3	0,003618	0,000907	0,4695	0,5710
249	Kab. Lembata	2,5781	2,6965	27,3108	27,4163	3	3	0,001243	0,001645	0,1735	0,2761
250	Kab. Manggarai	2,9235	2,7618	28,1459	28,3233	3	3	0,003744	0,003675	0,9832	0,4300
251	Kab. Manggarai Barat	3,0291	2,9197	28,2423	28,2604	3	3	0,002679	0,002874	0,8465	0,5870
252	Kab. Manggarai Timur	2,8572	2,8655	27,7521	27,9150	3	3	0,002695	0,000963	0,3400	1,0000
253	Kab. Nagekeo	2,6874	2,7084	28,1901	28,2562	3	3	0,001008	0,005868	0,5460	0,6437
254	Kab. Ngada	2,8647	1,5821	27,8079	27,9543	3	3	0,001462	0,003746	0,4493	0,0556
255	Kab. Rote Ndao	2,7659	2,7809	27,7129	27,8141	3	3	0,004857	0,002190	0,9833	0,3897
256	Kab. Sabu Raijua	2,6451	2,6722	27,6545	27,7702	3	3	0,004666	0,001219	0,0851	0,1645
257	Kab. Sikka	2,8731	2,8154	27,9310	27,9851	5	5	0,004509	0,004889	0,4774	0,7268
258	Kab. Sumba Barat	2,7473	2,7242	27,9815	28,0310	3	3	0,004962	0,004638	0,6599	0,5858
259	Kab. Sumba Barat Daya	2,4386	2,6352	27,7816	27,9332	3	3	0,001810	0,001093	0,4197	0,7951
260	Kab. Sumba Tengah	2,2725	2,5049	27,5828	27,6550	3	3	0,001852	0,004981	0,7619	0,9272
261	Kab. Sumba Timur	2,7454	2,7638	28,3710	28,4424	5	3	0,003204	0,002687	0,7913	0,7382
262	Kab. Timor Tengah Selatan	2,6250	2,4672	27,9614	28,2085	3	3	0,004593	0,002785	0,1610	0,1956
263	Kab. Timor Tengah Utara	2,9262	2,7222	28,0164	28,1426	3	3	0,005364	0,006882	0,7588	0,0108
264	Kota Kupang	2,9434	3,0363	28,1239	28,2282	3	3	0,001297	0,001366	0,8495	0,2323
265	Kab. Bengkayang	2,8005	2,7338	28,1809	28,1986	3	3	0,001792	0,001640	1,0000	0,6537
266	Kab. Ketapang	2,8708	2,9044	28,9297	29,0936	5	5	0,000792	0,000422	0,1807	0,5319
267	Kab. Melawi	2,8266	2,6552	28,2066	28,4105	3	3	0,001132	0,001031	0,8104	0,5285
268	Kab. Mempawah	2,9655	2,7092	27,9810	27,9036	5	5	0,005442	0,004032	0,3262	0,2315

269	Kab. Sanggau	3,0051	2,7832	28,3392	28,4332	5	5	0,001360	0,000325	0,6112	0,9651
270	Kab. Sintang	3,1319	2,9770	28,8916	28,9667	5	5	0,001256	0,002602	0,6067	0,8732
271	Kab. Barito Selatan	2,6836	2,7857	28,0780	28,1733	3	5	0,001672	0,001133	0,1908	0,0642
272	Kab. Barito Timur	2,8123	2,7719	27,8401	27,9249	5	5	0,000519	0,000591	1,0000	0,7447
273	Kab. Gunung Mas	2,8706	2,5877	28,3223	28,3495	5	5	0,001732	0,001773	1,0000	1,0000
274	Kab. Kapuas	2,8861	2,6579	28,7498	28,8657	5	5	0,004427	0,004499	0,9734	0,0051
275	Kab. Kotawaringin Barat	2,6680	2,9019	28,5667	28,6342	5	5	0,001174	0,000469	1,0000	1,0000
276	Kab. Kotawaringin Timur	3,0016	2,9038	28,7461	28,7946	5	5	0,000863	0,000765	0,8963	0,8979
277	Kab. Seruyan	2,8001	2,8186	28,7674	28,7684	5	5	0,002219	0,000599	0,5951	0,8644
278	Kota Palangka Raya	2,5977	2,9338	28,5620	28,7110	5	5	0,003176	0,003841	1,0000	0,8188
279	Kab. Hulu Sungai Tengah	3,0795	1,9012	28,3159	28,3588	5	3	0,000621	0,004094	1,0000	0,9978
280	Kab. Hulu Sungai Utara	3,0715	2,9576	28,4490	28,4699	5	5	0,003827	0,003405	1,0000	1,0000
281	Kab. Kotabaru	2,8670	2,8419	28,7125	28,6811	5	5	0,005639	0,005972	0,2602	0,1468
282	Kab. Tabalong	3,1535	3,0240	28,9144	28,9193	5	5	0,002432	0,000692	1,0000	1,0000
283	Kab. Tanah Bumbu	3,2376	3,0442	28,7442	28,7172	5	5	0,001347	0,000604	1,0000	0,9822
284	Kab. Berau	3,3350	3,0701	29,6721	29,6987	3	5	0,001506	0,000788	1,0000	0,6886
285	Kab. Kutai Barat	2,8824	2,8234	29,3442	29,3171	5	5	0,006001	0,001320	0,1385	0,7384
286	Kab. Kutai Kertanegara	3,3938	2,5999	30,5433	30,5006	5	3	0,000453	0,001444	0,6234	0,3985
287	Kab. Kutai Timur	3,0514	2,6975	29,9235	29,8984	5	5	0,000346	0,001371	1,0000	1,0000
288	Kab. Paser	3,0655	2,7851	29,4363	29,4338	5	5	0,001582	0,001292	0,2921	0,0542
289	Kab. Panajam Paser Utara	3,1699	2,8829	28,9313	29,0268	5	5	0,003561	0,003366	1,0000	0,9903
290	Kota Balikpapan	3,1694	3,0890	29,6862	29,6932	5	5	0,000720	0,000664	0,9554	1,0000
291	Kota Bontang	3,2775	3,2742	29,1084	29,1584	5	5	0,002164	0,002400	1,0000	1,0000
292	Kota Samarinda	3,3995	3,2297	30,1024	30,5638	5	5	0,006118	0,000206	0,1908	0,1005
293	Kab. Bulungan	3,0494	2,8447	29,4881	29,4202	3	3	0,003302	0,003063	0,8773	0,1541

294	Kab. Malinau	2,9813	2,8077	29,3099	29,2393	5	5	0,001881	0,001737	0,6947	0,7908
295	Kab. Nunukan	2,9239	2,6560	29,3620	29,2255	5	5	0,004707	0,003652	0,7282	0,9732
296	Kab. Tana Tidung	2,6548	2,7246	28,7721	28,7454	3	3	0,005875	0,005296	0,5715	0,9723
297	Kab. Bolaang Mongondow	2,4682	1,5849	27,8901	27,9879	1	1	0,004150	0,005213	0,5675	0,3684
298	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	3,0121	3,0644	27,6119	27,6805	5	5	0,002461	0,001274	0,9127	0,9339
299	Kab. Bolaang Mongondow Timur	2,9190	2,9559	27,4880	27,5294	5	5	0,004216	0,000325	0,6566	0,4315
300	Kab. Bolaang Mongondow Utara	3,0148	2,8794	27,5740	27,6679	5	5	0,005553	0,006647	0,9614	0,3642
301	Kab. Kepulauan Sangihe	2,9461	2,7773	27,8642	28,0399	5	5	0,005549	0,005779	0,5989	0,4608
302	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	2,7926	2,7734	27,8006	27,8271	5	5	0,005470	0,004139	0,9780	0,8241
303	Kab. Kepulauan Talaud	2,4786	1,7579	27,7259	27,8221	5	5	0,006808	0,008116	0,8352	0,3672
304	Kab. Minahasa	3,1253	2,8531	28,2204	28,2674	5	5	0,002655	0,002392	0,8059	0,8130
305	Kab. Minahasa Selatan	2,9134	2,9451	27,9789	28,0186	5	5	0,004674	0,001292	0,7203	0,5406
306	Kab. Minahasa Tenggara	3,0536	2,9889	27,9254	27,9714	5	5	0,002120	0,001162	0,1427	0,4510
307	Kab. Minahasa Utara	2,9928	2,9901	27,8872	28,0117	5	5	0,003979	0,002117	0,1970	0,3783
308	Kota Bitung	2,9833	3,0384	27,9964	28,1693	5	5	0,003581	0,002583	0,6844	0,8041
309	Kota Manado	2,8575	2,9939	28,7235	28,7976	3	5	0,004170	0,004712	0,2598	0,9734
310	Kota Tomohon	2,8054	3,0007	28,0895	28,0975	5	5	0,004023	0,001296	0,4131	0,1133
311	Kab. Banggai	3,1453	2,9596	28,2665	28,3159	5	5	0,003639	0,004984	0,8589	0,8448
312	Kab. Banggai Kepulauan	2,7243	1,7023	28,7456	28,7855	3	3	0,003965	0,001050	0,4105	0,1579
313	Kab. Buol	2,7053	2,5951	28,0540	28,1018	5	5	0,004381	0,001391	0,5812	0,6148
314	Kab. Donggala	2,8619	2,2745	28,1841	28,1634	3	3	0,005832	0,005458	0,3981	0,3820
315	Kab. Morowali	2,8843	2,5045	28,1328	28,2851	5	3	0,005224	0,004385	0,2462	0,3573

316	Kab. Parigi Moutong	2,8477	2,7197	28,2424	28,2691	3	3	0,005687	0,005879	0,3332	0,3277
317	Kab. Poso	2,8332	2,8473	28,2557	28,3362	3	3	0,006538	0,006049	0,7363	0,6646
318	Kab. Sigi	3,2264	3,0361	27,8627	28,0706	3	5	0,001180	0,001251	0,0203	0,6665
319	Kab. Tolitoli	2,6685	2,9337	28,1847	28,2593	3	3	0,003279	0,001380	0,2885	0,0648
320	Kota Palu	2,9807	2,9253	28,4201	28,5163	5	5	0,003821	0,003938	0,4426	0,7848
321	Kab. Bantaeng	3,2269	3,0257	28,2553	28,4623	5	5	0,000002	0,001356	1,0000	1,0000
322	Kab. Barru	3,1720	3,2113	28,3638	28,4416	5	5	0,003998	0,003368	0,9254	0,9931
323	Kab. Bulukumba	3,4967	3,3291	28,4781	28,4860	5	5	0,002218	0,002054	0,5346	0,9967
324	Kab. Enrekang	3,0176	2,8208	28,1654	28,2203	3	3	0,001613	0,001163	0,1604	0,5736
325	Kab. Gowa	3,3596	3,2412	28,7535	28,8635	5	5	0,001837	0,001150	0,7420	1,0000
326	Kab. Jeneponto	2,9619	2,6403	28,2450	28,2415	1	3	0,006571	0,006895	0,5628	0,9418
327	Kab. Kep. Selayar	3,0335	2,8555	28,4069	28,3043	5	5	0,003785	0,000832	0,8040	1,0000
328	Kab. Luwu	2,9448	2,7711	28,3487	28,3732	5	5	0,003195	0,001342	0,9764	0,8647
329	Kab. Luwu Timur	3,1717	3,0133	28,6129	28,6483	5	5	0,005391	0,001364	1,0000	0,8343
330	Kab. Luwu Utara	3,1153	2,9834	27,6579	27,8675	5	5	0,001430	0,000254	1,0000	1,0000
331	Kab. Maros	3,0003	2,9034	28,4100	28,4980	5	5	0,002104	0,000097	0,3967	1,0000
332	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	2,9063	3,0191	28,3379	28,4215	5	5	0,004218	0,001031	1,0000	1,0000
333	Kab. Pinrang	3,4207	3,1852	28,5632	28,6981	5	5	0,004376	0,000878	1,0000	1,0000
334	Kab. Sidenreng Rappang	3,4648	3,1544	28,5499	28,5542	5	5	0,004752	0,002059	1,0000	1,0000
335	Kab. Takalar	3,0499	1,6428	28,0258	28,0494	3	3	0,002407	0,000743	0,5456	0,6957
336	Kab. Tana Toraja	3,2217	3,0830	28,2172	28,1886	3	3	0,005152	0,006702	0,6988	0,8125
337	Kab. Toraja Utara	3,0473	2,9765	27,7579	27,8053	5	5	0,002457	0,000785	0,0238	0,9326
338	Kab. Wajo	3,0959	2,9545	28,6570	28,7007	5	5	0,003517	0,000975	0,8874	1,0000
339	Kota Makassar	3,5174	3,4404	30,9630	30,9090	5	5	0,000490	0,002851	1,0000	0,5656

340	Kota Palopo	3,1887	3,0493	28,1746	28,2810	5	5	0,004600	0,001189	0,8664	0,6561
341	Kota Parepare	3,3926	3,2175	28,3452	28,3913	5	5	0,001547	0,001400	0,9709	0,3083
342	Kab. Bombana	2,8451	2,9037	27,9630	28,0670	5	5	0,003186	0,000915	0,0780	0,5746
343	Kab. Buton	3,0026	2,7918	27,9074	27,9393	5	5	0,003309	0,003437	1,0000	0,0176
344	Kab. Kolaka	3,0783	2,9266	28,1865	28,2617	5	5	0,004214	0,000633	1,0000	0,2480
345	Kab. Kolaka Utara	3,0492	2,8471	28,0833	28,1234	5	5	0,004603	0,005228	1,0000	0,3886
346	Kab. Konawe Selatan	2,3374	2,8469	28,0576	28,1040	5	5	0,003965	0,000494	0,7982	1,0000
347	Kab. Konawe Utara	2,8116	2,6282	27,9164	27,8621	3	5	0,005518	0,005988	0,0661	0,1308
348	Kab. Muna	1,4652	2,6738	28,2720	28,3753	5	5	0,000968	0,004243	0,3094	0,3198
349	Kab. Wakatobi	3,2124	2,9134	27,8885	27,9331	5	5	0,001068	0,000904	0,7843	0,5703
350	Kota Baubau	2,9997	3,1113	28,1634	28,2774	5	5	0,001567	0,000423	0,6601	0,4853
351	Kab. Boalemo	2,9829	2,9300	27,9526	27,9336	3	5	0,003884	0,002449	0,6079	0,7515
352	Kab. Bone Bolango	3,1537	2,9248	27,8065	27,8062	5	5	0,003466	0,001119	0,6508	0,5078
353	Kab. Gorontalo	3,2963	3,2784	27,9535	27,9862	5	5	0,004307	0,000782	1,0000	0,8862
354	Kab. Gorontalo Utara	2,9747	2,9713	27,4883	27,5847	3	5	0,001299	0,001337	0,1972	0,1721
355	Kab. Pohuwato	3,4770	3,3175	27,7681	27,8310	5	5	0,002293	0,002571	0,5015	0,6820
356	Kota Gorontalo	3,4196	3,4142	28,0514	28,0320	5	5	0,001249	0,000632	0,7109	0,2545
357	Kab. Majene	3,0418	3,0198	28,0236	28,0646	5	5	0,002978	0,002642	1,0000	1,0000
358	Kab. Mamasa	3,0529	2,8702	27,8406	27,9347	5	5	0,004983	0,002563	0,7051	0,5973
359	Kab. Pasangkayu (Mamuju Utara)	2,4493	3,0477	28,0156	28,1196	5	5	0,001580	0,000772	1,0000	0,0529
360	Kab. Buru	2,8852	2,6714	27,2302	27,7326	5	5	0,005558	0,001417	0,6522	0,1445
361	Kab. Buru Selatan	2,5904	2,6014	27,8330	27,9131	1	1	0,002850	0,001657	0,5054	0,6569
362	Kab. Kepulauan Aru	2,4724	2,5026	28,0269	28,1548	1	1	0,002741	0,003943	0,9598	0,0588
363	Kab. Kepulauan Tanimbar	2,6713	2,4627	27,8760	28,0403	3	3	0,001704	0,001455	0,2169	0,7787

	(Maluku Tenggara Barat)										
364	Kab. Maluku Barat Daya	2,6744	2,6408	28,1893	28,1076	3	3	0,005347	0,006310	0,4853	0,6006
365	Kab. Maluku Tengah	2,9493	2,8363	27,7804	27,9092	5	5	0,004791	0,000838	0,2565	0,7356
366	Kab. Maluku Tenggara	2,7304	2,6259	27,9559	28,0244	5	5	0,005275	0,002713	0,1509	0,4749
367	Kab. Seram Bagian Barat	2,6431	2,5102	27,8890	27,6497	1	1	0,002850	0,001019	0,1462	0,1594
368	Kab. Seram Bagian Timur	2,9921	2,2778	28,1101	28,2119	3	3	0,006041	0,006495	1,0000	0,1013
369	Kota Ambon	3,2076	2,8023	27,9795	28,0580	3	5	0,002202	0,001981	0,3288	0,2524
370	Kota Tual	2,6640	2,7043	27,4708	27,6331	3	3	0,005436	0,003182	0,3232	0,2781
371	Kab. Halmahera Selatan	2,8745	2,7632	28,0205	28,1963	5	5	0,001012	0,006618	1,0000	0,6943
372	Kab. Halmahera Tengah	2,6731	2,0137	28,0568	28,3180	3	3	0,004040	0,003981	1,0000	0,7069
373	Kab. Halmahera Timur	2,2153	1,4930	28,1751	28,3142	5	5	0,006176	0,003245	0,5352	0,3239
374	Kab. Halmahera Utara	2,9660	2,7997	27,9050	28,1630	5	5	0,003113	0,002219	0,3829	0,4522
375	Kab. Kepulauan Sula	2,8535	2,4924	27,9069	27,9724	3	3	0,005607	0,005525	0,6205	0,8302
376	Kab. Pulau Morotai	2,4753	2,6271	27,3451	27,4755	3	5	0,001830	0,001266	0,0867	0,2606
377	Kota Ternate	2,8731	2,8011	27,9430	28,4621	5	5	0,004212	0,004496	1,0000	0,4469
378	Kab. Asmat	2,4677	2,5689	28,4562	28,5432	5	5	0,002488	0,002556	0,9757	0,3801
379	Kab. Biak Numfor	2,6812	2,6908	27,9019	27,9501	1	1	0,003172	0,002230	0,1390	0,2480
380	Kab. Boven Digoel	2,2040	2,4717	28,7559	28,7946	1	1	0,003665	0,006131	0,0778	0,3180
381	Kab. Deiyai	1,2849	2,2103	27,9180	27,9222	1	3	0,054338	0,056375	1,0000	0,9805
382	Kab. Dogiyai	1,5305	1,9434	27,9492	28,0159	1	1	0,076851	0,275136	0,8456	0,8199
383	Kab. Intan Jaya	1,8284	2,1243	28,3984	28,5671	3	3	0,016038	0,115457	0,9379	0,9011
384	Kab. Jayapura	2,5507	2,7011	28,4149	28,4367	5	5	0,004026	0,004777	0,8151	0,8167
385	Kab. Jayawijaya	2,6971	2,7664	28,5657	28,5922	5	5	0,001256	0,002240	1,0000	0,9945
386	Kab. Keerom	2,6054	2,3045	28,5384	28,4931	3	3	0,004212	0,002276	0,4823	1,0000
387	Kab. Kepulauan Yapen	2,7520	2,2183	28,1361	28,1702	5	5	0,001668	0,003286	1,0000	1,0000

388	Kab. Lanny Jaya	1,6096	1,4904	28,2892	28,3712	3	3	0,064320	0,025008	0,9065	0,7236
389	Kab. Mamberamo Raya	1,3889	1,7383	28,6617	28,5744	1	1	0,354421	0,347225	0,2993	0,1805
390	Kab. Mamberamo Tengah	1,7303	1,9575	28,6449	28,7654	1	1	0,218223	0,005835	0,9993	0,1270
391	Kab. Mappi	1,8922	1,6921	28,7493	28,8238	1	1	0,054052	0,005634	0,8084	0,0597
392	Kab. Merauke	2,7056	2,6881	29,3124	29,2769	5	5	0,001677	0,000060	0,8462	1,0000
393	Kab. Mimika	2,7637	2,7833	29,0111	29,0877	5	5	0,003143	0,002966	0,9488	0,9791
394	Kab. Nabire	1,7011	2,5351	28,2098	28,2833	5	5	0,058666	0,003386	0,9263	1,0000
395	Kab. Nduga	1,6486	1,8192	27,9373	28,2789	1	3	0,013951	0,004991	0,4206	0,2876
396	Kab. Paniai	1,0864	1,4178	27,9495	27,9796	3	3	0,403957	0,038947	1,0000	0,5647
397	Kab. Pegunungan Bintang	2,1883	1,8967	28,5468	28,6963	3	3	0,045837	0,176260	0,0089	0,0588
398	Kab. Puncak Jaya	1,3619	1,4571	28,2333	28,2804	3	3	0,140594	0,002167	0,8713	0,9508
399	Kab. Sarmi	1,3845	1,6439	28,9179	28,8506	1	1	0,016696	0,121957	0,2540	0,8612
400	Kab. Supiori	1,6347	2,4011	28,3190	28,3540	3	3	0,051375	0,007924	0,2225	0,0916
401	Kab. Tolikara	2,1953	2,1763	28,7686	28,6358	1	1	0,889042	0,676019	0,0749	0,8722
402	Kab. Waropen	2,1771	2,0337	28,2543	28,2950	1	1	0,001143	0,001260	0,0207	0,0053
403	Kab. Yahukimo	1,3110	1,2966	28,1082	28,1856	3	3	0,066624	0,003928	0,9247	0,1752
404	Kab. Yalimo	2,2841	2,2450	28,0814	28,1510	3	3	0,002883	0,002064	0,9393	0,6925
405	Kota Jayapura	3,0224	2,9601	28,5376	28,5545	5	5	0,001312	0,001294	0,1968	0,4162
406	Kab. Fakfak	2,7369	2,6566	28,6053	28,7381	5	5	0,001918	0,001368	0,6341	0,8771
407	Kab. Manokwari	2,4551	1,7103	28,4486	28,5116	3	3	0,008842	0,003063	0,4695	0,3169
408	Kab. Maybrat	1,6291	1,6565	27,9709	28,0720	5	5	0,000441	0,001696	0,0272	0,2918
409	Kab. Raja Ampat	2,5825	2,6035	28,5508	28,5838	5	5	0,003943	0,003403	0,1929	0,0578
410	Kab. Sorong	2,5813	2,1755	28,8635	29,0722	5	5	0,001955	0,000462	0,5850	1,0000
411	Kab. Sorong Selatan	2,2001	2,5463	28,2499	28,2830	5	5	0,005226	0,000935	0,4446	0,2389
412	Kab. Tambrau	2,0960	1,8719	28,2389	28,3045	5	5	0,001275	0,003747	0,7031	0,5495

413	Kab. Teluk Bintuni	2,7204	2,7280	29,1529	29,1826	5	5	0,004959	0,000586	0,3531	0,1717
414	Kab. Teluk Wondama	2,5387	2,6812	28,2453	28,2549	3	3	0,004534	0,000467	0,3484	0,3034
415	Kota Sorong	2,8425	2,7501	28,9316	28,9672	3	3	0,004572	0,001544	0,0110	0,1018

Lampiran 5 Tabulasi Data Setelah Outlier

No	Kabupaten/Kota	(Y) kinerja pemda		(X1) total aset		(X2) opini audit		(X3) Temuan audit		(X4) TLRHP	
		2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
1	Kab. Aceh Barat Daya	2,8947	2,6944	28,1207	28,2219	5	5	0,003856	0,001616	0,5376	0,9582
2	Kab. Aceh Besar	2,6252	2,7305	28,5619	28,6395	5	5	0,000838	0,000868	0,0584	0,2504
3	Kab. Aceh Jaya	2,8412	2,7277	28,3026	28,4106	5	5	0,001991	0,001325	0,7872	0,0225
4	Kab. Aceh Singkil	2,6082	2,7509	27,8255	27,8223	5	5	0,000981	0,000945	1,0000	0,8193
5	Kab. Aceh Tamiang	2,8677	2,7314	28,2675	28,5003	5	5	0,000474	0,000176	1,0000	0,9892
6	Kab. Aceh Tengah	2,8284	2,6750	28,4038	28,5325	5	5	0,001739	0,001686	1,0000	0,6386
7	Kab. Aceh Tenggara	2,4081	2,3559	28,5951	28,7239	3	5	0,001494	0,001516	0,8104	0,0542
8	Kab. Aceh Timur	2,6377	2,5781	28,6846	28,7728	5	5	0,002967	0,002196	0,7151	0,0486
9	Kab. Aceh Utara	2,7760	2,7448	29,0766	29,1132	5	5	0,001036	0,001132	0,5066	0,8671
10	Kab. Bireuen	2,6969	2,7340	28,5309	28,6699	5	5	0,001816	0,000498	1,0000	0,6046
11	Kab. Gayo Lues	2,8159	2,7431	28,4400	28,5164	5	5	0,000927	0,000839	0,7880	0,3784
12	Kab. Nagan Raya	2,8118	2,6520	28,1613	28,2564	5	5	0,002764	0,000529	1,0000	0,9666
13	Kab. Pidie	2,5028	2,6590	28,6104	28,7594	5	5	0,000282	0,000257	0,6207	1,0000
14	Kota Banda Aceh	2,9686	2,9673	29,0548	29,4197	5	5	0,002294	0,002713	1,0000	0,0258
15	Kota Langsa	2,8334	2,7856	27,9901	28,1487	5	5	0,002804	0,002555	0,6781	0,9719
16	Kota Lhokseumawe	2,6330	2,7246	28,0222	28,0839	3	5	0,000779	0,000776	0,0113	1,0000
17	Kota Sabang	2,6819	2,8128	27,9005	27,8016	5	5	0,002271	0,000697	1,0000	1,0000
18	Kota Subulussalam	2,5408	2,6809	27,6937	27,8278	5	5	0,003837	0,001826	0,8656	0,8067
19	Kab. Asahan	2,6857	2,9141	28,8037	28,8119	3	5	0,002851	0,001821	0,4849	0,3825
20	Kab. Dairi	2,6715	2,7697	28,2531	28,2795	5	5	0,001158	0,003261	1,0000	0,9294
21	Kab. Deli Serdang	3,0002	3,0189	29,4479	29,5524	3	3	0,001840	0,000788	0,6500	0,9929

22	Kab. Humbang Hasundutan	2,9558	3,0064	28,1874	28,1766	5	5	0,002929	0,002553	1,0000	0,8849
23	Kab. Karo	2,6782	2,6130	28,2842	28,4565	1	3	0,001287	0,001298	0,9884	0,2848
24	Kab. Labuhanbatu Selatan	2,4859	2,7074	27,7937	27,8107	5	5	0,003465	0,007076	0,8483	0,9792
25	Kab. Labuhanbatu Utara	2,4281	2,8031	28,4143	28,4955	5	5	0,001043	0,005875	0,9888	1,0000
26	Kab. Langkat	2,6630	2,7980	28,9733	28,9912	3	3	0,003025	0,003015	0,7717	0,7600
27	Kab. Nias	2,4727	2,5595	28,0355	28,1020	3	3	0,005131	0,005564	0,6974	0,6791
28	Kab. Nias Barat	2,2590	2,5170	27,4007	27,5852	1	1	0,002221	0,006797	0,5938	0,2348
29	Kab. Padang Lawas	2,6059	2,4580	27,8724	27,9182	3	3	0,002768	0,003212	0,6379	0,5859
30	Kab. Padang Lawas Utara	2,7148	2,7851	27,7980	27,8871	3	5	0,003617	0,004561	0,9723	0,7283
31	Kab. Pakpak Bharat	3,0887	2,9920	27,5394	27,5439	5	5	0,004678	0,004649	0,9750	1,0000
32	Kab. Samosir	2,9037	3,0033	28,0968	28,0211	3	5	0,002275	0,001997	1,0000	0,9529
33	Kab. Serdang Bedagai	3,0462	2,8402	28,1971	28,2347	3	3	0,001079	0,003685	0,4986	0,2887
34	Kab. Simalungun	2,8329	2,6704	28,7392	28,7501	3	1	0,001475	0,001217	0,9801	1,0000
35	Kab. Tapanuli Selatan	2,9468	2,8278	28,2129	28,2978	5	5	0,002012	0,000279	0,8821	0,4462
36	Kab. Tapanuli Tengah	2,8018	2,8567	27,9726	27,9725	3	3	0,003810	0,006048	0,5257	0,5926
37	Kab. Tapanuli Utara	2,7315	2,7627	28,3287	28,2665	5	5	0,001882	0,000796	0,9726	0,8937
38	Kab. Toba Samosir	2,9701	2,7618	28,1351	28,1923	5	5	0,001822	0,000721	0,6498	1,0000
39	Kota Binjai	2,8884	2,8949	27,8266	27,8367	5	5	0,000714	0,000855	0,8336	0,9659
40	Kota Gunungsitoli	2,4590	2,6833	28,0394	28,0409	3	3	0,002949	0,002967	0,9407	0,7937
41	Kota Padangsidimpuan	2,7313	2,6721	27,7679	27,8294	3	3	0,001289	0,004586	0,6308	0,3193
42	Kota pematangsiantar	2,7931	2,7802	28,7115	28,7165	5	5	0,001308	0,000753	0,2123	0,7105
43	Kota Sibolga	2,6710	2,7640	28,0130	27,9397	1	3	0,002665	0,001036	0,1444	0,7963
44	Kota Tanjungbalai	2,5570	2,8348	27,8716	28,0268	3	3	0,003973	0,003657	0,3698	0,9308
45	Kota Tebing Tinggi	3,0687	3,0020	28,0529	28,1552	5	3	0,003409	0,002626	0,7561	0,6554
46	Kab. Agam	3,1750	2,9913	28,2805	28,2704	5	5	0,000777	0,000659	1,0000	1,0000

47	Kab. Dharmasraya	3,1226	3,1856	28,3822	28,4374	5	5	0,003918	0,002193	0,0405	0,2967
48	Kab. Kep Mentawai	2,7307	2,8650	28,1430	27,9765	3	5	0,001727	0,003479	0,6422	0,8725
49	Kab. Lima Puluh Kota	3,0542	2,9384	27,9767	28,0229	5	5	0,000423	0,000403	1,0000	0,9302
50	Kab. Padang Pariaman	3,1217	2,9927	27,8925	27,8886	5	5	0,000932	0,000941	0,8470	0,8277
51	Kab. Pasaman Barat	2,9002	2,8758	28,3949	28,2596	5	5	0,001145	0,001383	0,2851	0,0597
52	Kab. Pesisir Selatan	3,0653	3,0059	28,1899	28,2000	5	5	0,000596	0,000614	0,9887	0,5144
53	Kab. Solok	3,1063	2,9953	28,0864	28,0598	3	5	0,000787	0,000773	0,9427	0,7445
54	Kab. Solok Selatan	2,5555	2,9455	28,1482	28,1714	5	5	0,000481	0,000565	1,0000	1,0000
55	Kota Bukittinggi	3,2205	3,1668	28,0312	28,0466	5	5	0,005865	0,000695	0,1272	0,7954
56	Kota Padang	3,1351	3,1723	29,5598	29,5946	5	5	0,001613	0,001315	0,8475	0,1188
57	Kota Padang Panjang	2,9103	2,9968	27,6658	27,8378	5	5	0,003116	0,001240	0,2739	0,9823
58	Kota Pariaman	3,0341	2,8900	27,5040	27,4346	5	5	0,001650	0,001364	0,8275	0,5420
59	Kab. Indragiri Hilir	2,7722	2,9062	28,9845	28,9486	5	5	0,001873	0,005407	0,3382	0,0676
60	Kab. Indragiri Hulu	2,9958	2,8891	28,8004	28,7816	5	5	0,001436	0,001892	0,4245	0,8108
61	Kab. Kampar	2,9642	2,9564	29,1488	29,0956	5	5	0,000290	0,000240	1,0000	0,3332
62	Kab. Kepulauan Meranti	2,7631	2,6847	28,6536	28,6194	5	5	0,002987	0,001583	0,1720	0,0068
63	Kab. Kuantan Singingi	2,7084	2,8150	28,6119	28,5688	5	5	0,005217	0,001073	0,7616	0,7929
64	Kab. Rokan Hilir	2,8142	2,6121	29,4176	29,3449	3	3	0,000284	0,000199	0,1270	0,5364
65	Kab. Rokan Hulu	2,9097	2,7080	28,6619	28,6791	5	5	0,001178	0,000436	0,4974	0,7447
66	Kab. Siak	3,2401	3,1481	29,4748	29,4031	5	5	0,005500	0,000629	0,4766	0,9504
67	Kota Dumai	2,8230	2,8702	28,8073	28,5522	3	5	0,005142	0,005307	0,0002	0,7583
68	Kota Pekanbaru	3,0481	3,3489	29,3067	29,2911	5	5	0,002770	0,000137	0,3039	0,3950
69	Kab. Bungo	3,0235	2,9345	28,0289	28,1000	3	3	0,004825	0,001994	0,1171	0,9372
70	Kab. Kerinci	3,0512	2,9308	28,0134	28,0624	5	5	0,000785	0,000484	0,8326	0,5829
71	Kab. Merangin	3,3383	2,9938	28,2610	28,3145	5	5	0,003422	0,001171	0,6827	0,4217

72	Kab. Muaro Jambi	2,5630	2,7541	28,4414	28,3266	5	5	0,001243	0,001792	1,0000	0,2037
73	Kab. Sarolangun	3,2787	3,0452	28,3540	28,4137	5	5	0,001892	0,004960	0,2883	0,9754
74	Kab. Tanjung Jabung Barat	2,6481	2,6799	28,7534	28,9256	1	3	0,001241	0,002761	0,5805	0,2521
75	Kab. Tanjung Jabung Timur	2,9232	2,7907	28,2985	28,2379	3	5	0,001187	0,002761	0,7967	0,9704
76	Kab. Tebo	3,0054	2,8783	28,4313	28,4070	5	5	0,001531	0,004676	0,4745	0,7909
77	Kota Jambi	3,0668	2,9893	28,6138	28,6575	5	5	0,004716	0,002134	0,1773	0,1014
78	Kota Sungai Penuh	2,9868	2,8413	27,8146	27,7699	5	5	0,003535	0,002038	0,6798	0,6882
79	Kab. Banyuasin	2,9786	2,8655	29,0012	28,9800	5	5	0,002250	0,002768	1,0000	0,3406
80	Kab. Empat Lawang	2,8922	2,8034	28,2013	28,2682	5	5	0,004020	0,003548	0,2784	0,2525
81	Kab. Lahat	3,0574	2,8902	28,6508	28,6681	5	5	0,001533	0,001289	0,4539	0,9615
82	Kab. Muara Enim	3,1195	2,9910	29,1606	29,2033	5	5	0,001067	0,000566	0,4991	1,0000
83	Kab. Musi Banyuasin	3,0575	2,8552	29,6545	29,6476	5	5	0,002365	0,004642	0,3703	0,3412
84	Kab. Musi Rawas	3,1996	2,9410	28,8644	28,8636	5	5	0,004285	0,004376	0,9703	0,1055
85	Kab. Ogan Ilir	3,0434	2,8794	28,4425	28,2874	5	5	0,004940	0,005403	0,3229	0,5021
86	Kab. Ogan Komering Ilir	3,1356	2,9652	28,8293	28,8758	5	5	0,002652	0,001865	0,7237	0,3104
87	Kab. Ogan Komering Ulu	2,9876	2,8911	28,5848	28,6520	5	5	0,000828	0,004561	0,0211	0,6985
88	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	2,7696	2,7084	28,4537	28,5880	5	5	0,004871	0,002374	0,1116	0,4009
89	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	2,8131	2,7045	28,3289	28,3569	5	5	0,002455	0,007056	0,1394	0,6231
90	Kota Lubuklinggau	2,9761	2,7623	28,4642	28,4778	5	5	0,002400	0,002384	0,6596	0,3364
91	Kota Pagar Alam	2,9768	2,8660	28,2533	28,3643	5	5	0,004986	0,006264	0,4591	0,8152
92	Kota Prabumulih	3,0161	2,9633	28,5532	28,5202	5	5	0,001554	0,000972	0,4000	0,1145
93	Kab. Bengkulu Utara	2,8651	2,6940	27,9999	28,0780	3	5	0,003036	0,001530	0,5409	0,9287
94	Kab. Kaur	3,1128	2,9524	27,8294	27,8241	5	3	0,001187	0,000559	0,9380	0,4019

95	Kab. Kepahiang	2,8857	2,6864	27,7173	27,7749	3	3	0,001701	0,001153	1,0000	0,8408
96	Kab. Lebong	2,7536	2,8519	28,0549	28,0687	5	5	0,001140	0,004975	0,6188	1,0000
97	Kab. Mukomuko	2,9777	2,8640	28,0059	28,0652	3	5	0,003097	0,003136	0,9535	0,9561
98	Kab. Rajang Lebong	2,7285	2,8567	28,0186	28,0283	3	3	0,001283	0,002641	0,8639	0,9537
99	Kab. Seluma	2,7645	2,5627	27,9780	28,0538	3	3	0,001237	0,005010	0,4320	0,7276
100	Kota Bengkulu	2,7803	2,6048	28,2835	28,3166	3	3	0,004270	0,001445	0,6998	0,6460
101	Kab. Lampung Barat	3,3435	3,0269	28,2323	28,3081	5	5	0,000369	0,000596	1,0000	1,0000
102	Kab. Lampung Tengah	3,0755	2,8899	28,7182	28,7482	5	3	0,001605	0,001539	0,9165	0,7126
103	Kab. Lampung Timur	2,8935	2,8069	28,2572	28,5080	3	3	0,001450	0,001349	0,7416	0,2059
104	Kab. Lampung Utara	3,0930	2,8389	28,5011	28,6494	5	5	0,004400	0,000502	0,4291	0,0318
105	Kab. Mesuji	2,7967	2,8076	27,9192	28,0198	5	5	0,002990	0,002819	0,6856	0,5277
106	Kab. Pesawaran	2,9807	2,7933	28,2117	28,2960	5	5	0,001174	0,003752	0,9001	0,3406
107	Kab. Pringsewu	2,9293	2,8924	28,1792	28,3143	5	5	0,001458	0,001420	1,0000	0,8851
108	Kab. Tanggamus	2,8374	2,8416	28,3577	28,3409	3	5	0,001020	0,001997	1,0000	0,6122
109	Kab. Tulang Bawang	2,9011	2,7837	28,3381	28,3474	5	5	0,001820	0,003516	1,0000	0,8429
110	Kab. Tulang Bawang Barat	2,9726	3,0820	28,1092	28,1996	5	5	0,005659	0,004582	1,0000	0,4157
111	Kab. Way Kanan	2,9928	2,9852	28,2948	28,3861	5	5	0,002228	0,002793	0,6268	0,1371
112	Kota Bandar Lampung	2,9745	2,8870	29,0097	29,0309	5	5	0,002824	0,001659	0,9882	1,0000
113	Kab. Bangka	3,2760	3,1147	28,1222	28,2210	5	5	0,002438	0,000918	0,3239	1,0000
114	Kab. Bangka Selatan	3,0880	2,9701	27,7769	27,8201	3	3	0,001097	0,002914	0,8198	0,9837
115	Kab. Bangka Tengah	3,2846	3,0939	27,8220	27,8456	5	5	0,001266	0,002240	0,8608	1,0000
116	Kab. Belitung	3,1628	2,9745	28,1014	28,1527	3	3	0,000988	0,000799	0,5881	1,0000
117	Kab. Belitung Timur	3,1793	2,9700	28,0178	27,9529	3	3	0,001901	0,004887	0,6098	0,1828
118	Kota Pangkalpinang	2,9118	3,0546	28,4360	28,6350	3	5	0,002346	0,002855	0,1866	0,1423
119	Kab. Bintan	3,4239	3,3338	28,5004	28,4778	5	5	0,004936	0,003384	0,4102	0,7039

120	Kab. Karimun	3,2503	3,2974	28,3714	28,3728	5	5	0,003748	0,005895	0,7255	0,6604
121	Kab. Lingga	3,0011	2,9630	28,0470	28,1237	3	5	0,003026	0,000166	0,4323	1,0000
122	Kab. Natuna	2,9411	2,9945	28,4488	28,4814	3	5	0,002782	0,001399	0,1662	0,3256
123	Kota Batam	3,1431	3,0857	28,9517	28,9844	5	5	0,005059	0,004597	0,4157	0,0904
124	Kab. Bandung Barat	3,3684	2,7562	28,7643	28,8450	3	3	0,005338	0,000627	0,3600	0,4661
125	Kab. Cianjur	3,2221	2,5821	29,2043	29,3267	5	5	0,000809	0,000760	0,9261	0,8032
126	Kab. Cirebon	3,2945	2,6287	28,8766	28,9559	5	5	0,001445	0,000940	0,9978	0,5094
127	Kab. Garut	3,4915	3,2750	28,9586	29,0608	5	5	0,000829	0,000923	0,9975	0,5514
128	Kab. Indramayu	3,3660	3,1636	29,0794	29,1084	5	5	0,000323	0,000300	0,6608	0,9869
129	Kab. Karawang	3,3547	3,1596	29,0811	29,1327	5	5	0,002931	0,002570	0,9365	0,6188
130	Kab. Kuningan	3,4975	3,3807	28,4082	28,4140	5	5	0,002074	0,002975	0,6671	0,6341
131	Kab. Majalengka	3,4282	3,1537	29,0677	29,1183	5	5	0,001499	0,001128	0,0018	0,6075
132	Kab. Purwakarta	3,1706	3,2097	28,4743	28,5836	5	5	0,004847	0,000593	0,9203	1,0000
133	Kab. Subang	3,4220	2,6967	29,1725	29,1264	3	3	0,001587	0,000239	0,5718	1,0000
134	Kab. Sukabumi	3,3230	3,2634	28,9587	28,9816	5	5	0,000585	0,000223	0,5927	0,7655
135	Kab. Sumedang	3,3510	3,1292	28,5432	28,7308	5	5	0,000440	0,001126	0,5184	0,7992
136	Kab. Tasikmalaya	3,4185	3,2332	29,0320	29,0051	5	5	0,001240	0,000996	1,0000	1,0000
137	Kota Banjar	3,2391	3,3032	28,0542	28,0826	5	5	0,000930	0,000997	1,0000	0,1164
138	Kota Cirebon	3,2383	3,1177	28,7763	28,8205	5	5	0,003664	0,003660	0,2145	0,1264
139	Kota Sukabumi	3,3879	3,2637	28,0480	28,1300	5	5	0,002528	0,000678	0,5156	0,4307
140	Kab. Banjarnegara	3,2171	2,9424	28,9568	29,0485	5	5	0,002706	0,000246	1,0000	1,0000
141	Kab. Banyumas	3,2101	3,1193	29,2658	29,3292	5	5	0,001105	0,001162	0,9664	0,5233
142	Kab. Batang	3,0471	2,9373	28,4815	28,5079	5	5	0,000205	0,000690	1,0000	0,6987
143	Kab. Blora	3,2678	3,0821	28,4743	28,5657	5	5	0,000529	0,000998	1,0000	0,9994
144	Kab. Boyolali	3,2560	3,1428	28,5910	28,5919	5	5	0,000134	0,001844	1,0000	1,0000

145	Kab. Brebes	3,1264	2,9195	28,6581	28,8751	3	3	0,000175	0,000273	0,8992	0,7380
146	Kab. Cilacap	3,1082	2,9807	29,0170	28,9778	5	5	0,000582	0,000533	1,0000	1,0000
147	Kab. Demak	3,2867	3,1989	29,2221	28,8345	5	5	0,000403	0,000259	1,0000	1,0000
148	Kab. Grobogan	3,2543	3,1075	28,5784	28,6704	5	5	0,002371	0,001222	0,9881	0,7263
149	Kab. Jepara	3,3507	3,0391	29,2767	29,4037	5	5	0,001031	0,000634	0,8154	1,0000
150	Kab. Karanganyar	3,5521	3,3886	28,6556	28,7014	5	5	0,002301	0,002282	0,9688	1,0000
151	Kab. Kebumen	3,1274	2,5236	29,0397	29,0397	3	5	0,001167	0,000320	0,9891	1,0000
152	Kab. Kendal	3,2226	3,0932	28,8085	28,7348	5	5	0,005228	0,005662	0,9006	0,2657
153	Kab. Klaten	3,2138	3,0353	28,8791	28,9466	3	3	0,001850	0,001397	1,0000	0,9518
154	Kab. Kudus	3,4969	3,1959	28,8812	29,0337	5	5	0,001233	0,000823	1,0000	1,0000
155	Kab. Magelang	3,1375	3,1128	28,6673	28,7314	5	5	0,001133	0,000344	1,0000	0,7922
156	Kab. Pati	3,4766	3,3144	29,3574	29,4239	5	5	0,001222	0,000672	1,0000	0,5494
157	Kab. Pemasang	3,0827	2,9110	28,7142	28,7970	5	5	0,000137	0,000565	0,9764	1,0000
158	Kab. Purbalingga	3,2954	2,6286	28,4497	28,5092	5	5	0,001519	0,001136	1,0000	0,7025
159	Kab. Purworejo	3,2167	3,0972	28,5130	28,5823	5	5	0,000587	0,000573	1,0000	0,7584
160	Kab. Rembang	3,1013	2,8848	28,2187	28,1615	3	3	0,002132	0,001700	0,7714	1,0000
161	Kab. Semarang	3,3740	3,2338	28,6462	28,7664	5	5	0,001214	0,000505	0,9338	0,3041
162	Kab. Sragen	3,3252	3,2967	28,6978	28,6120	5	5	0,001926	0,001086	0,8488	0,3574
163	Kab. Sukoharjo	3,3039	3,1332	29,0446	29,1358	5	5	0,000629	0,000233	0,6103	0,9579
164	Kab. Tegal	3,0771	3,0183	28,6589	28,7267	5	5	0,000265	0,000741	0,1058	0,4607
165	Kab. Temanggung	3,2828	3,0512	28,6482	28,7105	5	5	0,003034	0,000887	0,9488	1,0000
166	Kab. Wonogiri	3,1894	2,9428	28,7220	28,7852	5	5	0,001266	0,000142	0,6357	1,0000
167	Kab. Wonosobo	3,1353	3,0905	28,5079	28,6166	5	5	0,001416	0,000444	0,7103	0,6223
168	Kota Magelang	3,3080	3,2214	28,7029	28,9062	5	5	0,001954	0,001045	1,0000	1,0000
169	Kota Pekalongan	3,1587	3,0939	28,4090	28,4688	5	5	0,002101	0,000681	1,0000	1,0000

170	Kota Salatiga	3,1289	3,1231	28,3423	28,7410	5	5	0,001132	0,001377	1,0000	1,0000
171	Kota Surakarta	3,2770	3,0992	29,5377	29,6419	5	5	0,001220	0,000714	1,0000	0,8722
172	Kota Tegal	3,0358	2,6052	28,3623	28,4483	3	3	0,000839	0,006543	0,7002	0,8465
173	Kota Yogyakarta	3,2733	3,1773	28,7690	28,7491	5	5	0,000645	0,000270	0,3239	0,5079
174	Kab. Bangkalan	3,0858	2,9176	28,6695	28,8057	3	5	0,002894	0,004233	1,0000	1,0000
175	Kab. Banyuwangi	3,5259	3,3873	29,0054	29,0391	5	5	0,001484	0,001265	1,0000	1,0000
176	Kab. Blitar	3,2038	3,1238	28,8177	28,9639	5	5	0,001224	0,000544	0,8523	0,9299
177	Kab. Bojonegoro	3,2100	3,1241	29,0667	29,2916	5	5	0,001668	0,000084	0,8786	0,7191
178	Kab. Bondowoso	3,1746	3,0614	28,5263	28,6070	5	5	0,000636	0,000586	1,0000	1,0000
179	Kab. Gresik	3,4728	3,3121	29,2157	29,2374	5	5	0,000606	0,000840	0,9515	1,0000
180	Kab. Jember	3,0819	3,0491	28,9032	29,0462	3	5	0,000568	0,000587	1,0000	1,0000
181	Kab. Jombang	3,2952	2,5823	28,6426	28,7864	5	5	0,001429	0,000596	0,8934	0,7791
182	Kab. Kediri	3,1131	3,2027	28,9243	29,0044	5	5	0,001651	0,001427	1,0000	1,0000
183	Kab. Lamongan	3,4686	3,2631	29,0014	29,0587	5	5	0,001638	0,001630	0,8216	1,0000
184	Kab. Lumajang	3,1721	3,0749	28,4169	28,5192	5	3	0,000814	0,000892	0,8701	1,0000
185	Kab. Madiun	3,3267	3,2240	28,9103	28,9910	5	5	0,005756	0,005032	1,0000	0,9777
186	Kab. Magetan	3,2515	3,1908	28,2972	28,1949	5	5	0,001796	0,001329	1,0000	0,8275
187	Kab. Malang	3,5205	2,8128	29,3209	29,4892	5	5	0,001390	0,000827	1,0000	0,7148
188	Kab. Mojokerto	3,3092	2,6448	29,3415	29,3064	5	5	0,001358	0,000577	1,0000	0,2935
189	Kab. Nganjuk	3,2640	3,1215	28,5929	28,7523	3	5	0,001216	0,001985	1,0000	1,0000
190	Kab. Ngawi	3,2400	3,1011	28,6158	28,9188	5	5	0,000666	0,000716	1,0000	1,0000
191	Kab. Pacitan	3,3525	3,1840	28,2878	28,3392	5	5	0,001168	0,000407	1,0000	1,0000
192	Kab. Pamekasan	2,9447	2,6154	28,6775	28,7950	5	5	0,001228	0,001336	1,0000	1,0000
193	Kab. Pasuruan	3,5126	3,3978	28,8064	28,9357	5	5	0,001193	0,001782	1,0000	1,0000
194	Kab. Ponorogo	3,0301	3,1672	28,4727	28,6205	5	5	0,002349	0,002613	0,5569	0,8664

195	Kab. Probolinggo	3,2896	3,2230	28,4349	28,4482	5	5	0,001497	0,001042	1,0000	1,0000
196	Kab. Sampang	3,1572	2,9010	28,9711	28,7843	3	3	0,003150	0,003205	0,7535	1,0000
197	Kab. Situbondo	3,0995	2,9864	28,8276	28,8468	5	5	0,004333	0,000780	1,0000	1,0000
198	Kab. Sumenep	3,2988	3,1416	28,5865	28,7285	3	5	0,003449	0,003413	0,9000	1,0000
199	Kab. Trenggalek	3,4722	3,0997	28,3862	28,4287	5	5	0,000812	0,000868	0,8421	0,4436
200	Kab. Tuban	3,2685	3,1559	29,1259	29,4954	5	5	0,003296	0,000502	0,9893	1,0000
201	Kota Batu	3,1270	2,7325	28,1327	28,1875	5	5	0,004737	0,003273	0,1531	0,8053
202	Kota Blitar	3,4616	2,8003	28,4324	28,4477	5	5	0,001373	0,000594	1,0000	1,0000
203	Kota Kediri	3,3301	3,2769	28,7271	28,7299	5	5	0,002556	0,002385	1,0000	0,9142
204	Kota Madiun	3,2399	3,3056	28,4997	28,5058	3	5	0,004126	0,002843	0,4199	1,0000
205	Kota Malang	3,5760	2,7942	29,4076	29,4583	5	5	0,000627	0,000412	1,0000	0,4541
206	Kota Mojokerto	3,1683	2,6615	28,2456	28,2060	5	5	0,001839	0,001571	1,0000	0,8005
207	Kota Pasuruan	3,1032	2,6260	28,5915	28,6534	5	5	0,002378	0,002798	0,3301	0,9320
208	Kota Probolinggo	3,2442	3,2015	28,0338	28,0963	3	5	0,001137	0,001839	1,0000	1,0000
209	Kab. Lebak	3,0533	3,0541	29,1580	29,1071	5	5	0,003477	0,000871	0,8317	0,9347
210	Kab. Pandeglang	3,0853	2,9202	28,5495	28,6703	5	5	0,002776	0,002734	0,6968	0,7268
211	Kab. Serang	3,0672	3,0948	28,9441	28,9782	5	5	0,001304	0,001608	0,9885	0,8515
212	Kab. Tangerang	3,1191	2,8858	28,9516	28,1137	5	5	0,001308	0,002193	0,9628	0,2421
213	Kota Cilegon	3,2237	2,6284	28,7715	28,8688	5	5	0,003510	0,000590	0,5872	0,6619
214	Kota Serang	2,9606	3,0233	28,5786	28,4235	3	5	0,001190	0,003720	0,9606	1,0000
215	Kab. Gianyar	3,3251	3,3212	28,2035	28,4248	5	5	0,000892	0,000433	0,8107	0,1593
216	Kab. Bima	3,0872	2,8718	28,3911	28,4617	5	5	0,001436	0,000493	0,4938	0,8593
217	Kab. Dompu	2,9808	2,8470	27,9773	28,0455	5	5	0,002905	0,002228	0,6925	0,7509
218	Kab. Lombok Barat	3,3983	3,1345	28,2763	28,3924	5	5	0,003056	0,002223	1,0000	0,8263
219	Kab. Lombok Tengah	3,1254	2,9647	28,5225	28,6169	5	5	0,000831	0,000807	0,3219	0,5732

220	Kab. Lombok Timur	3,1056	3,0517	28,5847	28,7197	5	5	0,005027	0,005609	0,4530	0,1924
221	Kab. Lombok Utara	3,0583	2,8970	27,8798	27,9615	5	5	0,005590	0,005134	1,0000	0,9931
222	Kab. Sumbawa	3,3188	3,1974	28,7131	28,6874	5	5	0,001745	0,001657	1,0000	0,5474
223	Kab. Sumbawa Barat	3,0580	2,9944	28,3911	28,4615	5	5	0,000529	0,000156	1,0000	1,0000
224	Kab. Alor	2,8900	2,6910	28,2560	28,0136	3	3	0,002674	0,002229	0,8640	0,5183
225	Kab. Belu	2,6561	2,6658	27,8645	28,0230	3	3	0,003513	0,003510	0,9332	0,8509
226	Kab. Ende	2,5350	2,7234	27,9822	27,9923	3	3	0,001844	0,003274	0,1007	0,6872
227	Kab. Flores Timur	2,7901	2,6869	27,6967	27,8065	3	3	0,000697	0,000617	0,6809	0,5726
228	Kab. Kupang	2,7496	2,7135	28,2827	28,3164	3	3	0,003618	0,000907	0,4695	0,5710
229	Kab. Lembata	2,5781	2,6965	27,3108	27,4163	3	3	0,001243	0,001645	0,1735	0,2761
230	Kab. Manggarai	2,9235	2,7618	28,1459	28,3233	3	3	0,003744	0,003675	0,9832	0,4300
231	Kab. Manggarai Barat	3,0291	2,9197	28,2423	28,2604	3	3	0,002679	0,002874	0,8465	0,5870
232	Kab. Manggarai Timur	2,8572	2,8655	27,7521	27,9150	3	3	0,002695	0,000963	0,3400	1,0000
233	Kab. Nagekeo	2,6874	2,7084	28,1901	28,2562	3	3	0,001008	0,005868	0,5460	0,6437
234	Kab. Rote Ndao	2,7659	2,7809	27,7129	27,8141	3	3	0,004857	0,002190	0,9833	0,3897
235	Kab. Sabu Raijua	2,6451	2,6722	27,6545	27,7702	3	3	0,004666	0,001219	0,0851	0,1645
236	Kab. Sikka	2,8731	2,8154	27,9310	27,9851	5	5	0,004509	0,004889	0,4774	0,7268
237	Kab. Sumba Barat	2,7473	2,7242	27,9815	28,0310	3	3	0,004962	0,004638	0,6599	0,5858
238	Kab. Sumba Barat Daya	2,4386	2,6352	27,7816	27,9332	3	3	0,001810	0,001093	0,4197	0,7951
239	Kab. Sumba Tengah	2,2725	2,5049	27,5828	27,6550	3	3	0,001852	0,004981	0,7619	0,9272
240	Kab. Sumba Timur	2,7454	2,7638	28,3710	28,4424	5	3	0,003204	0,002687	0,7913	0,7382
241	Kab. Timor Tengah Selatan	2,6250	2,4672	27,9614	28,2085	3	3	0,004593	0,002785	0,1610	0,1956
242	Kab. Timor Tengah Utara	2,9262	2,7222	28,0164	28,1426	3	3	0,005364	0,006882	0,7588	0,0108
243	Kota Kupang	2,9434	3,0363	28,1239	28,2282	3	3	0,001297	0,001366	0,8495	0,2323
244	Kab. Bengkulu	2,8005	2,7338	28,1809	28,1986	3	3	0,001792	0,001640	1,0000	0,6537

245	Kab. Ketapang	2,8708	2,9044	28,9297	29,0936	5	5	0,000792	0,000422	0,1807	0,5319
246	Kab. Melawi	2,8266	2,6552	28,2066	28,4105	3	3	0,001132	0,001031	0,8104	0,5285
247	Kab. Mempawah	2,9655	2,7092	27,9810	27,9036	5	5	0,005442	0,004032	0,3262	0,2315
248	Kab. Sanggau	3,0051	2,7832	28,3392	28,4332	5	5	0,001360	0,000325	0,6112	0,9651
249	Kab. Sintang	3,1319	2,9770	28,8916	28,9667	5	5	0,001256	0,002602	0,6067	0,8732
250	Kab. Barito Selatan	2,6836	2,7857	28,0780	28,1733	3	5	0,001672	0,001133	0,1908	0,0642
251	Kab. Barito Timur	2,8123	2,7719	27,8401	27,9249	5	5	0,000519	0,000591	1,0000	0,7447
252	Kab. Gunung Mas	2,8706	2,5877	28,3223	28,3495	5	5	0,001732	0,001773	1,0000	1,0000
253	Kab. Kapuas	2,8861	2,6579	28,7498	28,8657	5	5	0,004427	0,004499	0,9734	0,0051
254	Kab. Kotawaringin Barat	2,6680	2,9019	28,5667	28,6342	5	5	0,001174	0,000469	1,0000	1,0000
255	Kab. Kotawaringin Timur	3,0016	2,9038	28,7461	28,7946	5	5	0,000863	0,000765	0,8963	0,8979
256	Kab. Seruyan	2,8001	2,8186	28,7674	28,7684	5	5	0,002219	0,000599	0,5951	0,8644
257	Kota Palangka Raya	2,5977	2,9338	28,5620	28,7110	5	5	0,003176	0,003841	1,0000	0,8188
258	Kab. Hulu Sungai Utara	3,0715	2,9576	28,4490	28,4699	5	5	0,003827	0,003405	1,0000	1,0000
259	Kab. Kotabaru	2,8670	2,8419	28,7125	28,6811	5	5	0,005639	0,005972	0,2602	0,1468
260	Kab. Tabalong	3,1535	3,0240	28,9144	28,9193	5	5	0,002432	0,000692	1,0000	1,0000
261	Kab. Tanah Bumbu	3,2376	3,0442	28,7442	28,7172	5	5	0,001347	0,000604	1,0000	0,9822
262	Kab. Berau	3,3350	3,0701	29,6721	29,6987	3	5	0,001506	0,000788	1,0000	0,6886
263	Kab. Kutai Barat	2,8824	2,8234	29,3442	29,3171	5	5	0,006001	0,001320	0,1385	0,7384
264	Kab. Paser	3,0655	2,7851	29,4363	29,4338	5	5	0,001582	0,001292	0,2921	0,0542
265	Kab. Panajam Paser Utara	3,1699	2,8829	28,9313	29,0268	5	5	0,003561	0,003366	1,0000	0,9903
266	Kota Balikpapan	3,1694	3,0890	29,6862	29,6932	5	5	0,000720	0,000664	0,9554	1,0000
267	Kota Bontang	3,2775	3,2742	29,1084	29,1584	5	5	0,002164	0,002400	1,0000	1,0000
268	Kab. Bulungan	3,0494	2,8447	29,4881	29,4202	3	3	0,003302	0,003063	0,8773	0,1541
269	Kab. Malinau	2,9813	2,8077	29,3099	29,2393	5	5	0,001881	0,001737	0,6947	0,7908

270	Kab. Nunukan	2,9239	2,6560	29,3620	29,2255	5	5	0,004707	0,003652	0,7282	0,9732
271	Kab. Tana Tidung	2,6548	2,7246	28,7721	28,7454	3	3	0,005875	0,005296	0,5715	0,9723
272	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	3,0121	3,0644	27,6119	27,6805	5	5	0,002461	0,001274	0,9127	0,9339
273	Kab. Bolaang Mongondow Timur	2,9190	2,9559	27,4880	27,5294	5	5	0,004216	0,000325	0,6566	0,4315
274	Kab. Bolaang Mongondow Utara	3,0148	2,8794	27,5740	27,6679	5	5	0,005553	0,006647	0,9614	0,3642
275	Kab. Kepulauan Sangihe	2,9461	2,7773	27,8642	28,0399	5	5	0,005549	0,005779	0,5989	0,4608
276	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	2,7926	2,7734	27,8006	27,8271	5	5	0,005470	0,004139	0,9780	0,8241
277	Kab. Minahasa	3,1253	2,8531	28,2204	28,2674	5	5	0,002655	0,002392	0,8059	0,8130
278	Kab. Minahasa Selatan	2,9134	2,9451	27,9789	28,0186	5	5	0,004674	0,001292	0,7203	0,5406
279	Kab. Minahasa Tenggara	3,0536	2,9889	27,9254	27,9714	5	5	0,002120	0,001162	0,1427	0,4510
280	Kab. Minahasa Utara	2,9928	2,9901	27,8872	28,0117	5	5	0,003979	0,002117	0,1970	0,3783
281	Kota Bitung	2,9833	3,0384	27,9964	28,1693	5	5	0,003581	0,002583	0,6844	0,8041
282	Kota Manado	2,8575	2,9939	28,7235	28,7976	3	5	0,004170	0,004712	0,2598	0,9734
283	Kota Tomohon	2,8054	3,0007	28,0895	28,0975	5	5	0,004023	0,001296	0,4131	0,1133
284	Kab. Banggai	3,1453	2,9596	28,2665	28,3159	5	5	0,003639	0,004984	0,8589	0,8448
285	Kab. Banggai Kepulauan	2,7243	2,7023	28,7456	28,7855	3	3	0,003965	0,001050	0,4105	0,1579
286	Kab. Buol	2,7053	2,5951	28,0540	28,1018	5	5	0,004381	0,001391	0,5812	0,6148
287	Kab. Donggala	2,8619	2,2745	28,1841	28,1634	3	3	0,005832	0,005458	0,3981	0,3820
288	Kab. Morowali	2,8843	2,5045	28,1328	28,2851	5	3	0,005224	0,004385	0,2462	0,3573
289	Kab. Parigi Moutong	2,8477	2,7197	28,2424	28,2691	3	3	0,005687	0,005879	0,3332	0,3277
290	Kab. Poso	2,8332	2,8473	28,2557	28,3362	3	3	0,006538	0,006049	0,7363	0,6646
291	Kab. Sigi	3,2264	3,0361	27,8627	28,0706	3	5	0,001180	0,001251	0,0203	0,6665

292	Kab. Tolitoli	2,6685	2,9337	28,1847	28,2593	3	3	0,003279	0,001380	0,2885	0,0648
293	Kota Palu	2,9807	2,9253	28,4201	28,5163	5	5	0,003821	0,003938	0,4426	0,7848
294	Kab. Bantaeng	3,2269	3,0257	28,2553	28,4623	5	5	0,001432	0,001356	1,0000	1,0000
295	Kab. Barru	3,1720	3,2113	28,3638	28,4416	5	5	0,003998	0,003368	0,9254	0,9931
296	Kab. Bulukumba	3,4967	3,3291	28,4781	28,4860	5	5	0,002218	0,002054	0,5346	0,9967
297	Kab. Enrekang	3,0176	2,8208	28,1654	28,2203	3	3	0,001613	0,001163	0,1604	0,5736
298	Kab. Gowa	3,3596	3,2412	28,7535	28,8635	5	5	0,001837	0,001150	0,7420	1,0000
299	Kab. Jeneponto	2,9619	2,6403	28,2450	28,2415	1	3	0,006571	0,006895	0,5628	0,9418
300	Kab. Kep. Selayar	3,0335	2,8555	28,4069	28,3043	5	5	0,003785	0,000832	0,8040	1,0000
301	Kab. Luwu	2,9448	2,7711	28,3487	28,3732	5	5	0,003195	0,001342	0,9764	0,8647
302	Kab. Luwu Timur	3,1717	3,0133	28,6129	28,6483	5	5	0,005391	0,001364	1,0000	0,8343
303	Kab. Luwu Utara	3,1153	2,9834	27,6579	27,8675	5	5	0,001430	0,000254	1,0000	1,0000
304	Kab. Maros	3,0003	2,9034	28,4100	28,4980	5	5	0,002104	0,000097	0,3967	1,0000
305	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	2,9063	3,0191	28,3379	28,4215	5	5	0,004218	0,001031	1,0000	1,0000
306	Kab. Pinrang	3,4207	3,1852	28,5632	28,6981	5	5	0,004376	0,000878	1,0000	1,0000
307	Kab. Sidenreng Rappang	3,4648	3,1544	28,5499	28,5542	5	5	0,004752	0,002059	1,0000	1,0000
308	Kab. Tana Toraja	3,2217	3,0830	28,2172	28,1886	3	3	0,005152	0,006702	0,6988	0,8125
309	Kab. Toraja Utara	3,0473	2,9765	27,7579	27,8053	5	5	0,002457	0,000785	0,0238	0,9326
310	Kab. Wajo	3,0959	2,9545	28,6570	28,7007	5	5	0,003517	0,000975	0,8874	1,0000
311	Kota Palopo	3,1887	3,0493	28,1746	28,2810	5	5	0,004600	0,001189	0,8664	0,6561
312	Kota Parepare	3,3926	3,2175	28,3452	28,3913	5	5	0,001547	0,001400	0,9709	0,3083
313	Kab. Bombana	2,8451	2,9037	27,9630	28,0670	5	5	0,003186	0,000915	0,0780	0,5746
314	Kab. Buton	3,0026	2,7918	27,9074	27,9393	5	5	0,003309	0,003437	1,0000	0,0176
315	Kab. Kolaka	3,0783	2,9266	28,1865	28,2617	5	5	0,004214	0,000633	1,0000	0,2480

316	Kab. Kolaka Utara	3,0492	2,8471	28,0833	28,1234	5	5	0,004603	0,005228	1,0000	0,3886
317	Kab. Konawe Selatan	2,3374	2,8469	28,0576	28,1040	5	5	0,003965	0,000494	0,7982	1,0000
318	Kab. Konawe Utara	2,8116	2,6282	27,9164	27,8621	3	5	0,005518	0,005988	0,0661	0,1308
319	Kab. Wakatobi	3,2124	2,9134	27,8885	27,9331	5	5	0,001068	0,000904	0,7843	0,5703
320	Kota Baubau	2,9997	3,1113	28,1634	28,2774	5	5	0,001567	0,000423	0,6601	0,4853
321	Kab. Boalemo	2,9829	2,9300	27,9526	27,9336	3	5	0,003884	0,002449	0,6079	0,7515
322	Kab. Bone Bolango	3,1537	2,9248	27,8065	27,8062	5	5	0,003466	0,001119	0,6508	0,5078
323	Kab. Gorontalo	3,2963	3,2784	27,9535	27,9862	5	5	0,004307	0,000782	1,0000	0,8862
324	Kab. Gorontalo Utara	2,9747	2,9713	27,4883	27,5847	3	5	0,001299	0,001337	0,1972	0,1721
325	Kab. Pohuwato	3,4770	3,3175	27,7681	27,8310	5	5	0,002293	0,002571	0,5015	0,6820
326	Kota Gorontalo	3,4196	3,4142	28,0514	28,0320	5	5	0,001249	0,000632	0,7109	0,2545
327	Kab. Majene	3,0418	3,0198	28,0236	28,0646	5	5	0,002978	0,002642	1,0000	1,0000
328	Kab. Mamasa	3,0529	2,8702	27,8406	27,9347	5	5	0,004983	0,002563	0,7051	0,5973
329	Kab. Pasangkayu (Mamuju Utara)	2,4493	3,0477	28,0156	28,1196	5	5	0,001580	0,000772	1,0000	0,0529
330	Kab. Buru	2,8852	2,6714	27,2302	27,7326	5	5	0,005558	0,001417	0,6522	0,1445
331	Kab. Buru Selatan	2,5904	2,6014	27,8330	27,9131	1	1	0,002850	0,001657	0,5054	0,6569
332	Kab. Kepulauan Aru	2,4724	2,5026	28,0269	28,1548	1	1	0,002741	0,003943	0,9598	0,0588
333	Kab. Kepulauan Tanimbar (Maluku Tenggara Barat)	2,6713	2,4627	27,8760	28,0403	3	3	0,001704	0,001455	0,2169	0,7787
334	Kab. Maluku Barat Daya	2,6744	2,6408	28,1893	28,1076	3	3	0,005347	0,006310	0,4853	0,6006
335	Kab. Maluku Tengah	2,9493	2,8363	27,7804	27,9092	5	5	0,004791	0,000838	0,2565	0,7356
336	Kab. Maluku Tenggara	2,7304	2,6259	27,9559	28,0244	5	5	0,005275	0,002713	0,1509	0,4749
337	Kab. Seram Bagian Barat	2,6431	2,5102	27,8890	27,6497	1	1	0,002850	0,001019	0,1462	0,1594
338	Kab. Seram Bagian Timur	2,9921	2,2778	28,1101	28,2119	3	3	0,006041	0,006495	1,0000	0,1013

339	Kota Ambon	3,2076	2,8023	27,9795	28,0580	3	5	0,002202	0,001981	0,3288	0,2524
340	Kota Tual	2,6640	2,7043	27,4708	27,6331	3	3	0,005436	0,003182	0,3232	0,2781
341	Kab. Halmahera Selatan	2,8745	2,7632	28,0205	28,1963	5	5	0,001012	0,006618	1,0000	0,6943
342	Kab. Halmahera Tengah	2,6731	2,5137	28,0568	28,3180	3	3	0,004040	0,003981	1,0000	0,7069
343	Kab. Halmahera Utara	2,9660	2,7997	27,9050	28,1630	5	5	0,003113	0,002219	0,3829	0,4522
344	Kab. Kepulauan Sula	2,8535	2,4924	27,9069	27,9724	3	3	0,005607	0,005525	0,6205	0,8302
345	Kab. Pulau Morotai	2,4753	2,6271	27,3451	27,4755	3	5	0,001830	0,001266	0,0867	0,2606
346	Kota Ternate	2,8731	2,8011	27,9430	28,4621	5	5	0,004212	0,004496	1,0000	0,4469
347	Kab. Asmat	2,4677	2,5689	28,4562	28,5432	5	5	0,002488	0,002556	0,9757	0,3801
348	Kab. Biak Numfor	2,6812	2,6908	27,9019	27,9501	1	1	0,003172	0,002230	0,1390	0,2480
349	Kab. Boven Digoel	2,5040	2,4717	28,7559	28,7946	1	1	0,003665	0,006131	0,0778	0,3180
350	Kab. Jayapura	2,5507	2,7011	28,4149	28,4367	5	5	0,004026	0,004777	0,8151	0,8167
351	Kab. Jayawijaya	2,6971	2,7664	28,5657	28,5922	5	5	0,001256	0,002240	1,0000	0,9945
352	Kab. Keerom	2,6054	2,3045	28,5384	28,4931	3	3	0,004212	0,002276	0,4823	1,0000
353	Kab. Kepulauan Yapen	2,7520	2,6183	28,1361	28,1702	5	5	0,001668	0,003286	1,0000	1,0000
354	Kab. Merauke	2,7056	2,6881	29,3124	29,2769	5	5	0,001677	0,000060	0,8462	1,0000
355	Kab. Mimika	2,7637	2,7833	29,0111	29,0877	5	5	0,003143	0,002966	0,9488	0,9791
356	Kab. Waropen	2,6771	2,7337	28,2543	28,2950	1	1	0,001143	0,001260	0,0207	0,0053
357	Kab. Yalimo	2,2841	2,3450	28,0814	28,1510	3	3	0,002883	0,002064	0,9393	0,6925
358	Kota Jayapura	3,0224	2,9601	28,5376	28,5545	5	5	0,001312	0,001294	0,1968	0,4162
359	Kab. Fakfak	2,7369	2,6566	28,6053	28,7381	5	5	0,001918	0,001368	0,6341	0,8771
360	Kab. Raja Ampat	2,5825	2,6035	28,5508	28,5838	5	5	0,003943	0,003403	0,1929	0,0578
361	Kab. Sorong	2,5813	2,6755	28,8635	29,0722	5	5	0,001955	0,000462	0,5850	1,0000
362	Kab. Sorong Selatan	2,7001	2,5463	28,2499	28,2830	5	5	0,005226	0,000935	0,4446	0,2389
363	Kab. Teluk Bintuni	2,7204	2,7280	29,1529	29,1826	5	5	0,004959	0,000586	0,3531	0,1717

364	Kab. Teluk Wondama	2,5387	2,6812	28,2453	28,2549	3	3	0,004534	0,000467	0,3484	0,3034
365	Kota Sorong	2,8425	2,7501	28,9316	28,9672	3	3	0,004572	0,001544	0,0110	0,1018

Lampiran 6 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	KINERJA	LN_TA	OPINI	TEMUAN	TLRHP
Mean	2.863426	28.50080	4.310843	0.011357	0.672406
Median	2.924350	28.40695	5.000000	0.001983	0.747800
Maximum	3.592600	31.34890	5.000000	0.889042	1.000000
Minimum	1.086400	27.23020	1.000000	2.00E-06	0.000200
Std. Dev.	0.403156	0.607116	1.123175	0.050077	0.315324
Skewness	-1.519652	1.434317	-1.388666	11.27915	-0.589003
Kurtosis	6.154574	6.411799	3.948404	163.4590	2.020858
Jarque-Bera Probability	663.6092 0.000000	687.1510 0.000000	297.8677 0.000000	908018.9 0.000000	81.14694 0.000000
Sum	2376.644	23655.67	3578.000	9.426127	558.0970
Sum Sq. Dev.	134.7411	305.5608	1045.802	2.078902	82.42674
Observations	830	830	830	830	830

Lampiran 7 Hasil Estimasi Model Regresi Data Panel

1. Hasil Uji Regresi Data Panel *Common Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.495512	0.510572	-0.970504	0.3321
LN_TA	0.107222	0.018103	5.922745	0.0000
OPINI	0.075060	0.008464	8.867840	0.0000
TEMUAN	-8.435361	5.094859	-1.655661	0.0982
TLRHP	0.113301	0.027136	4.175288	0.0000
R-squared	0.227931	Mean dependent var	2.942929	
Adjusted R-squared	0.223671	S.D. dependent var	0.249515	
S.E. of regression	0.219846	Akaike info criterion	-0.184952	
Sum squared resid	35.04094	Schwarz criterion	-0.153493	
Log likelihood	72.50743	Hannan-Quinn criter.	-0.172815	
F-statistic	53.50873	Durbin-Watson stat	1.819122	
Prob(F-statistic)	0.000000			

2. Hasil Uji Regresi Data Panel *Fixed Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.014653	0.692996	1.464154	0.1440
LN_TA	0.059553	0.024286	2.452149	0.0147
OPINI	0.052619	0.009855	5.339504	0.0000
TEMUAN	-5.225611	5.542517	-0.942823	0.3464
TLRHP	0.021087	0.029237	0.721260	0.4712
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.796173	Mean dependent var	2.942929	
Adjusted R-squared	0.588393	S.D. dependent var	0.249515	
S.E. of regression	0.160080	Akaike info criterion	-0.519493	
Sum squared resid	9.250855	Schwarz criterion	1.802197	
Log likelihood	558.6148	Hannan-Quinn criter.	0.376232	
F-statistic	3.831812	Durbin-Watson stat	1.989071	
Prob(F-statistic)	0.000000			

3. Hasil Uji Regresi Data Panel *Random Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.165577	0.495687	-0.334035	0.7385
LN_TA	0.097702	0.017498	5.583696	0.0000
OPINI	0.067194	0.007825	8.587050	0.0000
TEMUAN	-7.974306	4.580836	-1.740797	0.0821
TLRHP	0.075888	0.024281	3.125432	0.0018
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.147528	0.4593
Idiosyncratic random			0.160080	0.5407
Weighted Statistics				
R-squared	0.182282	Mean dependent var	1.791461	

Adjusted R-squared	0.177771	S.D. dependent var	0.178744
S.E. of regression	0.162079	Sum squared resid	19.04557
F-statistic	40.40355	Durbin-Watson stat	1.990007
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.223146	Mean dependent var	2.942929
Sum squared resid	35.25809	Durbin-Watson stat	1.074954

Lampiran 8 Pemilihan Estimasi Model Regresi Data Panel

1. Uji *Chow*

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.764882	(364,361)	0.0000
Cross-section Chi-square	972.214742	364	0.0000

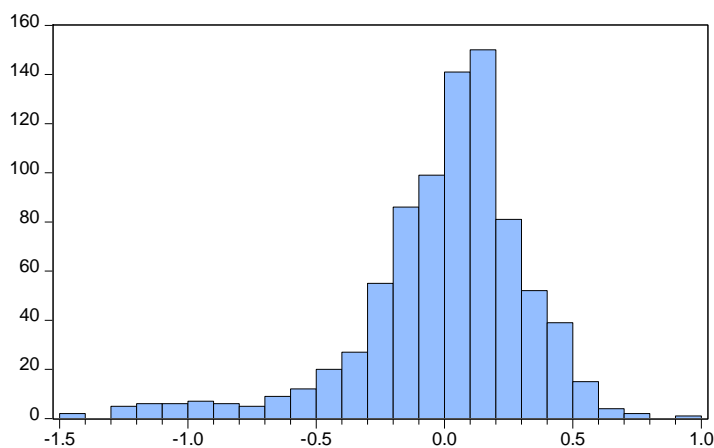
2. Uji *Hausman*

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	22.223345	4	0.0002

Lampiran 9 Hasil Uji Asumsi Klasik

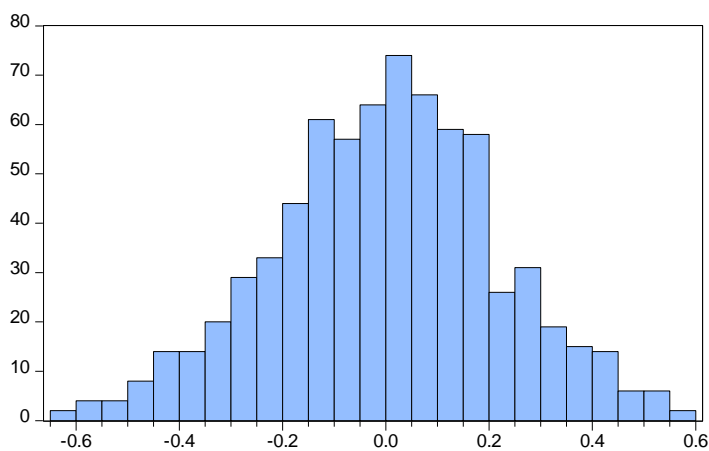
1. Uji Normalitas

Sebelum Outlier Data



Series: Standardized Residuals Sample 2016 2017 Observations 830	
Mean	1.40e-16
Median	0.059804
Maximum	0.996966
Minimum	-1.424727
Std. Dev.	0.331475
Skewness	-1.289748
Kurtosis	5.946569
Jarque-Bera	530.3725
Probability	0.000000

Setelah Outlier Data



Series: Standardized Residuals Sample 2016 2017 Observations 730	
Mean	3.19e-15
Median	0.009239
Maximum	0.582371
Minimum	-0.607782
Std. Dev.	0.219242
Skewness	-0.093123
Kurtosis	2.910788
Jarque-Bera	1.297157
Probability	0.522788

2. Uji Autokorelasi

R-squared	0.796173	Mean dependent var	2.942929
Adjusted R-squared	0.588393	S.D. dependent var	0.249515
S.E. of regression	0.160080	Akaike info criterion	-0.519493
Sum squared resid	9.250855	Schwarz criterion	1.802197
Log likelihood	558.6148	Hannan-Quinn criter.	0.376232
F-statistic	3.831812	Durbin-Watson stat	1.989071
Prob(F-statistic)	0.000000		

3. Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.414257	0.309397	-1.338916	0.1810
LN_TA	0.019384	0.010970	1.766901	0.0777
OPINI	0.005835	0.005129	1.137572	0.2557
TEMUAN	-1.472678	3.087392	-0.476997	0.6335
TLRHP	0.020939	0.016444	1.273350	0.2033
R-squared	0.013786	Mean dependent var	0.173575	
Adjusted R-squared	0.008345	S.D. dependent var	0.133782	
S.E. of regression	0.133223	Akaike info criterion	-1.186763	
Sum squared resid	12.86752	Schwarz criterion	-1.155303	
Log likelihood	438.1684	Hannan-Quinn criter.	-1.174625	
F-statistic	2.533704	Durbin-Watson stat	1.670284	
Prob(F-statistic)	0.039126			

4. Uji Multikolonieritas

	LN_TA	OPINI	TEMUAN	TLRHP
LN_TA	1.000000	0.242403	-0.228612	0.118547
OPINI	0.242403	1.000000	-0.177096	0.215439
TEMUAN	-0.228612	-0.177096	1.000000	-0.193022
TLRHP	0.118547	0.215439	-0.193022	1.000000

Lampiran 10 Hasil Uji Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.014653	0.692996	1.464154	0.1440
LN_TA	0.059553	0.024286	2.452149	0.0147
OPINI	0.052619	0.009855	5.339504	0.0000
TEMUAN	-5.225611	5.542517	-0.942823	0.3464
TLRHP	0.021087	0.029237	0.721260	0.4712
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				

R-squared	0.796173	Mean dependent var	2.942929
Adjusted R-squared	0.588393	S.D. dependent var	0.249515
S.E. of regression	0.160080	Akaike info criterion	-0.519493
Sum squared resid	9.250855	Schwarz criterion	1.802197
Log likelihood	558.6148	Hannan-Quinn criter.	0.376232
F-statistic	3.831812	Durbin-Watson stat	1.989071
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 11 Hasil Pengujian Hipotesis

1. Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.796173	Mean dependent var	2.942929
Adjusted R-squared	0.588393	S.D. dependent var	0.249515
S.E. of regression	0.160080	Akaike info criterion	-0.519493
Sum squared resid	9.250855	Schwarz criterion	1.802197
Log likelihood	558.6148	Hannan-Quinn criter.	0.376232
F-statistic	3.831812	Durbin-Watson stat	1.989071
Prob(F-statistic)	0.000000		

2. Uji F

R-squared	0.796173	Mean dependent var	2.942929
Adjusted R-squared	0.588393	S.D. dependent var	0.249515
S.E. of regression	0.160080	Akaike info criterion	-0.519493
Sum squared resid	9.250855	Schwarz criterion	1.802197
Log likelihood	558.6148	Hannan-Quinn criter.	0.376232
F-statistic	3.831812	Durbin-Watson stat	1.989071
Prob(F-statistic)	0.000000		

3. Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.014653	0.692996	1.464154	0.1440
LN_TA	0.059553	0.024286	2.452149	0.0147
OPINI	0.052619	0.009855	5.339504	0.0000
TEMUAN	-5.225611	5.542517	-0.942823	0.3464
TLRHP	0.021087	0.029237	0.721260	0.4712

Lampiran 12 Hasil Cek Plagiarisme

DETERMINAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
DAERAH: UKURAN DAERAH, OPINI AUDIT, TEMUAN AUDIT
DAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN
(Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 20

ORIGINALITY REPORT

29%
SIMILARITY INDEX

27%
INTERNET SOURCES

7%
PUBLICATIONS

11%
STUDENT PAPERS

Lampiran 13 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

1. Nama : Riska Amalia Sari
2. Tempat, Tanggal Lahir : Boyolali, 01 Mei 1999
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Alamat : Pilangsari RT 05 RW 01, Potronayan,
Nogosari, Boyolali.
5. Agama : Islam
6. Nomor Telepon : 083865627822
7. E- Mail : riskaamalia0105@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Periode (Tahun)			Sekolah / Institusi / Universitas	Jurusan	Jenjang Pendidikan
2004	-	2005	TK Aisyah	-	TK
2005	-	2011	SD N 1 Taruban	-	Sekolah Dasar
2011	-	2014	SMP N 1 Ngeplak	-	SLTP
2014	-	2017	SMK N 6 Surakarta	Multimedia	SLTA
2017	-	Sekarang	IAIN Surakarta	Akuntansi Syariah	Perguruan Tinggi